ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA PERIODE SEBELUM KERUSUHAN TAHUN 1994/1995 – 1998/1999 DAN PERIODE PASCA KERUSUHAN TAHUN 1999/2000 - 2003

SKRIPSI

Di susun oleh :

KURNIA SULISTYORINI

01313175

JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2005

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA PERIODE SEBELUM KERUSUHAN TAHUN 1994/1995 – 1998/1999 DAN PERIODE PASCA KERUSUHAN TAHUN 1999/2000 - 2003

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana Jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Pada Fakultas Ekonomi UII

Disusun Oleh :

Kurnia Sulistyorini

01313175

JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2005

Penulis

(Kurnia Sulistyorini)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA

PERIODE SEBELUM KERUSUHAN TAHUN 1994/1995 – 1998/1999

DAN PERIODE PASCA KERUSUHAN TAHUN 1999/2000 - 2003

Disusun oleh :

Kurnia Sulistyorini

01313175

Yogyakarta, Mei 2005

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dra. Indah Susantun, Msi.)

PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan / diujikan dan disahkan untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang Strata I pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Nama	: Kurnia Sulistyorini
No. Mahasiswa	: 01313175
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 16 Juli 2005
Disahkan Oleh,

Pembimbing Skripsi	: Dra. Indah Susantun, M.Si	.....
Penguji I	: Drs. Munrokhim M, M.A.Ec, P.hD	.....
Anggota II	: Drs. Moh. Bekti Hendrie Anto, M.Sc	.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Suwarsono Muhammad, MA

HALAMAN MOTTO

"Hidup di dunia ini tidak lain hanya suatu kesenangan dan permainan. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya".

(Al - Ankabut : 64)

"Pelajarilah ilmu, karena ilmu itu menunjukkan yang halal dan yang haram, serta menara lampu jalan menuju surga. Ilmu itu menjadi penasehat di waktu susah, di waktu bepergian, teman berbicara di waktu menyendiri, petunjuk jalan di waktu sedih dan gembira, senjata untuk melawan musuh, dan perhiasan dalam pandangan sahabat dan kekasih".

(H.R. Ibnu Abdil Barr)

"Hidup yang menghidupkan orang lain adalah hidup yang paling berharga".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini akan kupersembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu yang tercinta, terkasih dan tersayang di rumah
- Adikku Herlina Kusumaningtyas yang kusayangi
- Seseorang yang kucintai dan mencintaiku
- Sahabatku dalam suka dan duka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Periode Sebelum Kerusuhan Tahun 1994/1995 – 1998/1999 Dan Periode Pasca Kerusuhan Tahun 1999/2000 - 2003".

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, namun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat pula bagi berbagai pihak yang ingin memanfaatkannya.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan, baik dari segi referensinya maupun keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, tetapi akhirnya semua hambatan itu dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Dra. Indah Susantun, MSi, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan hingga skripsi ini dapat selesai.
2. Bapak Drs. Suwarsono Muhammad, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UII.
3. Bapak Rokhedi Priyo Santoso, SE, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Bapak Sumarsono, SE, MM, selaku Kepala Dipenda Kota Surakarta yang telah memberikan ijin dalam mengadakan penelitian.
5. Seluruh staf dan karyawan Dipenda Kota Surakarta, terima kasih atas bantuan dan keramahannya.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
7. Mas Ismanto, yang telah memberikan waktu serta nasehat-nasehat, hingga dapat terselesainya skripsi ini.
8. Bapak dan ibu di rumah, atas segala jerih payah, cucuran keringat dan air mata serta doa yang kesemuanya itu untukku yang takkan mungkin terbalas dengan apapun.
9. Adikku Herlina Kusumaningtyas, yang selalu menghiburku dikala sedih. Juga buat Eki dan Devi di rumah. Buat om rus dan tante siti, om joko dan tante wiwik, terima kasih atas dorongan dan motivasinya. Tak lupa buat adik-adikku Vaye, Lutfi, Kikid, Rizal, Ocha.
10. Thank especially to ***Bayu***, atas waktu dan perhatian yang diberikan, serta kesabaran yang tulus, dan sebentuk cinta dan kasih sayang.
11. Teteh Ida dan Akang Dono, terima kasih sekali buat semangat, pengertian, perhatian dan doanya. Si kecil ita cipit, Yani Upil, Teteh Orie, terima kasih atas

bantuan dan motivasinya yang tak mungkin terlupakan dan juga buat anak-anak kos "Dinda": Ambar, Ika, Sastri, Raysa, Mila terima kasih buat cerita-ceritanya.

12. *My Best Friend Tita*, terima kasih atas bantuannya dan tidak akan pernah kulupakan perjuanganmu dan buat Rini, Rika, Risna, makasih telah menjadi tempatku untuk bercerita. Teman-temanku Adam, Weni, Marina, Vita yang menemaniku kuliah dan buat anak-anak EP angkatan 2001 semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
13. Semua pihak yang turut membantu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi mereka yang mempunyai minat terhadap penelitian sejenis.

Yogyakarta, Mei 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... I

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..... II

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... III

HALAMAN PENESAHAN UJIAN IV

HALAMAN MOTTO..... V

HALAMAN PERSEMBAHAN..... VI

KATA PENGANTAR..... VII

DAFTAR ISI..... X

DAFTAR TABEL..... XIV

ABSTRAKSI..... XVIII

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 11

1.3. Tujuan Masalah..... 11

1.4. Manfaat Penelitian..... 12

1.5. Sistematika Pembahasan..... 13

BAB II. TELAAH PUSTAKA..... 15

BAB III. LANDASAN TEORI

3.1. Pendapatan Asli Daerah..... 18

3.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 18

3.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah..... 20

3.2. Retribusi Daerah..... 22

3.2.1. Definisi Retribusi dan Retribusi Daerah..... 22

3.2.2. Ketentuan Umum Retribusi Daerah..... 24

3.2.3. Jenis dan Penetapan Tarif Retribusi..... 26

3.2.4. Kinerja Pungutan Retribusi Daerah..... 29

3.3. Pengertian Pasar..... 36

3.4. Retribusi Pasar..... 37

3.4.1. Pengertian Retribusi Pasar..... 37

3.4.2. Obyek Retribusi Pasar..... 38

3.4.3. Subyek Retibusi Pasar..... 39

3.4.4. Penagihan Retribusi Pasar..... 39

3.4.5. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar..... 41

3.5. Hubungan Retribusi Pasar dengan PAD..... 42

BAB IV. GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

4.1. Keadaan Geografis..... 44

4.2. Dasar Hukum..... 45

4.3. Luas Wilayah..... 46

4.4. Keadaan Penduduk..... 48

4.5. Pemerintahan..... 54

4.6. Tenaga Kerja..... 55

4.7. Keadaan Ekonomi..... 56

4.8. Perindustrian..... 64

4.9. Dinas Pendapatan Daerah..... 67

4.10.Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta..... 71

BAB V. METODE PENELITIAN

5.1. Metode Pengumpulan Data..... 80

5.2. Macam Data..... 80

5.3. Metode Analisis Data..... 81

BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Penerimaan PAD dan Retribusi Pasar..... 88

6.2. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah..... 91

6.3. Elastisitas Retribusi Pasar..... 95

6.4. Potensi Retribusi Pasar..... 98

6.5. Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Pasar..... 101

6.6. Efektifitas Retribusi Pasar..... 104

6.7. Efisiensi Retribusi Pasar..... 108

BAB VII. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Simpulan..... 113

7.2. Implikasi..... 115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 1999 – 2003 5

Tabel 1.2. Penerimaan Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 1999 – 2003 9

Tabel 4.1. Batas Wilayah Kota Surakarta 44

Tabel 4.2. Luas Wilayah Kota Surakarta Dirinci Menurut Kecamatan 47

Tabel 4.3. Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta 49

Tabel 4.4. Banyaknya Desa/Kelurahan, KK, dan Penduduk per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2003 51

Tabel 4.5. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 1994 – 2003 52

Tabel 4.6. Banyaknya Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2003 53

Tabel 4.7. Mutasi Penduduk menurut Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2003 53

Tabel 4.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kota Surakarta Tahun 1994 – 2003 59

Tabel 4.9. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta Tahun 1994 – 2003 61

Tabel 4.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Perkapita, dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 1994 – 2003..... 63

Tabel 4.11. Banyaknya Perusahaan Industri Pengolahan Besar/Sedang dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri di Kota Surakarta Tahun 2003..... 65

Tabel 4.12. Banyaknya Kelompok Usaha dan Jumlah Unit Usaha di Kota Surakarta Tahun 2003..... 66

Tabel 4.13. Banyaknya Industri Besar, Sedang dan Kecil Menurut Kelompok Usaha di Kota Surakarta Tahun 2003..... 67

Tabel 4.14. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 1994/1995 – 2003..... 72

Tabel 4.15. Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 1994/1995 – 2003..... 73

Tabel 4.16. Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 1994/1995 – 2003..... 74

Tabel 4.17. Pengelompokan Pasar Berdasarkan Kelas di Kota Surakarta..... 76

Tabel 4.18. Tarif Retribusi Pasar Berdasarkan Kelas di Kota Surakarta..... 78

Tabel 4.19. Pertumbuhan Retribusi Pasar Kota Surakarta Tahun Anggaran 1994/1995 – 2003..... 79

Tabel 6.1. Pertumbuhan PAD dan Retribusi Pasar Kota Surakarta sebelum kerusuhan Tahun 1994/1995 – 1998/1999..... 88

Tabel 6.2. Pertumbuhan PAD dan Retribusi Pasar Kota Surakarta setelah kerusuhan Tahun 1999/2000 – 2003..... 90

Tabel 6.3. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sebelum kerusuhan Tahun Anggaran 1994/1995 – 1998/1999..... 92

Tabel 6.4. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta setelah kerusuhan Tahun Anggaran 1999/2000 – 2003..... 93

Tabel 6.5. Elastisitas Retribusi Pasar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan sebelum kerusuhan Kota Surakarta Tahun Anggaran 1994/1995 – 1998/1999..... 96

Tabel 6.6. Elastisitas Retribusi Pasar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan setelah kerusuhan Kota Surakarta Tahun Anggaran 1999/2000 – 2003..... 97

Tabel 6.7. Potensi Penerimaan Retribusi Seluruh Pasar Kota Surakarta sebelum kerusuhan Tahun 1994/1995 – 1998/1999..... 99

Tabel 6.8. Potensi Penerimaan Retribusi Seluruh Pasar Kota Surakarta setelah kerusuhan Tahun 1999/2000 – 2003..... 100

Tabel 6.9. Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Pasar terhadap PDRB Harga Konstan Kota Surakarta sebelum kerusuhan Tahun Anggaran 1994/1995 – 1998/1999..... 102

Tabel 6.10. Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Pasar terhadap PDRB Harga Konstan Kota Surakarta setelah kerusuhan Tahun Anggaran 1999/2000 – 2003 103

Tabel 6.11. Efektifitas Retribusi Pasar Kota Surakarta sebelum kerusuhan Tahun Anggaran1994/1995 – 1998/1999 105

Tabel 6.12. Efektifitas Retribusi Pasar Kota Surakarta setelah kerusuhan Tahun Anggaran1999/2000 – 2003 106

Tabel 6.13. Efisiensi Retribusi Pasar Kota Surakarta sebelum kerusuhan Tahun Anggaran1994/1995– 1998/1999 108

Tabel 6.14. Efisiensi Retribusi Pasar Kota Surakarta setelah kerusuhan Tahun Anggaran1999/2000 – 2003 110

ABSTRAKSI

Skripsi ini disusun sebagai hasil penelitian tentang penerimaan Retribusi Pasar sebelum terjadinya kerusuhan yaitu antara tahun 1994/1995 – 1998/1999 dan sesudah terjadinya kerusuhan yaitu antara tahun 1999/2000 – 2003 di Kota Surakarta. Penulis menggunakan analisis yang mengukur kontribusi, elastisitas, potensi, tingkat upaya, efektifitas dan efisiensi retribusi pasar Kota Surakarta pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kontribusi, tingkat upaya dan potensi retribusi pasar di Kota Surakarta dari sebelum kerusuhan sampai sesudah kerusuhan digolongkan pada kategori yang cukup baik, tetapi walaupun demikian masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Sedangkan elastisitas retribusi pasar digolongkan pada kategori cukup elastis. Untuk efisiensi dan efektifitas retribusi pasar sudah bisa digolongkan pada kinerja pemungutan retribusi pasar yang sangat efisien. Hasil analisis tingkat pertumbuhan menunjukkan bahwa pertumbuhan retribusi pasar di Kota Surakarta tiap tahun cenderung mengalami peningkatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah telah mengubah peta politik dalam penataan kewenangan dan kewajiban pemerintah. Selama orde baru sentralisasi kekuasaan sangat terasa dalam setiap aktifitas pemerintah di daerah, bahkan rancangan pembangunan disetiap daerah lebih sering mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang terfokus pada otonomi daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, maka telah membawa perubahan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah daerah dan mengatur anggaran daerahnya. Daerah yang semula hanya menunggu sejumlah daftar kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kini harus berpikir sendiri dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan program secara sistematis dan strategis.

Saat ini, undang-undang Otonomi Daerah telah diperbarui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengandung inti dari konsep otonomi

daerah yaitu upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah luas. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat terwujud secara nyata dan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memiliki kesinambungan fiskal secara nasional. Undang-undang ini telah memberikan paradigma baru dalam proses pembangunan.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Daerah otonomi selain mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri juga berwenang menarik berbagai jenis pajak dan retribusi yang terdapat didaerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Di tengah kompleksitas masalah yang akan dihadapi, otonomi dalam kerangka pemikiran positip tetap dinilai memberikan lebih banyak nilai-nilai positip dan ini tidak akan pernah ada yang membantahnya. Otonomi memungkinkan terlaksananya *bottom up planning* secara signifikan dan mengikis rantai birokrasi yang dirasakan sangat menghambat pelayanan kepada masyarakat. Otonomi juga akan dapat memberdayakan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Peranan keuangan daerah akan semakin penting karena daerah dituntut lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dananya sendiri dan mengelola dana yang diterimanya. Pada hakekatnya pengelolaan keuangan

daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Dalam rangka desentralisasi tersebut dibentuk daerah-daerah otonom dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan akhir meningkatkan pembangunan terutama dalam hal pelayanan dengan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Untuk mencapai pelaksanaan yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    - Pajak daerah
    - Retribusi daerah
    - Pendapatan dari perusahaan milik daerah
    - pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
    - Dana Bagi Hasil
    - Dana Alokasi umum
    - Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman daerah
    - Pemerintah
    - Pemerintah Daerah Lain
    - Lembaga Keuangan Bank

- Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Masyarakat

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Antara lain : hibah dan pendapatan dana darurat.

Kota Surakarta merupakan daerah yang sedang berkembang dan merupakan barometer perekonomian di Jawa Tengah pada bagian timur, sehingga banyak sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kota Surakarta juga merupakan daerah transit bagi para pedagang dari berbagai daerah yang hendak melaksanakan perjalanan ke kota lain, yang memungkinkan para pedagang tersebut singgah dan melaksanakan berbagai macam kegiatan perdagangan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surakarta berusaha untuk meningkatkan pendapatan yang merupakan pendapatan asli daerah, mengingat masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga perlu adanya usaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang diantaranya dengan meningkatkan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Bila dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, sektor retribusi daerah memberikan peran yang berarti bagi keuangan daerah dan menempati urutan pertama. Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta untuk tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 2003 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Tahun Anggaran 1994/1995 - 2003

Komponen PAD	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
Pajak Daerah	4.834.738.089	5.881.655.561	6.473.586.402	7.535.326.360	7.903.412.099
Retribusi Daerah	7.731.267.166	8.982.760.738	9.672.311.720	10.351.221.990	8.078.604.279
Laba BUMD	235.898.259	303.582.880	418.753.059	514.200.998	353.451.061
Lain-lain PAD yang sah	374.936.155	428.706.831	601.529.403	533.602.512	1.164.068.285
Jumlah PAD	**12.976.839.669**	**15.596.706.010**	**17.166.180.584**	**18.934.341.860**	**17.499.535.724**

Sumber : Dipenda Kota Surakarta Tahun 2003

Sambungan Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Tahun Anggaran 1994/1995 - 2003

Komponen PAD	1999/2000	2000	2001	2002	2003
Pajak Daerah	9.154.634.854	9.612.536.662	15.880.303.712	20.943.450.996	24.656.997.669
Retribusi Daerah	9.558.255.723	9.929.961.832	16.723.167.571	20.039.596.865	26.678.119.563
Laba BUMD	252.772.913	285.426.000	388.992.000	466.364.400	664.397.000
Lain-lain PAD yang sah	922.405.621	2.085.903.985	2.648.070.350	3.488.671.838	2.816.170.006
Jumlah PAD	**19.888.069.111**	**21.913.828.479**	**35.640.533.633**	**44.938.084.099**	**54.815.684.238**

Sumber : Dipenda Kota Surakarta Tahun 2003

Apabila kita melihat pada tahun 1998 Kota Surakarta menjadi kota mati. Hal ini terjadi karena adanya kerusuhan di berbagai daerah, khususnya Kota Surakarta yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan perdagangan yang ada di Kota Surakarta. Pada saat itu, pasar-pasar yang ada di Kota Surakarta menjadi sasaran amukan masa yang berakibat banyaknya korban yang berjatuhan serta bangunan-bangunan yang rusak. Aktifitas pasar yang semula ramai akan penjual dan pembeli berubah menjadi sepi, karena mereka takut akan situasi dan kondisi kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Sehingga kegiatan perekonomian Kota Surakarta khususnya di pasar-pasar menjadi terhenti. Banyak para pedagang yang kehilangan pendapatannya, yang berakibat berkurangnya penerimaan dari pasar terutama retribusi yang dapat menjadi pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. Akibat dari kerusuhan tersebut juga menimbulkan berkurangnya para investor untuk menanamkan modalnya, karena mereka takut akan kondisi yang tidak menentu. Selain pada sektor perekonomian, sektor pemerintahan juga mengalami kelumpuhan total. Dampak kerusuhan tersebut juga merambah kedalam pusat pemerintahan yaitu terbakarnya kantor pusat pemerintahan yang juga menjadi sasaran amukan masyarakat.

Retribusi daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Oleh karena itu retribusi daerah harus dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka

optimalisasi dan usaha peningkatan pandapatan asli daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek retribusi daerah. Retribusi daerah dipungut hanya bila masyarakat menggunakan barang atau fasilitas milik negara, misalnya pasar, dimana pedagang membayar retribusi kepada pemerintah hanya bila pedagang tersebut menggunakan fasilitas milik negara seperti toko/kios atau los yang telah disediakan oleh pemerintah.

Dari berbagai pajak daerah dan retribusi daerah, salah satu yang cukup menonjol adalah penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar dipungut berdasarkan penggunaan pasar dan fasilitasnya yang disediakan pemerintah daerah. Retribusi pasar sebagai salah satu jenis retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup berarti kepada retribusi daerah. Perkembangan penerimaan retribusi pasar dan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah kerusuhan 1998/1999 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Penerimaan Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah

Kota Surakarta Tahun 1994/1995 – 2003

Tahun Anggaran	Target Retribusi Pasar	Realisasi Retribusi Pasar	Pendapatan Asli Daerah
1994/1995	2.720.000.000	2.723.391.345	12.976.839.669
1995/1996	2.943.000.000	2.950.359.965	15.596.706.010
1996/1997	3.143.000.000	3.150.613.181	17.166.180.584
1997/1998	3.400.000.000	3.408.588.205	18.934.341.860
1998/1999	2.830.000.000	2.898.057.575	17.499.535.724
1999/2000	3.167.500.000	3.239.387.560	19.888.069.111
2000	3.433.696.000	3.617.834.297	21.913.828.479
2001	5.360.000.000	6.346.069.949	35.640.533.633
2002	7.200.000.000	7.227.405.058	44.938.084.099
2003	7.983.000.000	8.341.932.424	54.815.684.238

Sumber data : Dipenda Kota Surakarta Tahun 2003

Di daerah Kota Surakarta retribusi daerah meliputi retribusi pasar yang merupakan sumber penerimaan yang potensial bagi pendapatan asli daerah. Retribusi pasar adalah uang pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran baik tetap maupun tidak tetap di pasar. Pasar adalah tempat bangunan atau lapangan tertentu yang dipergunakan untuk usaha mempertunjukkan, memperjualbelikan, menyimpan barang dagangan atau menjalankan usaha perdagangan atau memberikan atau menawarkan jasa sebagai mata pencaharian.

Dalam usaha meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pasar terdapat berbagai hambatan. untuk mengatasi hambatan tersebut, maka pemerintah daerah beserta instansi lain yang terkait melaksanakan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi. Cara tersebut akan sangat bermanfaat dan dirasa tepat guna apabila dalam operasionalnya disadari akan pentingnya hasil pendapatan asli daerah dalam membangun daerah.

Untuk itu pemerintah Kota Surakarta perlu berupaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar agar pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan sehingga dapat melancarkan pembangunan. Salah satu usaha mencapai tujuan adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola secara efektif dan efisien. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, maka penulis memilih judul "ANALISIS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA PERIODE SEBELUM KERUSUHAN ANTARA TAHUN 1994/1995 – 1998/1999 DAN PERIODE PASCA KERUSUHAN ANTARA TAHUN 1999/2000 - 2003".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah ?
2. Bagaimana elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB ?
3. Seberapa besar potensi retribusi pasar sebelum terjadinya kerusuhan yaitu antara tahun 1994/1995 – 1998/1999 dan sesudah terjadinya kerusuhan yaitu antara tahun 1999/2000 – 2003 ?
4. Seberapa besar tingkat upaya pemungutan retribusi pasar ?
5. Bagaimana efektifitas retribusi pasar dalam pencapaian target ?
6. Bagaimana efisiensi retribusi pasar terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta, sehingga dapat diketahui seberapa besar sumbangan yang dapat diberikan oleh retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk menganalisis elastisitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk menganalisis besarnya potensi retribusi pasar yang sesungguhnya untuk masing-masing tahun.

4. Untuk menganalisis usaha pemerintah daerah Kota Surakarta dalam memungut retribusi pasar.
5. Untuk menganalisis efektifitas retribusi pasar di Kota Surakarta.
6. Untuk menganalisis efisiensi retribusi pasar di Kota Surakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi pemerintah daerah Kota Surakarta dalam memaksimalkan penerimaan retribusi pasar sebagai bagian dari pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kota Surakarta.
3. Sebagai pertimbangan bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya mengenai pengelolaan penerimaan retribusi pasar.
4. Memperkaya khasanah penelitian sejenis yang telah ada dan dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi 7 bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mendokumentasikan dan mengkaji hasil penelitian yang pernah ada pada area yang sama.

BAB III. LANDASAN TEORI

Berisi tentang konsep dan teori retribusi, pengertian retribusi daerah, jenis dan macam retribusi, tolak ukur dalam menilai pajak, dasar hukum retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah, pengertian retribusi pasar, ketentuan-ketentuan retribusi pasar.

BAB IV. GAMBARAN UMUM

Berisikan tentang gambaran umum daerah penelitian, yang menampilkan deskripsi lokasi penelitian, luas wilayah, serta keadaan penduduk, pertumbuhan ekonomi, struktur organisasi kantor dinas pendapatan daerah, sistem dan prosedur administrasi retribusi pasar dan data tentang penerimaan pajak daerah.

BAB V. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan masalah.

BAB VI. ANALISIS DATA

Pada analisis data akan dibahas mengenai konsep analisis kontribusi retribusi pasar terhadap PAD, elastisitas retribusi pasar terhadap PAD, potensi retribusi pasar, tingkat upaya pemungutan retribusi pasar, analisis efektivitas retribusi pasar, dan analisis analisis efisiensi retribusi pasar.

BAB VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dan implikasi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Beberapa peneliti terdahulu yang sejenis atau studi yang telah dilakukan, walaupun berbeda-beda pokok permasalahan yang dibahas, sesuai dengan bahasan penelitian ini, maka telaah pustaka yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan disajikan secara singkat, yaitu :

1. Skripsi karya Fitriyah Nurlaili, dengan judul "Peran Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang". Hasil dari analisis itu adalah :
    1. Besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Jombang tahun 1997/1998 sampai tahun 2002 dirasa belum cukup maksimal dan mengalami fluktuatif, tetapi pada dua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup berarti.
    2. Jika dilihat dari perhitungan potensi retribusi pasar maka dapat dilihat dari tahun ke tahun potensi retribusi pasar dari masing-masing elemen (los, kios, ruko, dan pasar hewan) selalu mengalami peningkatan. Potensi retribusi pasar yang paling besar bersumber dari los, disusul kios, ruko, dan yang terakhir pasar hewan.
    3. Efektifitas retribusi pasar berfluktuatif, meski sebagian besar mengalami penurunan, dan penurunan terbesar pada tahun 2001.
    4. Tingkat efisiensi retribusi pasar di Kabupaten Jombang cukup efisien dan tidak mengalami kenaikan yaitu tetap sebesar 2,99 persen.

2. Skripsi karya Ahmad Sunardi, dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Terminal di Kota Magelang". Hasil dari analisis itu adalah :
    1. Penurunan kontribusi retribusi terminal terhadap PAD maupun retribusi daerah pada tahun 1998/1999 – 1999/2000 disebabkan karena berkurangnya retribusi pasar yang cukup banyak. Hal ini sebagai akibat adanya krisis ekonomi dan tidak diberlakukannya pemungutan retribusi peron.
    2. Pelaksanaan pemungutan retrribusi terminal sudah semakin efisien namun belum cukup efektif, karena dari penerimaan retribusi terminal yang mengalami penurunan pada tahun anggaran 1998/1999 - 1999/2000.
    3. Dari keseluruhan perkembangan potensi, target dan realisasi retribusi terminal kota Magelang dapat diketahui bahwa rata-rata pencapaian realisasi melebih target yang ditetapkan (dibawah potensi yang sebenarnya) atau dapat dikatakan bahwa penerimaan itu belum secara optimal dipungut berdasarkan potensi yang ada.
3. Skripsi karya Arif Sudaryanto dengan judul "Peran Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Potensinya di Kabupaten Demak". Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa :
    1. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Demak rata-rata 11,16%, yang artinya dari seluruh jumlah PAD, 11,16% adalah bersumber dari retribusi pasar.

2. Potensi retribusi pasar di Kabupaten Demak sebesar 2.168.814.746 pada tahun 2000.
3. Tingkat efektifitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Demak tahun 2000 sebesar 32,51% yang berarti lebih besar dari target.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Pendapatan Asli Daerah

3.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penjelasan umum undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa :

Pembangunan daerah sebagai sebagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan

dan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan suatu Negara pada hakikatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara tegas dan jelas.

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

3.1.2. Sumber Pendapatan asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

Sedangkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Perimbangan yang tercantum dalam pasal 10 UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil yaitu : Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi khusus

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Sedangkan Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah.

3.2. Retribusi Daerah

3.2.1. Definisi Retribusi dan Retribusi Daerah

Ada beberapa pengertian tentang retribusi yang dapat digunakan sebagai referensi, antara lain :

1. Pengertian retribusi secara umum adalah "pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara"*(Rochmad Sumitro, 1979, 17).*
2. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan *(M. Suparmoko, 2002, 85).*
3. Retribusi adalah penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara dan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat dalam hubungannya yang bersifat publik *(Soetrisno PH, 1982, 202),* dapat diartikan sebagai dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Retribusi merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu *(S.Munawir, 1980, 4).*

5. Retribusi merupakan suatu pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh daerah *(Bachrul Elmi, dikutip oleh Abdul Halim, 2000, 52).*
6. Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada negara dimana bias dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut *(M. Suparmoko, 1987, 94).*
7. Retribusi adalah pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seorang atau suatu badan karena jasa yang nyata dari pemerintah daerah.

Terdapat dua karakteristik yang penting dalam retribusi yaitu[1] :

a. Adanya sifat kontrapretasi tertentu yang langsung dapat ditunjuk bagi jasa yang diberikan oleh Negara.
b. Prestasi negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifik Negara.

Disamping itu ada beberapa pengertian tentang retribusi, yaitu :

Menurut Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1957 dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan pengertian retribusi sebagai berikut :

" Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena masyarakat memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah."

Disamping itu, ada beberapa pengertian tentang Retribusi Daerah yang penulis gunakan juga sebagai referensi, yaitu :

[1] Adolf Wagner C. Goedhart, (Terjemahan Ratmoko, SH), *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit Jambatan, 1973, Halaman 94

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung *(The Liang Gie, 1968, 78).*
2. Retribusi Daerah adalah pungutan pendapatan oleh Pemerintah sebagai pengganti (kerugian) diensten yang diberikan oleh daerah kepada siapa saja yang membutuhkan diensten itu *(Pasal 37 UU Nomor 22 tahun 1948).*

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Dalam pasal 5 peraturan umum retribusi daerah disebutkan bahwa pengenaan retribusi daerah harus memenuhi azas-azas sebagai berikut[2] :

a. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang keluar maupun ke dalam daerah. Ketentuan ini maksudnya bahwa pungutan retribusi jangan sampai memperberat biaya barang yang mau masuk atau keluar dari daerah pungutan retribusi.
b. Dalam peraturan retribusi daerah tidak diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan agama.

3.2.2. Ketentuan Umum Retribusi Daerah

Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah yaitu meliputi :

[2] Agus Salim Nasution, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Penerbit P dan K, Universitas Terbuka, 1986, Halaman 26-28.

1. *Retribusi Daerah* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. *Wajib Retribusi* adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. *Badan* adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. *Jasa* adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. *Jasa Umum* adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. *Jasa Usaha* adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. *Perizinan Tertentu* adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. *Pembukuan* adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi.
10. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
11. *Penyidikan tindak pidana* dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil.

3.2.3. Jenis dan Penetapan Tarif Retribusi

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi Jasa Umum terdiri dari:
    a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
    b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
    c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
    d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
    e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
    f. Retribusi Pelayanan Pasar.
    g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
    h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
    i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
    j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :
    a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
    b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
    c. Retribusi Tempat Pelanggan.
    d. Retribusi Terminal.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

g. Retribusi Penyedotan Kakus.

h. Retribusi Rumah Potong Hewan.

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

   a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

   b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

   c. Retribusi Izin Gangguan.

   d. Retribusi Izin Trayek.

Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut[3] :

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan pemerintah daerah yang mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.
2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

3.2.4. Kinerja Pungutan Retribusi Daerah

Kinerja suatu daerah dapat pula diartikan sebagai kemampuan daerah dalam prestasi kerjanya. Dengan demikian, untuk menilai potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi yang selanjutnya disebut dengan Retribusi Daerah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dapat digunakan untuk menilai kecukupan, elastisitas, keadilan, tingkat tarif atas balas layanan,

[3] Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Sholihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. Halaman 284

kesepakatan fasilitas serta kemampuan administrasi didaerah tersebut. Kriteria kinerja pungutan Retribusi Daerah terdiri dari[4] :

1. Penilaian : Kecukupan dan Elastisitas

   Beberapa ketentuan terhadap retribusi bahwa elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, umumnya dipengaruhi oleh permintaan atau konsumsi terhadap pelayanan di dalam suatu pertumbuhan. Tetapi responnya juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan guna memenuhi pertumbuhan penduduk, khususnya di sektor-sektor besar di perkotaan, yang sering dikaitkan dengan penurunan skala ekonomi. Retribusi-retribusi cenderung tidak responsif kepada inflasi, namun hampir selalu didasarkan pada tarif per unit pelayanan yang tetap dan suatu wewenang mengambil keputusan untuk meningkatkan apabila terjadi biaya-biaya naik.

2. Penilaian : Keadilan

   Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan utama yaitu :

   1. Penilaian yang jatuh pada konsumsi, yang mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar daripada tingkat pendapatan.
   2. Subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas dibandingkan dengan masyarakat miskin.
   3. Karena biaya modal tidak disesuaikan dengan memperhatikan tingkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkatnya tersebut, banyak tarif didasarkan kepada suatu penurunan biaya unit.

[4] Kesit, Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta,2003, Halaman 53

3. Penilaian : Kemampuan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Ada beberapa masalah dan prosedur dalam praktek pemungutan retribusi yaitu masalah teknis yang meliputi :

1. masalah yang menyangkut keinginan politik untuk mengenakan sanksi, karena mencantumkan pembebanan sanksi adalah penting untuk mengefisienkan administrasi retribusi. Praktek mengefisienkan administrasi retribusi adalah memperkirakan pendapatan apa yang harus diterima dan kemudian menggunakan target penerimaan dari pemungutan.
2. Mensubkontrakkan retribusi kepada pemungut-pemungut komersial yang menawarkan penerimaan bulat secara kompetitif.
3. Meminta sekelompok lingkungan kecil untuk memungut retribusi dan membayarkannya bersama-sama kepada pihak pemberi pelayanan pelaksanaan retribusi daerah dan harus mempertimbangkan kemampuan administrasi daerah yang bersangkutan.

4. Penilaian : Kesepakatan Politis

Sebagian besar retribusi pada prinsipnya dapat diterima. Sepanjang mereka langsung dikaitkan kepada suatu pelayanan dan konsumsi tertentu termasuk elemen pemilihan dimana retribusi dapat dimengerti dan sesuai dengan keinginan yang layak. Namun demikian, tingkat atau besarnya retribusi lebih

sensitif secara politik. Sebagian besar retribusi harus dibayar dari pendapatan sendiri dan dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari oleh sebagian masyarakat. Kemungkinan lain, peningkatan retribusi karena peningkatan biaya mungkin dapat mengakibatkan penurunan konsumsi dan selama biaya modal dapat konstan, maka akan meningkatkan biaya per unit. Hubungan langsung antara konsumsi dan retribusi tidak selalu merupakan suatu keuntungan politis.

5. Penilaian : Retribusi oleh Pemerintah Daerah

   Sejauh ini, pembahasan belum difokuskan khususnya pada retribusi oleh Pemerintah Daerah, selama masih terdapat perbedaan yang kecilpun, dalam praktek dan pengalaman Pemerintah Pusat, BUMN dan Pemerintah Daerah. Banyak pelayanan yang bersifat pembayaran retribusi langsung yang sebenarnya disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kedekatan relatif antara badan-badan daerah dengan orang-orang yang berhak memilih akan menambah ketidakmauan mereka untuk menaikkan tarif.

Dari kriteria-kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan di dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan pemungutan dan kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan konsumen utama seluruhnya merupakan alasan yang kuat untuk membebankan biaya langsung pada konsumen. Retribusi dapat dibentuk untuk tujuan-tujuan yang masih ada unsur keinginan politis dan tidak ada alternatif fiskal yang sesuai. Akan tetapi banyak retribusi yang bersifat sensitif yang tinggi antara lain, penerimaan lebih rendah dari tingkat yang dibutuhkan untuk pengoperasian pelayanan secara efektif, khususnya pada saat inflasi, karena politik enggan untuk meningkatkan tarif

atau mengenakan sanksi. Hubungan antara konsumsi, biaya dan sifat langsung dari pembayaran akan mendorong keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang melibatkan lembaga-lembaga yang terkait, tetapi sensitivitas konsekuensinya dapat merusak kelangsungan hidup suatu pelayanan yang dapat dipungut retribusi.

Untuk menganalisis kinerja secara kuantitatif, dapat digunakan perhitungan-perhitungan dengan menganalisa data yang ada. Analisa kuantitatif yang dimaksud antara lain :

1. Kontribusi Retribusi

   Fungsi perhitungan kontribusi retribusi adalah untuk mengetahui peran atau nilai tambah retribusi itu sendiri terhadap sesuatu yang menjadi ukuran dimana didalamnya terdapat retribusi tersebut. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran/kontribusi retribusi. Perhitungan kontribusi ini menggunakan perbandingan antara dua data yang saling berhubungan. Misalnya ; kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah, atau terhadap PAD, dan sebagainya. Penilaian kontribusi ini berdasarkan perhitungan, semakin tinggi persentase kontribusi maka kinerjanya akan semakin baik pula. Nilai kontribusi disajikan dalam persen.

2. Tingkat Upaya Retribusi

   Upaya pemungutan retribusi adalah suatu hasil sistem pemungutan retribusi dibanding dengan kemampuan membayar retribusi yang bersangkutan, disini timbul masalah bagaimana mengukur kemampuan bayar retribusi secara obyektif. Pengukuran yang lazim digunakan adalah PDRB, dengan

anggaran pemerintah daerah yang mewakili wewenang mengenakan retribusi dan menetapkan tarif *(Fitriyah Nurlaili, 2004, 37).*

3. Efektifitas Retribusi

   Efektifitas adalah sebagai salah satu indikator kinerja bagi pelaku pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran/target. Efektifitas retribusi dihitung dengan berdasarkan data yang diperoleh dari konsumen perhitungan realisasi penerimaan retribusi. Ada beberapa tingkatan persentase efektifitas kinerja, yaitu *(Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000, 17)* :

   a. Lebih dari 100% digolongkan sangat efektif.
   b. 90%-100% digolongkan efektif.
   c. 80%-90% digolongkan cukup efektif.
   d. 60%-80% digolongkan kurang efektif.
   e. Kurang dari 60% digolongkan tidak efektif.

4. Efisiensi Retribusi

   Efisiensi retribusi menggambarkan bagaimana efisiensi dari biaya pemungutan dan realisasi penerimaan retribusi. Hasil dari perhitungan ini diperoleh dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil penerimaan retribusi. Besarnya biaya yang dikeluarkan atau biaya pemungutan berdasarkan jumlah realisasi retribusi. Hasil yang semakin efisien apabila nilai yang diperoleh menunjukkan persentase yang semakin kecil dan sebaliknya apabila semakin besar berarti semakin tidak efisien. Persentase efisiensi kinerja dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu *(Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000, 17)* :

a. Lebih dari 100% digolongkan tidak efisien.

b. 90%-100% digolongkan kurang efisien.

c. 80%-90% digolongkan cukup efisien.

d. 60%-80% digolongkan efisien.

e. Kurang dari 60% digolongkan sangat efisien.

5. Elastisitas Retribusi

Fungsi perhitungan elastisitas retribusi adalah untuk mengetahui elastisitas perubahan retribusi yang mengikuti pengaruh terhadap adanya perubahan PDRB. Disini yang terlihat adalah kepekaan perubahan retribusi yang disebabkan perubahan PDRB, maka yang dilihat dan akan diukur adalah elastisitas retribusi sehingga dari hasil perhitungan elastisitasnya lebih besar (>1) berarti setiap perubahan dalam PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan dalam retribusi lebih besar dari 1 persen dan dapat digolongkan elastis. Tetapi bila yang terjadi adalah sebaliknya atau kurang (<1) maka yang terjadi adalah retribusi pasar tidak elastis.

6. Potensi Retribusi

Fungsi perhitungan dari potensi retribusi adalah untuk mengetahui apakah target pemungutan retribusi telah dilaksanakan dengan maksimal dan bisa malampaui dari target. Potensi retribusi dipengaruhi oleh pengguna jasa, luas lahan, dan tarif masing-masing retribusi. Potensi retribusi harus terus ditingkatkan untuk mendapatkan target yang diinginkan.

3.3. Pengertian Pasar

Pengertian pasar dalam arti sederhana adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau bertemunya antara permintaan dan penawaran *(Lincolin Arsyad, 1991, 23 – 24).*

Adapun definisi pasar adalah :

a. Pasar adalah segenap kelompok pelataran yang sebagian beratap dan sebagian terbuka tanpa atap yang ditunjuk dengan keputusan DPRD, dimana pedagang-pedagang berkumpul menjual barang dagangannya.
b. Pasar adalah tempat bangunan atau lapangan tertentu yang dipergunakan untuk usaha mempertunjukkan, memperjualbelikan, menyimpan barang dagangan atau menjalankan usaha perdagangan atau memberikan atau menawarkan jasa sebagai mata pencaharian.

Kategori fungsi pasar yang didasarkan pada besarnya pasar yang ditentukan oleh tingkat keramaian, besarnya retribusi, jangkauan pelayanan, besarnya fisik bangunan, kelengkapan fasilitas, keragaman komoditas, jumlah hari pasar dan sejenisnya dapat disebutkan dalam lima golongan kelas pasar (menurut UU No. 3 Tahun 1992, 4), yaitu :

1. Pasar kelas 1 (pasar regional)

   Pasar dengan komponen bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dengan baik dan memberikan pelayanan antar kota dan atau daerah belakang/pendukung dengan luas minimal 35.000 m^2 yang berlokasi di pinggiran kota atau perkotaan sekitar jalan arteri sekunder atau kolektor primer.

2. Pasar kelas 2 (pasar kota)

   Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dengan baik dan berfungsi memberikan pelayanan dalam kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 13.500 m^2 yang berlokasi di pusat kota atau perkotaan di kawasan perdagangan/jasa.

3. Pasar kelas 3 (pasar wilayah)

   Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dan berfungsi memberikan pelayanan bagian wilayah kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 4.000 m^2 yang berlokasi di wilayah bagian kota dalam kawasan perdagangan/jasa.

4. Pasar kelas 4 (pasar lingkungan)

   Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang terutama di dalam bangunan berfungsi memberikan pelayanan di tingkat lingkungan dengan luas lahan minimal 500 m^2 yang berlokasi di lingkungan.

5. Pasar kelas 5 (pasar warungan)

   Pasar tanpa komponen bangunan, sistem arus barang berfungsi memberikan pelayanan di tingkat lokal yaitu perumahan atau desa dengan luas lahan kurang dari 500 m^2 dan lokasinya tersebar.

3.4. Retribusi Pasar

3.4.1. Pengertian Retribusi Pasar

Reribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran tetap maupun tidak tetap di pasar. Retribusi pasar

untuk setiap daerah pemungutan, ketentuan dan peraturannya dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing.

Retribusi pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut[5] :

1. Menurut sifat prestasi Negara, retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan milik pemerintah. Pedagang membayar retribusi kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan.
2. Menurut cara penentuan jumlah pungutan, retribusi pasar merupakan retribusi variabel, jumlah pungutan tergantung dari dari kelas pasar, golongan dagangan, luas toko, petak atau gudang atau los yang digunakan serta tempat berdagang.
3. Menurut cara pembayarannya, retribusi pasar termasuk termasuk retribusi kontan, pemakaian jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran tiap hari, sedangkan jasa kios melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem harian atau mingguan.

3.4.2. Obyek Retribusi Pasar

Obyek retribusi pasar terdiri dari :

1. Komponen utama, terdiri atas :
   a. Lantai dasaran pada lahan.
   b. Lantai dasaran pada toko/kios.
   c. Lantai dasaran pada los.
   d. Lantai dasaran luar los.

[5] Adolf Wagner C. Goedhart, (Terjemahan Ratmoko, SH), *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit Jambatan. 1973. Halaman 97

e. Lantai dasaran luar pasar.

f. Gudang.

g. Kandang hewan.

2. Komponen Penunjang, terdiri atas :

a. Kamar mandi/WC.

b. Tempat parkir.

c. Tempat bongkar muat.

d. Kerekan barang.

3. Komponen pendukung seperti tempat penitipan anak dan tempat pelayanan kesehatan.

Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, kios, los dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

3.4.3. Subyek Retribusi Pasar

Subyek retribusi pasar adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, kios, los dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

3.4.4. Penagihan Retribusi Pasar

Penagihan retribusi pasar ini diatur dalam peraturan retribusi daerah, hal ini dimaksudkan agar para pembayar retribusi menyadari akan hak dan kewajibannya. Agar penarikan tagihan retribusi pasar dapat tercapai sesuai

target maka baik pihak penagih atau pihak tertagih harus bisa melaksanakan hak serta kewajibannya dengan benar. Menurut *Andik Fajar Tjahyono, 1996, 30* penagihan retribusi meliputi :

a. Yang kena retribusi disodorkan daftar isian agar pengenaan retribusi sesuai dengan jumlah yang mereka memang harus bayarkan
b. Yang kena retribusi harus memenuhi kewajibannya bila sesuai dengan yang mereka harus bayarkan

Apabila hal tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dapat diadakan ancaman hukuman dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah. Sebelum ancaman tersebut dijalankan terlebih dahulu diadakan pendahuluan yang meliputi :

a. Peringatan.
b. Teguran.
c. Denda atau tambahan pembayaran.
d. Penyitaan.

Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan harus dipatuhi pada waktu memungut retribusi, yaitu[6] :

1. Bahwa pada umumnya jasa yang dibayar dengan retribusi tersebut bermanfaat baik individu maupun masyarakat. Apabila keuntungan individu itu relatif lebih besar maka dipandang sudut pembagian beban adalah adil. Sebaliknya apabila keuntungan relatif besar bagi masyarakat maka retribusi harus ditentukan relatif lebih rendah dan sebagian besar ongkos penyediaan negara yang bersangkutan harus dibiayai oleh perpajakan.

2. Pemungutan retribusi dibenarkan selama kerugian yang ditimbulkan oleh pembatasan penggunaan jasa negara itu lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkan oleh kenaikan pajak. Apabila jasa itu lebih bermanfaat bagi masyarakat maka lebih besar juga kegunaan penurunan retribusi.

3.4.5. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar

Dasar hukum dalam mengadakan pemungutan retribusi sebagai sumber keuangan daerah, berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi pasar dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah pemungut, peraturan daerah tersebut dibuat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Oleh karena itu tiap daerah pemungutan terdapat peraturan yang

[6] Adolf Wagner C. Goedhart, (Terjemahan Ratmoko, SH), *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit Jambatan, 1973, Halaman 97

mengatur pemungutan retribusi pasar. Landasan hukum yang berlaku di Kota Surakarta untuk pemungutan retribusi pasar didasarkan pada :

a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.
b. Surat Keputusan Walikotamadya Dati II Surakarta Nomor 511.3/001/1/1999 tentang Penetapan Taksiran Nilai Tempat Dasaran Kios dan Los Pasar.
c. Surat Keputusan Walikotamadya Dati II Surakarta Nomor 974/132 – E/1/1998 tentang Penetapan Pasar-pasar yang Dikenakan Tambahan Pungutan Retribusi Pasar atas Penyimpanan Dagangan di dalam Pasar pada Waktu Malam Hari.

3.5. Hubungan Retribusi Pasar dengan PAD

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan untuk mewujudkan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan baik rutin maupun pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 6, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset daerah dan jasa giro.

Retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah, yang mana kesemuanya terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah dan akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Retribusi pasar sebagai salah sau penyumbang pendapatan daerah sangat berpotensi untuk ditingkatkan mengingat peran retribusi pasar ini dalam peningkatan PAD. Retribusi pasar bisa terus diupayakan dan dimaksimalkan pemungutannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan. Bila pembangunan bisa berjalan dengan lancar maka kesejahteraan masyarakat juga diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh retribusi pasar terhadap PAD maka upaya peningkatan retribusi pasar untuk menambah keuangan daerah harus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

4.1. Keadaan Geografis

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Propinsi Jawa Tengah, terletak di tengah antara kota atau kabupaten di Karesidenan Surakarta. Kota Surakarta terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari, Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, dan Jebres.

Secara administratif, Kota Surakarta berbatasan dengan beberapa kabupaten di wilayah Kota Surakarta. Batas-batas wilayah Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Batas Wilayah Kota Surakarta

Sebelah/Bagian	Perbatasan
1. Utara	Kabupaten Boyolali
2. Timur	Kabupaten Karanganyar
3. Barat	Kabupaten Sukoharjo
4. Selatan	Kabupaten Sukoharjo

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

Secara Geografis maupun topografis, wilayah Kota Surakarta memiliki wilayah dengan posisi yang menguntungkan. Secara geografis wilayah Kota Surakarta terletak pada posisi antara 110^0 45^1 15^{11} sampai 110^0 45^1 35^{11} Bujur Timur dan antara 7^0 36^1 sampai 7^0 56^1 Lintang Selatan.

Secara topografis dan fisiografis wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan "Kota Solo" secara umum keadaannya datar, hanya bagian utara dan timur agak bergelombang dengan ketinggian kurang lebih 92 meter di atas permukaan air laut. Jenis tanah sebagian tanah liat berpasir termasuk Regosol kelabu dan Alluvial, di wilayah bagian utara tanah liat Grumosol serta wilayah bagian timur laut tanah Litosol Mediteran. Sehingga Kota Surakarta merupakan merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan sektor perdagangan dan industri.

4.2. Dasar Hukum

Sebutan atau Kota Surakarta baru dimulai adanya Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965 an ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan bila kita lihat sejak lahir mengalami tujuh kali periode atau perubahan sebutan nama tersebut, yaitu :

a. Periode Pemerintahan Daerah Kota Surakarta

   Dimulai pada tanggal 16 Juni 1946 (Hari Jadi) sampai dengan berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 1947 tanggal 5 Juni 1947.

b. Periode Pemerintahan Daerah Haminte Kota Surakarta

   Dimulai dengan berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 1947 sampai dengan berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948.

c. Periode Pemerintahan Kota Besar Surakarta

Dimulai dengan berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 sampai dengan berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957.

d. Periode Pemerintahan Daerah Kotapraja Surakarta

Dimulai dengan berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1957 sampai dengan berlakunya Undang-undang No.18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965.

e. Periode Pemerintah Kotamadia Surakarta

Dimulai dengan berlakunya Undang-undang No.18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965 sampai dengan berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1974.

f. Periode Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Dimulai dengan berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1974 sampai dengan berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tanggal 4 Mei 1999.

g. Periode Pemerintah Kota Surakarta

Dimulai dengan berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan sekarang.

4.3. Luas Wilayah

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kota Surakarta dan BPN, luas wilayah Kota Surakarta adalah 44,04 km^2 yang terbagi dalam 5 kecamatan. Luas Kecamatan terluas ditempati oleh Kecamatan Banjarsari dengan luas mencapai 33,63 persen dari luas Kota Surakarta. Seperti halnya dengan kota-kota besar

lainnya luas lahan terluas terutama merupakan lahan perumahan atau pemukiman. Lahan yang digunakan untuk pemukiman mencapai 61 persen dari luas tanah Kota Surakarta. Sebagai daerah perdagangan, industri, dan jasa maka luas lahan untuk kegiatan ekonomi pada sektor tersebut jauh lebih luas dibandingkan dengan kegiatan di bidang pertanian. Bahkan di Kecamatan Serengan sudah tidak ada lagi lahan pertanian. Sebesar 18 persen dari seluruh luas tanah di Kota Surakarta dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, sebagai usaha di sektor non pertanian.

Luas lahan pertanian terus menurun dan pada tahun 2003 penurunan luas lahan sawah mencapai 1,37 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu tanah yang dimanfaatkan untuk taman kota masih sangat sedikit, yaitu hanya sebesar 0,71 persen.

Tabel 4.2

Luas Wilayah Kota Surakarta

Dirinci menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Persentase Luas
Laweyan	8,63	19,59
Serengan	3,19	7,24
Pasar Kliwon	4,82	10,94
Jebres	12,58	28,56
Banjarsari	14,81	33,67
Jumlah	**44,04**	**100,00**

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

4.4. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980, 1990, dan tahun 2000 juga berdasar hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1995 serta hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk berkelanjutan (P4B) pada tahun 2003, maka terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Surakarta cenderung mengalami penurunan. Terlebih jika kita bandingkan penduduk pada tahun 1995 hasil SUPAS dengan penduduk tahun 2000 hasil Sensus Penduduk terlihat justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,02 persen. Hal ini terjadi karena semakin padatnya Kota Surakarta dan semakin berkembangnya wilayah sekitar Kota Surakarta yang semakin diminati sebagai lahan untuk tempat tinggal maupun usaha.

Tabel 4.3

Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta

Tahun 1994 - 2003

Tahun	Jumlah Penduduk	% Pertumbuhan
1994	531.377	0,68
1995	533.628	0,42
1996	536.628	0,45
1997	539.387	0,63
1998	542.832	0,64
1999	546.469	0,67
2000	550.251	0,69
2001	553.580	0,60
2002	554.630	0,19
2003	555.395	0,14

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

Hasil P4B Kota Surakarta pada tahun 2003 menunjukkan bahwa penduduk Kota Surakarta tercatat sebesar 555.395 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 95,27, artinya bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Sementara itu pertumbuhan penduduk tahun 2003 dibandingkan dengan penduduk tahun 2000 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 persen. Pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penduduk Kota Surakarta pada tahun 1990 yang tercatat sebesar 0,73 persen.

2. Penyebaran Penduduk

Berdasarkan hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk berkelanjutan (P4B), maka tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2003 mencapai 11.291 jiwa per km^2. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta semakin berkembang menjadi kota besar sehingga lahan untuk tempat tinggal semakin menyempit.

Kecamatan Pasar Kliwon merupakan kecamatan yang paling padat dengan tingkat kepadatan mencapai 15.837 jiwa per km^2. Kondisi ini tidak terlepas pada letak Kecamatan Pasar Kliwon yang berada di tengah Kota Surakarta. Daerah di sekitar Kraton Surakarta merupakan daerah yang sangat padat dengan pemukiman penduduk.

Sedangkan pada kecamatan yang lain seperti Kecamatan Laweyan, Kecamatan Jebres dan Kecamtan Banjarsari tingkat kepadatannya hampir seimbang dengan tingkat kepadatan pada kisaran angka 10.000 jiwa per km^2.

Tabel 4.4

Banyaknya Desa/Kelurahan, KK, dan Penduduk Per Kecamatan Di Kota Surakarta Tahun 2003

Kecamatan	Kelurahan	KK	Penduduk
Laweyan	11	22.864	108.009
Serengan	7	15.020	61.924
Pasar Kliwon	9	19.191	85.923
Jebres	11	31.870	137.449
Banjarsari	13	40.435	162.090
Jumlah	**51**	**129.380**	**555.395**

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terluas dengan jumlah penduduk mencapai 154.393 jiwa pada tahun 2003 (hasil P4B), namun tingkat kepadatannnya masih di bawah kecamatan Serengan yang merupakan kecamatan yang paling kecil wilayah administrasinya. Sebagai kecamatan dengan luas wilayah paling kecil, Kecamatan Serengan tercatat mempunyai tingkat kepadatan sebesar 14.660 jiwa per km^2.

3. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dari tahun 1994 sampai dengan 2003 jumlah penduduk Kota Surakarta terus mengalami kenaikan. Dari 10 tahun tersebut, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar dibanding dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Pada tahun 2003 jumlah penduduk Kota Surakarta yang berjenis kelamin perempuan adalah 281.879 jiwa lebih besar dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yang hanya 273.516 jiwa, bahkan di seluruh kecamatan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan mendominasi lebih banyak.

Tabel 4.5

Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin

Di Kota Surakarta Tahun 1994 – 2003

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1994	259.191	272.186	531.377
1995	260.761	272.687	533.628
1996	262.044	273.961	536.005
1997	263.943	275.444	539.387
1998	265.941	276.891	542.832
1999	268.175	278.294	546.469
2000	270.104	280.147	550.251
2001	271.891	281.689	553.580
2002	272.315	282.315	554.630
2003	273.516	281.879	555.395

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

Tabel 4.6

Banyaknya Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin

Per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2003

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Laweyan	53.327	54.682	108.009
Serengan	30.375	31.549	61.924
Pasar Kliwon	42.044	43.879	85.923
Jebres	67.750	69.699	137.449
Banjarsari	80.018	82.072	162.090
Jumlah	**273.516**	**281.879**	**555.395**

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

4. Mutasi Penduduk

Tabel 4.7

Mutasi Penduduk menurut Kecamatan

Di Kota Surakarta Tahun 2003

Kecamatan	Mutasi Penduduk				Pertumbuhan Penduduk
	Lahir	Datang	Pergi	Mati	
Laweyan	986	1.213	1.088	724	387
Serengan	618	1.089	1.335	393	-21
Pasar Kliwon	977	1.516	1.525	638	330
Jebres	886	2.143	1.745	597	687
Banjarsari	1.327	2.453	3.160	1.238	-618
Jumlah	**4.794**	**8.414**	**8.853**	**3.590**	**765**

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

4.5. Pemerintahan

Wilayah Kota Surakarta terbagi dalam 5 kecamatan, 51 kelurahan, 592 RW dan 2.645 RT. Kondisi administrasi ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yang berarti belum ada perubahan wilayah administrasi. Dengan wilayah kecamatan yang terluas, yaitu Kecamatan Banjarsari yang mempunyai jumlah RT terbanyak, yaitu 832 RT.

Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta paada tahun 2003 tercatat sebanyak 8.744 orang, dengan rincian 4.879 laki-laki dan 3.865 perempuan. Jumlah PNS sejumlah itu tersebar di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, yaitu 4 (empat) Bagian; 15 (lima belas) Dinas; 4 (empat) Badan; 8 (delapan) Kantor, 5 (lima) Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Kelurahan.

Di lihat dari tingkat pendidikan, PNS di Surakarta Sebagian sudah berpendidikan tinggi (setingkat sarjana S1) sebanyak 34,49 persen. Hal ini tentu saja berkaitan erat dngan rekruitmen pegawai ditingkat Pemerintah Kota Surakarta yang sudah mensyaratkan pendidikan tinggi. Selain itu juga tuntutan bagi pegawai untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikti pendidikan yang lebih tinggi.

Pada bagian-bagian tertentu masih terdapat PNS dengan tingkat pendidikan SD dan SLTP. Sebagian besar dijumpai pada dinas Pendidikan dan Olahraga, terutama untuk status karyawan sebagai penjaga malam di sekolah-sekolah.

4.6. Tenaga Kerja

Berdasarkan piramida penduduk yang disusun dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2003 terlihat bahwa penduduk terbesar terjadi pada kelompok usia 20-24 tahun, yang kemudian menurun cukup tajam pada kelompok usia di atasnya (usia 25-29 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi migrasi keluar yang cukup signifikan pada kelompok usia 25-29 tahun. Kemungkinan yang terjadi adalah mereka yang membutuhkan pekerjaan mulai mencari kerja di luar kota, karena kesempatan kerja di Kota Surakarta ukup terbatas. Dan pada kelompok usia 25-29 tahun rasio jenis kelamin tercatat sebesar 104 artinya bahwa penduduk laki-laki justru lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi kelompok usia sebelumnya (20-24 tahun) yang tercatat rasio jenis kelamin sebesar 91.

Jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2003 tercatat sebesar 54,63 persen dibandingkan dengan penduduk usia 10 tahun ke atas. Dari angkatan kerja yang ada tersebut 91,9 persen diantaranya sudah bekerja atau mempunyai usaha.

Penduduk Kota Surakarta yang bekerja lebih banyak terserap pada sektor perdagangan, jasa dan industri. Menurut hasil SUSENAS 2003 penduduk yang bekerja pada ketiga sektor tersebut, masing-masing sebesar 39,62 persen pada sektor perdagangan, 24,93 persen bekerja di sektor jasa dan 21,91 persen terserap di sektor industri.

Rasio penduduk laki-laki yang bekerja terhadap penduduk perempuan yang bekerja pada tahun 2003 tercatat sebesar 154, artinya bahwa setiap 100

penduduk perempuan yang bekerja terdapat 154 penduduk laki–laki yang bekerja. Ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan di kota Surakarta tidak sekedar sebagai rumah tangga, tetapi sudah banyak yang bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penduduk perempuan yang bekerja lebih banyak berstatus sebagai buruh/ karyawan atau pegawai.

4.7. Keadaan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada periode tertentu lebih besar dari periode sebelumnya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Yang perlu diperhatikan dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan angka-angka PDRB dalam harga konstan, hal ini dimaksudkan agar pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan atas dasar harga berlaku telah dihilangkan. Disamping itu, angka pertumbuhan pendapatan pada harga konstan sekaligus mencerminkan ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum keadaan ekonomi Kota Surakarta dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik, yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pula. Nilai PDRB Kota Surakarta atas dasar harga berlaku tahun 2003 tercatat sebesar 4,17 trilyun rupiah. PDRB Atas harga berlaku

ini dihitung dengan menggunakan harga produsen yang berlaku pada tahun 2003. Besarnya PDRB tersebut berarti juga terjadi pertumbuhan sebesar 12,80 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini juga berarti bahwa pertumbuhan PDRB Harga Berlaku pada tahun 2003 lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2002 yang tercatat sebesar 11,49 persen.

Dalam distribusi persentase PDRB Atas Harga Berlaku tahun 2003 masih seperti pada tahun 2002, tidak terjadi perbedaan pada komposisi antar sektor atau lapangan usaha. Industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB, yaitu sebesar 29,14 persen disusul dengan sektor perdagangan dengan distribusi sebesar 23,07 persen. Besarnya distribusi pada kedua sektor ini juga relatif sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara sektor penggalian masih merupakan sektor yang paling kecil mempunyai andil dalam PDRB Atas Harga Berlaku.

Perkembangan ekonomi suatu daerah diukur dengan perkembangan PDRB Atas Harga Konstan, karena pada harga konstan dihitung dengan harga pada tahun 1993. Sehingga PDRB Harga Konstan mencerminkan pertumbuhan produksi sektor-sektor secara nyata. PDRB Harga Konstan Kota Surakarta tahun 2003 tercatat sebesar 1,52 trilyun rupiah, atau meningkat sebesar 6,46 persen. Peningkatan PDRB Harga Konstan dapat juga diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2003 sebesar 6,46 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding dengan tahun 2002 yang tercatat sebesar 5,40 persen. Sektor-sektor andalan di Kota Surakarta menunjukkan pertumbuhan yang cukup

menggembirakan, seperti sektor industri tumbuh sebesar 6,63 persen, perdagangan sebesar 6,57 persen dan jasa sebesar 7,32 persen.

Sektor industri masih merupakan sektor terbesar dalam memberikan andil dalam perekonomian di Kota Surakarta. Pada tahun 2003 andil sektor industri tercatat sebesar 24,94 persen, disusul dengan sektor perdagangan sebesar 22,14 persen dan sektor jasa sebesar 14,97 persen. Distribusi PDRB Atas harga konstan tahun 2003 relatif sama dengan tahun 2002, hal ini berarti bahwa tidak terjadi perubahan pada pola perekonomian di Kota Surakarta pada tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002. Sementara sektor angkutan dan komunikasi masih sangat terbuka untuk terus dikembangkan mengingat perkembangan teknologi komunikasi juga sudah merambah di Kota Surakarta.

Tabel 4.8

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993

Kota Surakarta Tahun 1994 – 2003 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1994	1995	1996	1997	1998
Pertanian	26.056,9946	24.141,9357	18.913,12	18.477,22	18.645,31
Pertambangan dan Penggalian	661,0225	716,7080	848,41	870,69	780,33
Industri Pengolahan	175.409,4477	190.003,5137	333.690,23	345.594,90	310.318,03
Listrik, Gas, dan Air Bersih	23.826,0109	25.601,0487	23.450,67	24.405,37	24.262,51
Bangunan	154.535,8200	167.493,7359	179.644,77	186.828,59	168.023,90
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	233.133,0677	255.234,403	310.776,01	327.422,20	278.598,90
Pengangkutan dan Komunikasi	92.475,6806	109.369,7247	154.414,71	160.767,08	163.187,86
Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	199.359,9610	217.721,0100	168.573,67	173.060,69	99.969,24
Jasa-Jasa	167.833,6784	175.923,2616	184.247,42	195.135,63	169.232,36
PDRB	**1.073.359,778**	**1.166.205,3980**	**1.374.559,01**	**1.432.562,37**	**1.233.018,44**

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

Sambungan Tabel 4.8

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993

Kota Surakarta Tahun 1994 – 2003 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	19.106,32	19.583,98	19.589,58	21.180,94	22.864,69
Pertambangan dan Penggalian	782,88	797,75	806,52	867,94	906,58
Industri Pengolahan	313.345,24	326.192,39	338.635,36	355.007,84	378.537,14
Listrik, Gas, dan Air Bersih	24.837,25	25.954,93	27.066,30	28.238,19	29.932,14
Bangunan	169.032,04	173.257,84	177.242,77	186.005,99	199.634,26
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	280.539,80	291.792,12	302.449,10	315.334,69	336.037,97
Pengangkutan dan Komunikasi	166.545,87	173.041,15	179.683,77	188.090,65	198.953,46
Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	101.614,92	108.193,88	114.816,05	119.562,81	123.968,37
Jasa-Jasa	175.003,09	183.901,88	193.584,19	211.672,12	227.173,44
PDRB	**1.250.807,41**	**1.302.715,92**	**1.353.882,64**	**1.425.961,17**	**1.518.008,05**

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

Tabel 4.9

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Surakarta Tahun 1994 – 2003 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1994	1995	1996	1997	1998
Pertanian	30.786,0284	28.908,6514	23.958,75	27.029,26	48.643,39
Pertambangan dan Penggalian	741,6336	853,3978	1.029,55	1.194,57	1.312,98
Industri Pengolahan	188.944,5324	220.913,9472	396.778,04	430.787,95	732.447,65
Listrik, Gas, dan Air Bersih	28.248,2640	36.002,4125	27.478,42	30.555,80	41.977,09
Bangunan	163.052,1432	186.792,5352	208.708,01	221.969,83	231.194,60
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	242.644,1809	285.280,7808	360.335,87	394.446,25	462.069,52
Angkutan dan Komunikasi	105.188,3070	141.899,0261	175.330,63	189.388,41	238.910,73
Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	213.014,3266	249.972,3122	208.157,47	219.79269	207.474,72
Jasa-Jasa	170.303,0645	181.543,0667	195.406,30	210.578,10	256.317,52
PDRB	**1.143.122,481**	**1.331.166,1290**	**1.597.183,04**	**1.725.142,45**	**2.220.348,20**

Sumber : BPS Kota Surakarta tahun 2003

Sambungan Tabel 4.9

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Surakarta Tahun 1994 – 2003 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	51.341,81	55.186,75	60.270,42	61.407,66	66.263,76
Pertambangan dan Penggalian	1.423,41	1.535,86	1.670,10	1.817,47	1.994,56
Industri Pengolahan	770.898,07	886.532,78	985.606,12	1.097.383,39	1.217.411,43
Listrik, Gas, dan Air Bersih	44.989,07	49.937,86	54.338,04	62.234,78	78.938,63
Bangunan	250.429,34	292.338,48	320.812,25	386.948,60	439.852,16
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	600.208,61	740.332,28	828.120,78	867.825,74	963.894,81
Angkutan dan Komunikasi	273.358,79	306.161,84	342.569,27	392.480,87	458.968,13
Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	249.159,73	292.383,68	341.899,23	403.629,25	456.012,62
Jasa-Jasa	303.366,20	340.719,38	386.399,42	429.782,57	494.154,65
PDRB	**2.545.175,03**	**2.965.128,91**	**3.321.685,63**	**3.703.510,33**	**4.177.490,75**

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

Tabel 4.10

PDRB Atas Dasar Harga berlaku, PDRB Perkapita,

dan Pertumbuhan Ekonomi

Kota Surakarta Tahun 1994 – 2003

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	PDRB Perkapita (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1994	1.143.122,48	2.157.718,31	-
1995	1.331.166,12	2.494.558,25	15,61
1996	1.597.183,04	2.988.456,00	19,80
1997	1.725.142,45	3.205.834,00	10,93
1998	2.220.348,20	4.106.858,00	28,10
1999	2.545.175,03	4.672.781,00	13,78
2000	2.965.128,91	5.406.793,00	15,71
2001	3.321.685,63	6.780.597,98	25,41
2002	3.703.510,33	7.567.667,10	11,61
2003	4.177.491,75	8.543.484,95	12,90

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa peranan sektor industri pengolahan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 mendominasi pada tingkat atas, kemudian baru diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, sektor angkutan dan komunikasi, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pertanian. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil adalah sektor penggalian dan pertambangan.

4.8. Perindustrian

Perusahaan Industri Besar sedang di Kota Surakarta tercatat sejumlah 103 perusahaan yang menyerap lebih dari 12 ribu tenaga kerja. Industri besar dan sedang yang dimaksud adalah dengan mengacu pada konsep tenaga kerja. Industri besar adalah industri pengolahan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih, sedangkan industri sedang dengan tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.

Industri besar atau sedang di kota Surakarta didominasi oleh industri makanan atau minuman dan industri tekstil. Kedua jenis industri ini mampu menampung lebih dari 6000 tenaga kerja. Hal yang menarik adalah tenaga produksi di perusahaan industri di kota surakarta ternyata lebih banyak perempuan. Dari jumlah tenaga kerja produksi yang ada, jumlah tenaga kerja perempuan sebesar 58,7 persen.

Tabel 4.11

Banyaknya Perusahaan Industri Pengolahan Besar / Sedang dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri di Kota Surakarta tahun 2003

Kelompok Industri	Jumlah perusahaan	Tenaga Kerja
Makanan dan Minuman	23	1.172
Pengolahan Tembakau	3	1.455
Tekstil	21	5.851
Pakaian Jadi	17	574
Kulit dan Barang dari Kulit	3	186
Kertas dan Barang dari Kertas	3	97
Penerbitan, percetakan dan Reproduksi media rekaman	12	1770
Kimia dan Barang dari Kimia	3	133
Karet dan barang dari Karet	13	1.295
Mesin dan perlengkapannya	1	40
Furniture dan pengolahan lainnya	4	99
Jumlah	**103**	**12.593**

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

Tabel 4.12

Banyaknya Kelompok Usaha dan Jumlah Unit Usaha

di Kota Surakarta Tahun 2003

Cabang Industri/Bidang Usaha	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit Usaha
A. Industri Hasil Pertanian Dan Kehutanan		
1. Tahu	2	34
2. Tempe	5	51
3. Krupuk	1	27
4. Karak	2	12
5. Kue Basah	2	18
6. Kusen	2	13
7. Mebel	4	108
8. Sangkar Burung	2	33
B. Industri Logam Mesin Kimia/Aneka		
1. Gitar	1	32
2. Batik	4	49
3. Pakaian Jadi	11	218
4. Kain Perca	1	15
5. Cindera mata	1	15
6. Sepatu	1	40
7. Dop	1	20
8. Shutle Cocks	2	65
9. Letter	1	30
10.Ubin Semen	1	12
11.Dandang/Kompor	1	10
12.Timbangan	1	4
13.Las	1	15
Jumlah	**47**	**821**

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

Tabel 4.13

Banyaknya Industri Besar, Sedang dan Kecil

Menurut Kelompok Usaha di Kota Surakarta Tahun 2003

Cabang Industri/Bidang Usaha	Perusahaan	Tenaga Kerja
INDUSTRI BESAR/MENENGAH		
1. Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK)	-	-
2. Industri Logam Mesin Kimia/ANEKA		
- Besar	3	1.172
- Menengah	74	13.350
INDUSTRI KECIL		
1. Formal	96	21.531
2. Non Formal	3.844	11.153
Jumlah	**4.837**	**47.206**

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2003

4.9. Dinas Pendapatan Daerah

1. Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan kabupaten disusun berdasarkan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh kabupaten dan kewenangan lainnya atas dasar kebutuhan, kemampuan dan sumber daya yang ada serta menjadi urusan rumah tangga daerah. Urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan antara lain : perencanaan program, perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan, penagihan dan pelaporan, pengelolaan sumber-sumber lain, kerja sama dengan pihak ketiga serta pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar urusan rumah tangga daerah tidak terjadi duplikasi penanganan tugas dan fungsi serta perangkat daerah memiliki daya dukung yang optimal terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pendapatan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah dan untuk melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan tersebut, maka dibuat peraturan daerah tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah. Dinas Pendapatan daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah di bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta mempunyai tugas utama sebagai pelaksana pemungutan pendapatan daerah yang berada di wilayah Kota Surakarta.

1. Dasar Hukum

   Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

2. Kedudukan

   Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

3. Fungsi

   a. Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda).

   b. Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga serta dokumen dan perpustakaan.

   c. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja.

   d. Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan.

   e. Menyiapkan dan menyusun Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA) atas dasar anggaran yang telah ditetapkan.

   f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas guna evaluasi dan pelaporan.

g. Mengolah, menganalisa dan menyajikan data untuk mengembangkan kegiatan Dinas.

4. Susunan Organisasi Pendapatan Asli Daerah

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan

2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

d. Sub Dinas Pendaftaran Pendataan dan Dokumentasi, terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

2. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

e. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari :

1. Seksi Perhitungan

2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

3. Seksi Angsuran

f. Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari :

1. Seksi Pembukuan Penerimaan

2. Seksi Pembukuan Persediaan

g. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari :

1. Seksi Penagihan dan Keberatan
2. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

h. Cabang Dinas, terdiri dari :

1. Cabang Dinas Pendapatan Daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari
2. Cabang Dinas Pendapatan Daerah II meliputi Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon
3. Cabang Dinas Pendapatan Daerah III meliputi Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

4.10. Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Pemerintah Daerah Kota Surakarta perlu mengenal lebih dekat struktur PAD yang dimiliki agar dapat mengetahui sumber-sumber PAD yang dimiliki daerahnya, sehingga pemerintah daerah Kota Surakarta dapat mengetahui sumber PAD mana yang potensial dan mana yang kurang potensial. Setelah mengetahuinya, pemerintah daerah diharapkan dapat memfokuskan perhatiannya pada sumber PAD yang potensial dan berupaya menggali lebih lanjut sumber tersebut, sedangkan PAD yang kurang potensial, pemerintah daerah dapat melakukan koreksi dan mengkaji lebih lanjut mengapa penerimaan pada pos atau sumber tersebut rendah, apakah karena obyeknya yang terbatas atau adanya kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya penerimaan PAD teresbut.

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dari tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2003 didominasi oleh penerimaan dari retribusi daerah dan Pajak daerah. Selama periode tersebut Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta cenderung mengalami peningkatan. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Kota Surakarta Tahun Anggaran 1994/1995 – 2003

Tahun Anggaran	Penerimaan PAD	Pertumbuhan (%)
1994/1995	12.976.839.669	-
1995/1996	15.596.706.010	20,19
1996/1997	17.166.180.584	10,06
1997/1998	18.934.341.860	16,13
1998/1999	17.499.535.724	-12,21
1999/2000	19.888.069.111	13,65
2000	21.913.828.479	10,19
2001	35.640.533.633	62,64
2002	44.938.084.099	26,09
2003	54.815.684.238	21,98

Sumber : Dipenda Kota Surakarta

1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta yang memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan. Retribusi Daerah menduduki peringkat pertama sebagai penunjang pendapatan asli daerah.

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2001 dengan pertumbuhan sebesar 68,41 persen. Sedangkan pada tahun 1998/1999 merupakan laju pertumbuhan yang rendah, karena mengalami penurunan sebesar -21,96 persen.

Tabel 4.15

Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Surakarta

Tahun Anggaran 1994/1995 - 2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Daerah	Pertumbuhan (%)
1994/1995	7.731.267.166	-
1995/1996	8.982.760.738	16,19
1996/1997	9.672.311.720	7,68
1997/1998	10.351.221.990	7,02
1998/1999	8.078.604.279	-21,96
1999/2000	9.558.255.723	18,32
2000	9.929.961.832	3,89
2001	16.723.167.571	68,41
2002	20.039.596.865	19,83
2003	26.678.119.563	33,13

Sumber : Dipenda Kota Surakarta

2. Pajak Daerah

Pajak daerah sebagaimana retribusi daerah juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta yang cukup penting. Sebagaimana retribusi daerah, jumlah penerimaan sektor pajak dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 4.16.

Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2001 dengan pertumbuhan sebesar 65,20 persen. Sedangkan pada tahun 1998/1999 merupakan laju pertumbuhan yang rendah, karena mengalami penurunan sebesar 4,88 persen.

Tabel 4.16

Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Surakarta

Tahun Anggaran 1994/1995 - 2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Daerah	Pertumbuhan (%)
1994/1995	4.834.738.089	-
1995/1996	5.881.655.561	21,65
1996/1997	6.473.586.402	10,04
1997/1998	7.535.326.360	16,40
1998/1999	7.903.412.099	4,88
1999/2000	9.154.634.854	15,83
2000	9.612.536.662	5,01
2001	15.880.303.712	65,20
2002	20.943.450.996	31,88
2003	24.656.997.669	17,73

Sumber : Dipenda Kota Surakarta

3. Retribusi Pasar

Retribusi Pasar merupakan bagian dari retribusi daerah yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Surakarta. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Kota Surakarta memiliki 37 pasar yang tersebar hampir di semua kecamatan, yang mana masing-masing pasar memberikan kontribusi berbeda-beda. Pasar yang ada di Kota Surakarta mempunyai tingkatan yang dapat dibedakan dengan kelas-kelas. Di bawah ini dapat dilihat tabel pengelompokan pasar berdasarkan kelas.

Tabel 4.17

Pengelompokan Pasar Berdasarkan Kelas

di Kota Surakarta

Kelas Pasar	Nama Pasar
1. Kelas I A	1. Pasar Legi 2. Pasar Klewer 3. Pasar Singosaren
2. Kelas I B	1. Pasar Gede 2. Pasar Harjodaksino 3. Pasar Jongke 4. Pasar Nusukan
3. Kelas II A	1. Pasar Rejosari 2. Pasar Turisari 3. Pasar Purwosari 4. Pasar Sidodadi 5. Pasar Kadipolo 6. Pasar Ledoksari
4. Kelas II B	1. Pasar Jebres 2. Pasar Tanggul 3. Pasar Depok 4. Pasar Ayam 5. pasar Kliwon 6. Pasar Kabangan

	7. Pasar Windujenar 8. Pasar Kembang 9. Pasar Mebel 10. Pasar Penumping 11. Pasar Balapan
5. Kelas III A	1. Pasar Ngemplak 2. Pasar Mojosongo 3. Pasar Bangunharjo 4. Pasar Gading 5. Pasar Sidomulyo 6. Pasar Sangkrah 7. Pasar Buah Jurug 8. Pasar Dawung 9. Pasar Tunggulsari
6. Kelas III B	1. Pasar Mojosongo Perumnas 2. Pasar Joglo 3. Pasar Ngumbul 4. Pasar Besi Tua

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Semua pasar di Kota Surakarta mempunyai fasilitas los dan kios. Tarif retribusi pasar Kota Surakarta terdiri dari pemungutan tarif los dan kios, selain itu juga berasal dari iuran sampah dan biaya pemakaian listrik. Berdasarkan

Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 06/DPRD/II/2001 Tanggal 6 Maret 2001 tentang Penetapan Kelas Pasar dan Taksiran Nilai Tempat Dasaran Pasar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 511.2/085-A/I/2001 Tanggal 7 Maret 2001 tentang Penetapan Kelas Pasar dan Taksiran Nilai Tempat Dasaran Pasar, maka Kelas Pasar dan Taksiran Nilai Tempat Dasaran Pasar yang berlaku mulai 1 April 2001 untuk masing-masing kelas pasar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18

Tarif Retribusi Pasar Berdasarkan Kelas

di Kota Surakarta

Kelas Pasar	Tarif Los (Per M^2)	Tarif Kios (Per M^2)
1. Pasar Kelas I A		
• *Pasar Legi*	Rp. 127,00	Rp. 210,00
• *Pasar Klewer*	Rp. 127,00	Rp. 360,00
• *Pasar Singosaren*	Rp. 250,00	Rp. 500,00
2. Pasar Kelas I B	Rp. 112,00	Rp. 187,50
3. Pasar Kelas II A	Rp. 90,00	Rp. 127,50
4. Pasar Kelas II B	Rp 82,00	Rp. 112,50
5. Pasar Kelas III A	Rp. 60,00	Rp. 75,00
6. Pasar Kelas III B	Rp. 45,00	Rp. 55,00

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Penerimaan retribusi pasar Kota Surakarta berasal dari pungutan di pasar daerah dan pasar desa atas ijin pemakaian los, kios dan lesehan. Penerimaan sektor retribusi pasar dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dapat dilihat pada tabel 4.19.

Tabel 4.19
Pertumbuhan Retribusi Pasar Kota Surakarta
Tahun Anggaran 1994/1995 - 2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Pasar	Pertumbuhan (%)
1994/1995	2.723.391.345	-
1995/1996	2.950.359.965	8,33
1996/1997	3.150.613.181	6,79
1997/1998	3.408.588.205	8,19
1998/1999	2.898.057.575	-14,98
1999/2000	3.239.387.560	11,78
2000	3.617.834.297	11,68
2001	6.346.069.949	75,41
2002	7.227.405.058	13,89
2003	8.341.932.424	15,42

Sumber : Dipenda Kota Surakarta

Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa selama sepuluh tahun terakhir laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 75,41 persen. Sedangkan pada tahun 1998/1999 merupakan laju pertumbuhan yang rendah, karena mengalami penurunan sebesar -14,98 persen.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka digunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber, antara lain :

a. Studi Pustaka

Studi ini diarahkan untuk memperoleh landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar teoritis diperoleh dari literatur-literatur maupun dari tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Studi Lapangan

Bentuk studi lapangan ini berupa wawancara, bertanya langsung pada pihak-pihak yang berwenang untuk mendapatkan data kompeten yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5.2. Macam Data

- Data Umum di Kota Surakarta seperti :
  - Pertumbuhan jumlah penduduk
  - Pendapatan Domestik Regional Bruto
  - Struktur organisasi kantor dinas pendapatan daerah

- Data Khusus di Kota Surakarta seperti :
  - Perkembangan penerimaan retribusi pasar tahun 1999 sampai tahun 2003
  - Struktur pendapatan asli daerah
  - Pertumbuhan retribusi pasar
  - Target penerimaan retribusi pasar
  - Besarnya penerimaan dari retribusi lainnya.
  - Sistem dan Prosedur retribusi pasar

5.3. Metode Analisis Data

1. Analisis Kontribusi

Dengan analisis ini maka dapat diketahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi pasar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD.

Besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : *(Nugroho Budiyuwono, 1995, 160)*

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Dimana :

Pn = kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah

QY = jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

QX = adalah jumlah penerimaan retribusi pasar

n = adalah tahun (periode) tertentu

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Surakarta. Dan dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama 5 tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat membuktikan apakah peranan retribusi pasar mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Apabila pengaruh kenaikan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan PAD hal ini akan membawa dampak yang baik bagi PAD. Bila yang terjadi adalah sebaliknya maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui retribusi pasar.

2. Elastisitas Retribusi Pasar terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Setelah mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kemudian didapatkan elastisitas retribusi pasar tersebut terhadap PDRB, dimana elastisitas ini merupakan tingkat kepekaan relatif dari retribusi pasar terhadap adanya perubahan pada PDRB dengan cara perhitungan *Andik Fajar Tjahyono (1996)* sebagai berikut :

$$\in RPs = \frac{\Delta RPs}{\Delta PDRB}$$

Dimana diketahui :

ϵ RPS = Elastisitas retribusi pasar

Δ RPs = Persentase perubahan retribusi pasar

Δ PDRB = Persentase perubahan PDRB

Dengan diketahui elastisitas retribusinya, dapat diketahui akibat dari perubahan retribusi pasar terhadap PDRB. Jika elastisitas > 1 berarti setiap ada perubahan dalam PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan dalam retribusi pasar lebih besar 1 persen. Ini mengandung arti retribusi tersebut elastis. Jika elastisitas suatu retribusi < 1 maka kondisi yang terjadi adalah retribusi tersebut tidak elastis. Bila tingkat elastisitasnya meningkat maka akan semakin baik, karena berarti PDRB semakin berpengaruh terhadap retribusi pasar. Bila yang terjadi sebaliknya maka

PDRB tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap retribusi pasar, artinya bila terjadi perubahan pada PDRB tidak akan mempengaruhi retribusi pasar.

3. Potensi Retribusi Pasar

Potensi retribusi perlu diketahui untuk mengukur apakah penetapan target pemungutan retribusi pasar sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk mengetahui besarnya potensi suatu retribusi dengan cara mengalikan pengenaan retribusi dengan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan anggapan bahwa seluruh obyek retribusi tersebut membayar retribusi. Adapun perhitungannya *(Andik Fajar Tjahyono (1996)* adalah :

$$Potensi\ Retribusi\ Pasar = Pengguna\ Jasa \times Luas\ Lahan \times Tarif$$

Apabila diperoleh ternyata belum seluruh potensi didapat maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan dengan lebih baik lagi. Bila ternyata realisasi melampaui potensi yang ada maka pelayanan terhadap pedagang akan ditingkatkan dan juga pendapatan terhadap pedagang perlu diperbaiki.

4. Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Pasar

Tingkat upaya pemungutan retribusi pasar perlu diketahui untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan dalam pemungutan retribusi pasar itu sendiri, tolok ukur yang lazim digunakan adalah PDRB. Adapun cara yang digunakan *Nick Devas (1998)* adalah sebagai berikut :

$$Tingkat\ Upaya = \frac{Penerimaan\ Retribusi\ Pasar}{PDRB} \times 100\%$$

Dengan diketahui tingkat upaya maka akan diketahui seberapa besar usaha pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pasar Kota Surakarta dalam memungut retribusi pasar.

5. Analisis Efektifitas

Efektifitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap target penerimaan retribusi pasar yang memungkinkan apakah besarnya realisasi retribusi pasar sesuai dengan target yang ada.

Besarnya efektifitas retribusi pasar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut *(Nick Devas, 1989, 146)* :

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Pasar}{Target\ Penerimaan\ Retribusi\ Pasar} \times\ 100\%$$

Apabila hasil dari perhitungan analisis efektifitas retribusi pasar menghasilkan angka/persentase yang mendekati 100 persen berarti retribusi pasar semakin efektif. Dan untuk melihat efektifitasnya dengan membandingkan efektifitas tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya. Menurut Dudi Mi'raz Imaduddin persentase tingkat efektifitas kinerja dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu *(Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000, 17)* :

1. Lebih dari 100% digolongkan sangat efektif.
2. 90% - 100% digolongkan efektif.
3. 80% - 90% digolongkan cukup efektif.
4. 60% - 80% digolongkan kurang efektif.
5. Kurang dari 60% digolongkan tidak efektif.

Dengan analisis ini akan menunjukkan apakah realisasi penerimaan retribusi pasar telah mencapai hasil guna (efektifitas) yang tinggi ataupun tidak dari target yang ada.

6. Analisis Efisiensi

Efisiensi penerimaan retribusi pasar berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan yang dikeluarkan terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar. Apakah besarnya biaya pemungutan yang dikeluarkan sebanding dengan besarnya realisasi penerimaan retribusi pasar yang ada.

Besarnya efisiensi retribusi pasar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : *(Nick Devas, 1989, 146)*

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Retribusi\ Pasar}{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Pasar} \times 100\%$$

Hasil yang semakin efisien apabila nilai yang diperoleh dari perhitungan efisiensi menunjukkan persentase yang semakin kecil dan sebaliknya apabila hasil perhitungannya semakin besar berarti semakin tidak efisien. Menurut Dudi Mi'raz Imaduddin persentase efisiensi kinerja dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu *(Dudi Mi'raz Imaduddin, 2002, 17)* :

1. Lebih dari 100% digolongkan tidak efisien.
2. 90% - 100% digolongkan kurang efisien.
3. 80% - 90% digolongkan cukup efisien.
4. 60% - 80% digolongkan efisien.
5. Kurang dari 60% digolongkan sangat efisien.

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Penerimaan PAD dan Retribusi Pasar.

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan retribusi pasar Kota Surakarta sebelum dan sesudah kerusuhan mengalami peningkatan. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan PAD dan retribusi pasar Kota Surakarta dihitung dengan membandingkan penerimaan pertahunnya, sehingga diperoleh angka persentase. Perkembangan PAD dan retribusi pasar Kota Surakarta dalam lima tahun sebelum dan sesudah kerusuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Pertumbuhan PAD dan Retribusi Pasar

Kota Surakarta Sebelum Kerusuhan Tahun 1994/1995 – 1998/1999

Tahun Anggaran	PAD	PAD (%)	Retribusi Pasar	Retribusi Pasar (%)
1994/1995	12.976.839.669	21,14	2.723.391.345	11,76
1995/1996	15.596.706.010	20,19	2.950.359.965	8,33
1996/1997	17.166.180.584	10,06	3.150.613.181	6,79
1997/1998	18.934.341.860	16,13	3.408.588.205	8,19
1998/1999	17.499.535.724	-12,21	2.898.057.575	-14,98

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa PAD Kota Surakarta sebelum kerusuhan cenderung mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 1994/1995 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 21,14%. Pada tahun 1995/1996 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 20,19%. Tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 1996/1997 naik sebesar 10,06%, lebih kecil dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1997/1998 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 16,13%. Sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 1998/1999 mengalami penurunan sebesar 12,21%, yaitu turun sebesar Rp. 1.434.806.136,00. Penurunan ini disebabkan karena adanya kerusuhan yang menghancurkan kegiatan perekonomian di Kota Surakarta.

Demikian juga dengan perkembangan penerimaan retribusi pasar Kota Surakarta relatif mengalami kenaikan. Pada tahun 1994/1995 retribusi pasar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11,76%. Pada tahun 1995/1996 retribusi pasar mengalami kenaikan sebesar 8,33%. Sedangkan pada tahun 1996/1997 dan tahun 1997/1998 retribusi pasar naik sebesar 6,79% dan 8,19%. Tetapi pada tahun 1998/1999 penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan 14,98%. Hal ini juga disebabkan banyak pedagang yang merasa takut untuk melakukan aktifitasnya dikarenakan keadaan Kota Surakarta yang masih banyak kerusuhan.

Tabel 6.2

Pertumbuhan PAD dan Retribusi Pasar

Kota Surakarta Setelah Kerusuhan Tahun 1999/2000 – 2003

Tahun Anggaran	PAD	PAD (%)	Retribusi Pasar	Retribusi Pasar (%)
1999/2000	19.888.069.111	13,65	3.239.387.560	11,78
2000	21.913.828.479	10,19	3.617.834.297	11,68
2001	35.640.533.633	62,64	6.346.069.949	75,41
2002	44.938.084.099	26,09	7.227.405.058	13,85
2003	54.815.684.238	21,98	8.341.932.424	15,42

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa PAD Kota Surakarta cenderung mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2000 terjadi perubahan perhitungan tahun fiskal menjadi tahun kalender, sebagai akibat dari perubahan jumlah bulan di tahun anggaran 2000 hanya 9 bulan, sedangkan pada tahun anggaran lainnya adalah 12 bulan, tetapi Pendapatan Asli Daerah tahun 2000 tetap mengalami peningkatan. Pada tahun 1999/2000 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 13,65%. Pada tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 10,19%, walaupun lebih kecil dari tahun 1999/2000. Hal tersebut dikarenakan perubahan dari tahun fiskal ke tahun kalender. Tahun 2001 merupakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi yaitu sebesar 62,64%, karena perhitungan tahun 2000 hanya 9 bulan sedangkan pada tahun 2001 dan seterusnya

perhitungannya 12 bulan. Untuk tahun 2002 dan tahun 2003 kenaikannya sebesar 26,09% dan 21,98%.

Demikian juga dengan perkembangan penerimaan retribusi pasar Kota Surakarta relatif mengalami kenaikan. Pada tahun 1999/2000 retribusi pasar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11,78%. Pada tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 11,68%, walaupun lebih kecil dari tahun 1999/2000 yaitu mempunyai selisih sebesar 0,1%. Hal tersebut dikarenakan perubahan dari tahun fiskal ke tahun kalender. Tahun 2001 merupakan peningkatan retribusi pasar yang paling tinggi yaitu sebesar 75,41%, karena perhitungan tahun 2000 hanya 9 bulan sedangkan pada tahun 2001 dan seterusnya perhitungannya 12 bulan. Untuk tahun 2002 dan tahun 2003 kenaikan retribusi pasar sebesar 13,85% dan 15,42%.

Apabila kita melihat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan retribusi pasar antara sebelum dan sesudah kerusuhan maka dapat disimpulkan bahwa penerimaannya sama-sama mengalami kenaikan yang berfluktuatif, yang membedakan hanyalah penerimaan pada tahun 1998/1999 mengalami penurunan. Karena pada tahun tersebut banyak terjadi kerusuhan di Kota Surakarta.

6.2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, kontribusi retribusi pasar Kota Surakarta dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan retribusi pasar dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100%. Retribusi pasar sebagai

komponen Pendapatan Asli Daerah memberikan peranan atau kontribusi terhadap retribusi daerah cukup besar atau berarti yaitu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.3
Kontribusi Retribusi Pasar
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
Sebelum Kerusuhan Tahun Anggaran 1994/1995 -1998/1999

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1994/1995	2.723.391.345	12.976.839.669	20,99
1995/1996	2.950.359.965	15.596.706.010	18,92
1996/1997	3.150.613.181	17.166.180.584	18,35
1997/1998	3.408.588.205	18.934.341.860	18,01
1998/1999	2.898.057.575	17.499.535.724	16,56
Rata-rata	**3.026.202.054**	**16.434.720.769**	**18,57**

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta pada tahun 1994/1995 sampai dengan 1998/1999 bervariasi dengan tingkat rata-rata sebesar 18,57%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 1994/1995 hingga tahun 1998/1999 penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta setiap tahunnya sebesar 18,57% berasal dari retribusi pasar. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 1994/1995 yaitu sebesar 20,99%, sedangkan kontribusi terendah pada tahun 1998/1999 yaitu sebesar 16,56%. Tahun 1995/1996 kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,92%. Pada tahun 1996/1997

kontribusi retribusi pasar mengalami penurunan, yaitu sebesar 18,35%, sedangkan tahun 1997/1998 kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan kembali menjadi 18,01%. Untuk tahun 1998/1999 kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang cukup besar yaitu kontribusinya 16,56%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1998/1999 banyak para pedagang yang tidak melakukan aktifitasnya dan adanya pasar yang rusak akibat adanya kerusuhan pada tahun tersebut, sehingga penerimaan retribusi pasar menurun.

Tabel 6.4
Kontribusi Retribusi Pasar
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
Setelah KerusuhanTahun Anggaran 1999/2000 -2003

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1999/2000	3.239.387.560	19.888.069.111	16,29
2000	3.617.834.297	21.913.828.479	16,51
2001	6.346.069.949	35.640.533.633	17,81
2002	7.227.405.058	44.938.084.099	16,08
2003	8.341.932.424	54.815.684.238	15,22
Rata-rata	**5.754.525.857,6**	**35.439.239.912**	**16,38**

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Dari tabel tersebut dapat dilihat besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta pada tahun 1999/2000-2003 bervariasi dengan tingkat rata-rata sebesar 16,38%. Hal ini

berarti bahwa dari tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2003 penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta setiap tahunnya sebesar 16,38% berasal dari retribusi pasar. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 17,81%, sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2003 yaitu sebesar 15,22%. Tahun 1999/2000 kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,29%. Pada tahun 2000 kontribusi retribusi pasar mengalami peningkatan, yaitu sebesar 16,51%, sedangkan tahun 2001 kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan lagi menjadi 17,81%. Kenaikan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2001 disebabkan tingkat pertumbuhan retribusi pasar jauh lebih besar daripada tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2002 dan 2003 kontribusi retribusi pasar mengalami penurunan sebesar 16,08% dan 15,22%. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2002 dan 2003 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan retribusi pasar, hal ini diakibatkan oleh adanya penerimaan selain retribusi pasar yang lebih besar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, yaitu penerimaan di sektor pajak khususnya pajak penerangan jalan.

Dari hasil analisis kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah kerusuhan menghasilkan kesimpulan bahwa sumbangan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta lebih besar pada tahun-tahun sebelum terjadinya kerusuhan yaitu tahun 1994/1995 – 1998/1999. Dimana perbedaannya mempunyai selisih 2,19%.

Sedangkan pada tahun sesudah kerusuhan yaitu tahun 1999/2000 – 2003 terdapat penerimaan yang lebih besar selain retribusi pasar yaitu pada sektor pajak.

6.3. Elastisitas Retribusi Pasar

Perhitungan elastisitas retribusi pasar digunakan untuk mengetahui elastisitas perubahan retribusi pasar yang berpengaruh terhadap adanya perubahan PDRB. Apabila hasil dari perhitungan elastisitasnya lebih besar (>1) berarti setiap perubahan dalam PDRB sebesar 1 (satu) persen akan mengakibatkan perubahan dalam retribusi pasar lebih besar dari 1 persen dan dapat digolongkan elastis. Bila yang terjadi adalah sebaliknya yaitu perhitungan elastisitasnya kurang dari (<1) maka dapat digolongkan tidak elastis, yang berarti setiap perubahan dalam PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan dalam retribusi pasar kurang dari 1 persen.

Perhitungan elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.5

Elastisitas Retribusi Pasar

Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan

Sebelum Kerusuhan Kota Surakarta

Tahun Anggaran 1994/1995 – 1998/1999

Tahun Anggaran	Perubahan Retribusi Pasar (%)	Perubahan PDRB (%)	Elastisitas (%)
1994/1995	11,76	-	-
1995/1996	8,33	8,65	0,96
1996/1997	6,79	17,87	0,38
1997/1998	8,19	4,22	1,94
1998/1999	-14,98	-13,93	1,08
Rata-rata	**4,02**	**3,36**	**0,87**

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB selama lima tahun berfluktuasi, dengan rata-rata tingkat elastisitasnya adalah 0,87 persen. Pada tahun 1995/1996 tingkat elastisitasnya sebesar 0,96 persen, yang artinya bahwa perubahan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan retribusi pasar sebesar 0,96 persen. Hal ini disebabkan jumlah perubahan PDRB lebih besar dibanding perubahan retribusi pasar. Pada tahun 1996/1997 tingkat elastisitasnya sebesar 0,38 persen, yang artinya bahwa perubahan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan retribusi pasar sebesar 0,38 persen. Pada tahun 1997/1998 tingkat elastisitasnya sebesar 1,94 persen, yang artinya bahwa perubahan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan retribusi pasar sebesar 1,94 persen. Pada tahun 1998/1999 tingkat elastisitasnya sebesar 1,08

persen, yang artinya bahwa perubahan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan retribusi pasar sebesar 1,08 persen.

Tabel 6.6

Elastisitas Retribusi Pasar

Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan

Setelah Kerusuhan Kota Surakarta Tahun Anggaran 1999/2000 -2003

Tahun Anggaran	Perubahan Retribusi Pasar (%)	Perubahan PDRB (%)	Elastisitas (%)
1999/2000	11,78	1,44	8,18
2000	11,68	4,15	2,81
2001	75,41	3,93	19,19
2002	13,89	5,32	2,61
2003	15,42	6,46	2,39
Rata-rata	**25,64**	**4,26**	**7,04**

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB selama lima tahun berfluktuasi, dengan rata-rata tingkat elastisitasnya adalah 7,04%. Pada tahun 1999/2000 tingkat elastisitasnya sebesar 8,18 persen, yang artinya bahwa perubahan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan retribusi pasar sebesar 8,18 persen. Hal ini disebabkan jumlah perubahan retribusi pasar cukup besar dibanding PDRB. Pada tahun 2000 tingkat elastisitasnya sebesar 2,81 persen, yang artinya bahwa perubahan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan retribusi pasar sebesar 2,81 persen. Pada tahun 2001 tingkat elastisitasnya sebesar 19,19 persen, yang artinya bahwa

perubahan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan retribusi pasar sebesar 19,19 persen. Pada tahun 2002 tingkat elastisitasnya sebesar 2,61 persen, yang artinya bahwa perubahan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan retribusi pasar sebesar 2,61 persen. Pada tahun 2003 tingkat elastisitasnya sebesar 2,39 persen, yang artinya bahwa perubahan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan retribusi pasar sebesar 2,39 persen.

Apabila dibandingkan antara elastisitas retribusi pasar sebelum dan sesudah kerusuhan dapat dilihat bahwa sebelum terjadinya kerusuhan tingkat rata-rata elastisitasnya sebesar 0,87 persen dan digolongkan tidak elastis. Karena adanya penerimaan yang sangat besar dari sektor PDRB yaitu di sektor industri pada tahun 1995/1996 – 1996/1997. Sedangkan pada tahun-tahun setelah kerusuhan yaitu pada tahun 1999/2000 – 2003 elastisitas retribusi pasar relatif elastis.

6.4. Potensi Retribusi Pasar

Potensi retribusi pasar dihitung untuk mengetahui apakah penetapan target pemungutan retribusi pasar sudah dilakukan sebaik-baiknya. Pengukuran potensi retribusi pasar sebenarnya adalah untuk mengetahui kapasitas penuh retribusi pasar yang bisa diperoleh bila tidak ada gangguan atau penerimaan dalam keadaan 100%. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta retribusi pasar terdiri dari elemen, los, kios, dan pedagang lesehan tidak tetap. Dari elemen-elemen tersebut hanya pedagang lesehan tidak tetap yang tidak dimasukkan dalam banyaknya pedagang yang menempati fasilitas pasar. Penentuan tarif retribusi di Kota Surakarta ditentukan berdasarkan dari kelas pasar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pasar, baik untuk pengguna jasa los maupun kios pada pasar juga luas lahan pada masing-masing pasar maka dapat dicari potensi yang dimiliki oleh pasar di Kota Surakarta pada tahun 1994/1995 – 1998/1999 untuk pengguna jasa los maupun kios sepeti pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.7

Potensi Penerimaan Retribusi Seluruh Pasar Sebelum Kerusuhan Kota Surakarta Tahun 1994/1995 – 1998/1999

Tahun	Potensi Retribusi Pasar		Jumlah
	Los	Kios	
1994/1995	1.149.203.200	7.375.630.320	8.524.833.520
1995/1996	1.279.049.200	7.432.606.800	8.711.656.000
1996/1997	1.485.300.400	9.088.426.080	10.573.726.480
1997/1998	1.661.803.000	10.185.184.570	11.846.987.570
1998/1999	1.746.347.400	10.215.294.460	11.961.641.860

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Berdasarkan perhitungan potensi retribusi pasar pada tabel 6.7 diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun potensi reribusi pasar dari masing-masing elemen selalu meningkat. Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya para pedagang dan dinaikkannya tarif retribusi, selain itu juga adanya pasar-pasar baru. Pada tahun 1996/1997 potensi retribusi pasar Kota Surakarta mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya pasar baru yaitu pasar jongke dan juga adanya

perluasan kios dan los yang cukup besar di pasar klewer dan pasar Legi. Sedangkan untuk tahun-tahun yang lainnya kenaikannya bersifat relatif tetap.

Tabel 6.8

Potensi Penerimaan Retribusi Seluruh Pasar Setelah Kerusuhan Kota Surakarta Tahun 1999/2000 - 2003

Tahun	Potensi Retribusi Pasar		Jumlah
	Los	Kios	
1999/2000	1.781.166.600	10.481.762.880	12.262.929.480
2000	1.581.541.200	11.549.429.280	13.130.970.480
2001	2.361.902.040	15.378.454.800	17.740.356.840
2002	2.407.324.320	15.577.552.800	17.984.877.120
2003	2.409.304.320	15.580.881.900	17.990.186.220

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Peningkatan potensi retribusi pasar setelah kerusuhan, tertinggi terjadi pada tahun 2001 dengan potensi sebesar 17.740.356.840, sedangkan tahun sebelumnya hanya 13.130.970.480. Peningkatan tersebut disebabkan karena munculnya pasar-pasar baru, misalnya Pasar Dawung dan Pasar Buah Jurug. Pertambahan pedagang yang menempati los paling besar terjadi pada tahun 2002 yaitu naik sebesar 420 pedagang dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kios, pertambahannya paling besar terjadi pada tahun 2002 yaitu naik sebesar 117 pedagang dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun-tahun yang lainnya kenaikannya bersifat relatif tetap. Untuk pasar yang memiliki jumlah pedagang

paling banyak terjadi di Pasar Klewer dengan tingkat rata-rata pedagang tiap tahunnya lebih dari 2000 pedagang, yang sebagian besar menghuni kios denan jenis dagangannya yaitu pakaian. Sedangkan pasar yang memiliki pedagang paling kecil terjadi di Pasar Dawung dengan jumlah pedagang 6 pedagang, yang semuanya menempati kios.

Jika dilihat dari potensi retribusi pasar sebelum dan sesudah kerusuhan, maka dapat disimpulkan bahwa potensi retribusi cenderung mengalami kenaikan terus menerus. Yang membedakan hanyalah pada pertambahan pasar, los, kios dan tarif pada masing-masing tahun.

6.5. Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Pasar

Pengukuran tingkat upaya pemungutan retribusi pasar perlu dilakukan untuk menghitung seberapa besar upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi pasar. Dalam pengukuran ini, tolak ukur yang biasa digunakan adalah PDRB. Perhitungan tingkat upaya pemungutan retribusi pasar di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.9

Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Pasar

Terhadap PDRB Harga Konstan Kota Surakarta Sebelum Kerusuhan

Tahun Anggaran 1994/1995 -1998/1999

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Pasar	PDRB (harga Konstan)	Tingkat Upaya (%)
1994/1995	2.723.391.345	1.073.359.778.000	0,25
1995/1996	2.950.359.965	1.166.205.398.000	0,25
1996/1997	3.150.613.181	1.374.559.010.000	0,23
1997/1998	3.408.588.205	1.432.562.370.000	0,24
1998/1999	2.898.057.575	1.233.018.440.000	0,24
Rata-rata	**3.026.202.054**	**1.255.940.999.200**	**0,24**

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Tingkat upaya pemungutan retribusi pasar dari tahun 1994/1995 – 1998/1999 bersifat tetap. Pada tahun 1994/1995 dan 1995/1996 tingkat upaya pemungutan retribusi pasar sebesar 0,25%. Pada tahun 1996/1997 tingkat upaya turun menjadi 0,23%. Sedangkan pada tahun 1997/1998 dan 1998/1999 tingkat upaya pemungutan retribusi pasar sebesar 0,24%. Kenaikan tingkat upaya retribusi pasar dari tahun ke tahun menunjukkan kemampuan masyarakat khususnya pedagang dalam membayar retribusi pasar.

Tabel 6.10

Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Pasar

Terhadap PDRB Harga Konstan Kota Surakarta Setelah Kerusuhan

Tahun Anggaran 1999/2000 -2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Pasar	PDRB (harga Konstan)	Tingkat Upaya (%)
1999/2000	3.239.387.560	1.250.807.410.000	0,26
2000	3.617.834.297	1.302.715.920.000	0,28
2001	6.346.069.949	1.353.882.640.000	0,47
2002	7.227.405.058	1.425.961.170.000	0,51
2003	8.341.932.424	1.518.008.050.000	0,55
Rata-rata	**5.754.525.857,6**	**1.370.275.038.000**	**0,41**

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Dari tabel 6.5 di atas terlihat bahwa tingkat upaya pemungutan retribusi pasar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 1999/2000 tingkat upaya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,26%. Pada tahun 2000 tingkat upaya naik menjadi 0,28%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2001 dengan tingkat upaya sebesar 0,47%. Untuk tahun 2002 dan 2003 tingkat upayanya sebesar 0,51% dan 0,55%. Tingkat upaya di Kota Surakarta diusahakan semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan upaya pemungutan retribusi pasar guna membantu peningkatan keuangan daerah.

Apabila dibandingkan dengan tingkat upaya pemungutan retribusi pasar sebelum dan sesudah kerusuhan maka tingkat upaya pemungutan retribusi pasar setelah kerusuhan relatif lebih baik. Apabila dilihat dari tingkat rata-rata, tingkat upaya setelah kerusuhan cenderung lebih besar dan selalu mengalami kenaikan.

Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah daerah Kota Surakarta dalam hal melakukan pemungutan retribusi pasar sudah lebih baik dan teratur dari tahun-tahun sebelum terjadinya kerusuhan.

Penerimaan retribusi pasar yang selalu meningkat setiap tahunnya disebabkan Pemerintah Kota Surakarta selalu melakukan perbaikan-perbaikan pasar dengan cara menambah fasilitas pasar yang merupakan salah satu program penting yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Perbaikan-perbaikan pasar tersebut dilakukan dengan cara pembangunan kios dan los yang dapat menampung lebih banyak pedagang serta adanya penyediaan sarana keuangan seperti Bank Pasar, Bank Perkreditan Rakyat yang tujuannya memberikan modal bagi para pedagang untuk mengembangkan usahanya, tentu saja dengan bunga yang rendah.

6.6. Efektifitas Retribusi Pasar

Pengukuran efektifitas dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat efektifitas retribusi pasar di Kota Surakarta dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target retribusi pasar yang ditetapkan. Apabila hasil perhitungan efektifitas retribusi pasar menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100%, maka retribusi pasar semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan retribusi pasar Kota Surakarta semakin baik. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain,

seperti keadilan, ketepatan waktu pembayaran, dan kepastian hukum diabaikan. Di bawah ini disajikan tabel hasil perhitungan efektifitas retribusi pasar Kota Surakarta tahun anggaran 1994/1995 – 1998/1999.

Tabel 6.11

Efektifitas Retribusi Pasar Kota Surakarta Sebelum Kerusuhan

Tahun Anggaran 1994/1995 – 1998/1999

Tahun Anggaran	Target Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Efektifitas Retribusi Pasar (%)
1994/1995	2.725.000.000	2.723.391.345	99,94
1995/1996	2.943.000.000	2.950.359.965	100,25
1996/1997	3.143.000.000	3.150.613.181	100,24
1997/1998	3.400.000.000	3.408.588.205	100,25
1998/1999	2.830.000.000	2.898.057.575	102,40
Rata-rata	**3.007.200.000**	**3.026.202.054**	**100,61**

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Dari hasil perhitungan di atas dapat terlihat bahwa tingkat efektifitas retribusi pasar Kota Surakarta pada tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun 1998/1999 relatif tetap, yaitu dengan rata-rata 100,61%. Pada tahun 1994/1995 tingkat efektifitas retribusi pasar Kota Surakarta sebesar 99,94%, hal ini tidak dapat dikatakan efektif, tetapi perbandingan antara target dengan realisasi tidak terlalu besar. Sedangkan pada tahun 1995/1996 tingkat efektifitasnya naik menjadi 100,25%. Kemudian pada tahun 1996/1997 tingkat efektifitas sebesar 100,24%. Pada tahun 1997/1998 tingkat efektifitasnya sebesar 100,25% dan pada

tahun 1998/1999 tingkat efektifitasnya mencapai 102,40%. Dari tahun 1994/1995 – 1998/1999 tingkat efektifitas bersifat tetap, karena selisih antara realisasi dengan target tidak terlalu jauh.

Tabel 6.12

Efektifitas Retribusi Pasar Kota Surakarta Setelah Kerusuhan

Tahun Anggaran 1999/2000 -2003

Tahun Anggaran	Target Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Efektifitas Retribusi Pasar (%)
1999/2000	3.167.500.000	3.239.387.560	102,27
2000	3.433.696.000	3.617.834.297	105,36
2001	5.360.000.000	6.346.069.949	118,40
2002	7.200.000.000	7.227.405.058	100,38
2003	7.983.000.000	8.341.932.424	104,50
Rata-rata	**5.428.839.200**	**5.754.525.857,6**	**106,18**

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Dari hasil perhitungan di atas dapat terlihat bahwa tingkat efektifitas retribusi pasar Kota Surakarta pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2003 sangat tinggi, yaitu dengan rata-rata 106,18%. Pada tahun 1999/2000 tingkat efektifitas retribusi pasar Kota Surakarta sebesar 102,27%, hal ini dapat dikatakan efektif tetapi perbandingan antara target dengan realisasi tidak terlalu besar. Sedangkan pada tahun 2000 tingkat efektifitasnya naik menjadi 105,36%. Kemudian pada tahun 2001 tingkat efektifitas sebesar 118,40%, dan merupakan tingkat efektifitas tertinggi selama kurun waktu 1999/2000 sampai dengan 2003. Hal ini disebabkan ada beberapa hal, antara lain :

1. Munculnya pasar-pasar baru, yaitu Pasar Dawung dan Pasar Buah Jurug.
2. bertambahnya pedagang, pertambahan terbesar terjadi di Pasar Legi, Pasar Gede, Pasar Klewer, dan Pasar Singosaren.
3. perekonomian yang semakin baik dan berpengaruh besar terhadap penerimaan retribusi pasar.

Sedangkan untuk tahun 2002 merupakan tingkat efektifitas terendah selama lima tahun terakhir dengan tingkat efektifitas sebesar 100,38%, tetapi tetap efektif karena melebihi 100%. Untuk tahun 2003 tingkat efektifitas retribusi pasar sebesar 104,50%.

Dengan melihat rata-rata tingkat efektifitas retribusi pasar Kota Surakarta yang melebihi 100% atau dengan rata-rata sebesar 106,18% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan retribusi pasar Kota Surakarta sangat baik, karena realisasi penerimaan retribusi pasar selalu lebih besar dari target yang direncanakan.

Pengamatan data sebagai bahan pembanding antar daerah dapat dilihat dibawah ini :

1. Kabupaten Demak

   Kabupaten Demak, terlihat bahwa tingkat efektifitas pemungutannya pada tahun 2000 sebesar 32,51% atau bisa dikatakan tidak efektif. Jika dibandingkan dengan Kota Surakarta tingkat efektifitasnya berbeda jauh yaitu 105,36%. Hal ini disebabkan karena kebijakan masing-masing daerah yang berbeda.

2. Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang, terlihat bahwa rata-rata tingkat efektifitasnya sebesar 106,78%, hampir sama dengan Kota Surakarta yaitu sebesar 106,18%. Kesamaan rata-rata tingkat efektifitas kedua daerah ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam hal pemungutan retribusi sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan tingkat efektifitas retribusi pasar pada tahun sebelum dan sesudah terjadinya kerusuhan menunjukkan bahwa tingkat efektifitas retribusi pasar setelah kerusuhan lebih efektif yaitu dengan tingkat rata-rata 106,18% dan pertambahan los dan kios lebih besar. Selain itu pada tahun tersebut terjadi kenaikan tarif sesuai dengan yang ditetapkan.

6.7. Efisiensi Retribusi Pasar

Efisiensi retribusi pasar dihitung dengan cara membandingkan antara biaya pemungutan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar. Apabila hasil perhitungan mendekati angka persentase yang semakin kecil maka retribusi pasar semakin efisien atau dengan kata lain kinerja dalam pemungutan retribusi pasar Kota Surakarta akan semakin baik. Besarnya biaya pemungutan atau biaya insentif retribusi pasar Kota Surakarta telah ditetapkan sebesar 5% dari target yang ditetapkan. Apabila biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan retribusi pasar lebih kecil atau lebih besar dari biaya yang ditetapkan (sebesar 5%), maka yang akan dipakai dalam penghitungan efisiensi adalah biaya yang

sesungguhnya. Biaya Tingkat efisiensi retribusi pasar Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.13

Efisiensi Retribusi Pasar Kota Surakarta Sebelum Kerusuhan

Tahun Anggaran 1994/1995 – 1998/1999

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Efisiensi Retribusi Pasar (%)
1994/1995	158.540.125	2.723.391.345	5,82
1995/1996	169.723.100	2.950.359.965	5,75
1996/1997	175.440.145	3.150.613.181	5,57
1997/1998	180.356.250	3.408.588.205	5,29
1998/1999	163.790.075	2.898.057.575	5,65
Rata-rata	**169.569.939**	**3.026.202.054**	**5,62**

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi retribusi pasar Kota Surakarta pada tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun 1998/1999 bervariasi antara 5,29% sampai dengan 5,82%. Sedangkan rata-rata tingkat efisiensi pertahunnya adalah sebesar 5,62%. Pada tahun anggaran 1994/1995 tingkat efisiensi retribusi pasar sebesar 5,82% dan pada tahun 1995/1996 tingkat efisiensinya sebesar 5,75%. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan retribusi pasar, walaupun biaya pemungutan pada tahun 1995/1996 juga mengalami kenaikan tetapi tidak sebesar kenaikan retribusi pasar. Kenaikan retribusi pasar pada tahun1995/1996 disebabkan karena

bertambahnya pengguna los dan kios yang cukup besar di Pasar Legi, Pasar Gading, dan Pasar Kabangan. Sedangkan pada tahun 1996/1997 tingkat efisiensinya mengalami penurunan kembali menjadi 5,57%. Penurunan ini disebabkan munculnya pasar baru yaitu Pasar Jongke, sehingga penerimaan retribusi pasar meningkat. Pada tahun 1997/1998 merupakan tingkat efisiensi paling baik yaitu sebesar 5,29%. Penurunan ini juga disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan retribusi pasar, walaupun biaya pemungutan pada tahun 1997/1998 juga mengalami kenaikan tetapi tidak sebesar kenaikan retribusi pasar. Pada tahun 1998/1999 merupakan tingkat efisiensi kembali memburuk yaitu sebesar 5,65%. Hal ini disebabkan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan retribusi pasar cukup besar, sedangkan pada waktu itu terjadi kerusuhan sehingga para pedagang banyak yang takut untuk berjualan. Dampak dari hal tersebut menyebabkan penerimaan dari retribusi pasar berkurang, sedangkan biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar.

Tabel 6.14

Efisiensi Retribusi Pasar Kota Surakarta Setelah Kerusuhan

Tahun Anggaran 1999/2000 – 2003

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Efisiensi Retribusi Pasar (%)
1999/2000	171.975.000	3.239.387.560	5,31
2000	180.870.150	3.617.834.297	4,99
2001	298.877.025	6.346.069.949	4,71
2002	370.466.900	7.227.405.058	5,12
2003	446.471.450	8.341.932.424	5,35
Rata-rata	**293.732.105**	**5.754.525.857,6**	**5,09**

Sumber Data : Dipenda Kota Surakarta

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi retribusi pasar Kota Surakarta pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2003 bervariasi antara 4,71% sampai dengan 5,35%. Sedangkan rata-rata tingkat efisiensi pertahunnya adalah sebesar 5,09%. Pada tahun anggaran 1999/2000 tingkat efisiensi retribusi pasar sebesar 5,31% dan pada tahun 2000 tingkat efisiensinya sebesar 4,99%. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan retribusi pasar, walaupun biaya pemungutan pada tahun 2000 juga mengalami kenaikan tetapi tidak sebesar kenaikan retribusi pasar. Kenaikan retribusi pasar pada tahun 2000 disebabkan karena bertambahnya pengguna los dan kios yang semula pada tahun 1999 belum ada yang menempati, pada tahun 2000 sudah ada yang menempati. Sedangkan pada tahun 2001 tingkat efisiensinya mengalami penurunan kembali menjadi 4,71%, dan merupakan tingkat efisiensi paling baik selama lima tahun terakhir atau 1999/2000 – 2003. Penurunan ini juga disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan retribusi pasar, walaupun biaya pemungutan pada tahun 2001 juga mengalami kenaikan tetapi tidak sebesar kenaikan retribusi pasar. Kenaikan retribusi pasar pada tahun 2001 juga disebabkan munculnya pasar baru, yaitu pasar Dawung dan pasar Buah Jurug. Untuk tahun 2002 tingkat efisiensinya sebesar 5,12%, sedangkan tahun 2003 tingkat efisiensinya sebesar 5,35%, dan merupakan tingkat efisiensi paling buruk sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan retribusi pasar lebih besar daripada kenaikan penerimaan retribusi

pasar, dan juga masih banyaknya para pedagang yang tidak membayar retribusi, dengan alasan dagangannya tidak laris.

Pengamatan data sebagai bahan pembanding antar daerah, yaitu Kabupaten Jombang. Bahwa di Kabupaten Jombang perhitungan tingkat efisiensinya diasumsikan tetap selama lima tahun, yaitu sebesar 2,99%. Sedangkan di Kota Surakarta tingkat efisiensinya berfluktuatif.

Dari hasil analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi retribusi pasar paling baik adalah setelah terjadinya kerusuhan. Hal ini disebabkan karena setelah terjadinya kerusuhan, pemerintah Kota Surakarta lebeh disiplin dalam hal pemungutan retribusi pasar. Sedangkan pada tahun-tahun sebelum terjadi kerusuhan pemerintah Kota Surakarta masih memberikan toleransi bagi wajib retribusi.

BAB VII

SIMPULAN DAN IMLIKASI

7.1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil dari analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah kerusuhan menghasilkan kesimpulan bahwa sumbangan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta lebih besar pada tahun-tahun sebelum terjadinya kerusuhan yaitu tahun 1994/1995 – 1998/1999. Dimana perbedaannya mempunyai selisih 2,19%. Sedangkan pada tahun sesudah kerusuhan yaitu tahun 1999/2000 – 2003 terdapat penerimaan yang lebih besar selain retribusi pasar yaitu pada sektor pajak.
2. Apabila dibandingkan antara elastisitas retribusi pasar sebelum dan sesudah kerusuhan dapat dilihat bahwa sebelum terjadinya kerusuhan tingkat rata-rata elastisitasnya sebesar 0,87 persen dan digolongkan tidak elastis. Karena adanya penerimaan yang sangat besar dari sektor PDRB yaitu di sektor industri pada tahun 1995/1996 – 1996/1997. Sedangkan pada tahun-tahun setelah kerusuhan yaitu pada tahun 1999/2000 – 2003 elastisitas retribusi pasar relatif elastis.
3. Jika dilihat dari potensi retribusi pasar sebelum dan sesudah kerusuhan, maka dapat disimpulkan bahwa potensi retribusi cenderung mengalami kenaikan terus

menerus. Yang membedakan hanyalah pada pertambahan pasar, los, kios dan tarif pada masing-masing tahun.

4. Apabila dibandingkan dengan tingkat upaya pemungutan retribusi pasar sebelum dan sesudah kerusuhan maka tingkat upaya pemungutan retribusi pasar setelah kerusuhan relatif lebih baik. Apabila dilihat dari tingkat rata-rata, tingkat upaya setelah kerusuhan cenderung lebih besar dan selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah daerah Kota Surakarta dalam hal melakukan pemungutan retribusi pasar sudah lebih baik dan teratur dari tahun-tahun sebelum terjadinya kerusuhan.
5. Apabila dibandingkan dengan tingkat efektifitas retribusi pasar pada tahun sebelum dan sesudah terjadinya kerusuhan menunjukkan bahwa tingkat efektifitas retribusi pasar setelah kerusuhan lebih efektif yaitu dengan tingkat rata-rata 106,18% dan pertambahan los dan kios lebih besar. Selain itu pada tahun tersebut terjadi kenaikan tarif sesuai dengan yang ditetapkan.
6. Dari hasil analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi retribusi pasar paling baik adalah setelah terjadinya kerusuhan. Hal ini disebabkan karena setelah terjadinya kerusuhan, pemerintah Kota Surakarta lebih disiplin dalam hal pemungutan retribusi pasar. Sedangkan pada tahun-tahun sebelum terjadi kerusuhan pemerintah Kota Surakarta masih memberikan toleransi bagi wajib retribusi.

7.2. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan maupun kesimpulan di atas, maka ada beberapa implikasi yang dapat diberikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta yaitu sebagai berikut :

1. Penghitungan kontribusi retribusi pasar adalah membandingkan penerimaan retribusi pasar dengan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi pasar sesuai dengan target yang ada dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan pemeriksaan di lapangan agar dapat menjaring para wajib retribusi baru yang belum dikenai pemungutan sebelumnya.
2. Agar dapat tercapai penerimaan retribusi pasar yang elastis maka perlu adanya kerjasama antara pegawai retribusi dengan wajib retribusi dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar.
3. Penetapan target retribusi pasar untuk tahun-tahun mendatang mengacu pada perhitungan potensi yang dimiliki oleh obyek retribusi pasar, memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan mempertimbangkan secara cermat hambatan yang belum dapat dicarikan jalan keluarnya dalam pemungutan retribusi pasar, sehingga target yang ditetapkan merupakan target realistis.
4. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar, pemerintah daerah harus mempunyai ketegasan dalam memberikan sanksi ataupun denda bagi wajib retribusi maupun pegawai retribusi apabila melakukan pelanggaran terhadap pembayaran ataupun penyalahgunaan retribusi.

5. Untuk meningkatkan efektifitas penerimaan potensi retribusi pasar dapat dilakukan dengan penetapan target yang realistis dan menghindari penetapan target yang *under estimated*, melakukan pengawasan yang cukup terhadap para pegawai retribusi serta dengan memberi pelayanan pasar sehingga kewajiban membayar retribusi pasar terpenuhi.
6. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan retribusi pasar yang tinggi, maka kenaikan biaya pengelolaan perlu diimbangi dengan upaya peningkatan realisasi penerimaan retribusi pasar. Hal ini dilakukan melalui penataan kembali sistem pemungutan dan biaya pemungutan.

DAFTAR PUSTAKA

Deddy Supiady Bratakusumah dan Dadang Solihin (2001), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Devas, Nick (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia.

Garis-Garis Besar Haluan Negara, Tap. MPR RI No. IV/MPR/1999, Cetakan Pertama, Aneka Ilmu, Semarang.

Halim, Abdul (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah,* Edisi Pertama, UPP AMP YKPN.

Imaduddin, Dudi Mi'raz (2002), *Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok*, Tesis S2 (Tidak dipublikasikan), Program Pasca Sarjana, MEP UGM

Kesit, Bambang Prakosa (2003), *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta.

KJ. Davey (1988), *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Mangkusoebroto, Guritno (1993), *Ekonomi Publik*, Edisi 3,BPPE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Muqodim (1993), *Perpajakan Buku Satu*, UII Press, Ekonisia, Yogyakarta.

Paul Samuelson dan William Nordhaus (1995), *Ekonomi,* Jilid 2, Erlangga, Jakarta.

Salim, Agus (1986), *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Penerbit Pdan K, Universitas Terbuka.

Samudra, Azhari (1995), *Perpajakan Di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudarman, Ari (1997), *Teori Ekonomi Mikro*, BPFE, UGM.

Sudaryanto, Arief(1999), *Peran Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Potensinya di Kabupaten Demak*, Pasca Sarjana UGM, 1999

Suparmoko (2002), *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pengembangan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Syamsi, Ibnu (1993), *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.

Tjahyono, Andik Fajar (1996), *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah,* Pasca Sarjana (Tidak dipublikasikan), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wagner, Adolf (Terjemahan Ratmoko, SH) (1973), *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara.* Penerbit Jambatan.

LAMPIRAN

1. Perhitungan Pertumbuhan PAD

$$\Delta PAD = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun } 1994/1995 = \frac{12.976.839.669 - 10.712.520.425}{10.712.520.425} \times 100\% = 21,14\%$$

$$\text{Tahun } 1995/1996 = \frac{15.596.706.010 - 12.976.839.669}{12.976.839.669} \times 100\% = 20,19\%$$

$$\text{Tahun } 1996/1997 = \frac{17.166.180.584 - 15.596.706.010}{15.596.706.010} \times 100\% = 10,06\%$$

$$\text{Tahun } 1997/1998 = \frac{18.934.341.860 - 17.166.180.584}{17.166.180.584} \times 100\% = 16,13\%$$

$$\text{Tahun } 1998/1999 = \frac{17.499.535.724 - 18.934.341.860}{18.934.341.860} \times 100\% = -12,21\%$$

$$\text{Tahun } 1999/2000 = \frac{19.888.069.111 - 17.499.535.724}{17.499.535.724} \times 100\% = 13,65\%$$

$$\text{Tahun } 2000 = \frac{21.913.828.479 - 19.888.069.111}{19.888.069.111} \times 100\% = 10,19\%$$

$$\text{Tahun } 2001 = \frac{35.640.533.633 - 21.913.828.479}{21.913.828.479} \times 100\% = 62,64\%$$

$$\text{Tahun } 2002 = \frac{44.938.084.099 - 35.640.533.633}{35.640.533.633} \times 100\% = 26,09\%$$

$$\text{Tahun } 2003 = \frac{54.815.684.238 - 44.938.084.099}{44.938.084.099} \times 100\% = 21,98\%$$

2. Perhitungan Pertumbuhan Retribusi Pasar

$$\Delta RP = \frac{RP_t - RP_{t-1}}{RP_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun } 1994/1995 = \frac{2.723.391.345 - 2.436.880.515}{2.436.880.515} \times 100\% = 11,76\%$$

$$\text{Tahun } 1995/1996 = \frac{2.950.359.965 - 2.723.391.345}{2.723.391.345} \times 100\% = 8,33\%$$

$$\text{Tahun } 1996/1997 = \frac{3.150.613.181 - 2.950.359.965}{2.950.359.965} \times 100\% = 6,79\%$$

$$\text{Tahun } 1997/1998 = \frac{3.408.588.205 - 3.150.613.181}{3.150.613.181} \times 100\% = 8,19\%$$

$$\text{Tahun } 1998/1999 = \frac{2.898.057.575 - 3.408.588.205}{3.408.588.205} \times 100\% = -14,98\%$$

$$\text{Tahun } 1999/2000 = \frac{3.239.387.560 - 2.898.057.575}{2.898.057.575} \times 100\% = 11,78\%$$

$$\text{Tahun } 2000 = \frac{3.617.834.297 - 3.239.387.560}{3.239.387.560} \times 100\% = 11,68\%$$

$$\text{Tahun } 2001 = \frac{6.346.069.949 - 3.617.834.297}{3.617.834.297} \times 100\% = 75,41\%$$

$$\text{Tahun } 2002 = \frac{7.227.405.058 - 6.346.069.949}{6.346.069.949} \times 100\% = 13,89\%$$

$$\text{Tahun } 2003 = \frac{8.341.932.424 - 7.227.405.058}{7.227.405.058} \times 100\% = 15,42\%$$

3. Perhitungan Kontribusi Retribusi Pasar

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Tahun 1994/1995 = $\frac{2.723.391.345}{12.976.839.669} \times 100\% = 20,99\%$

Tahun 1995/1996 = $\frac{2.950.359.965}{15.596.706.010} \times 100\% = 18,92\%$

Tahun 1996/1997 = $\frac{3.150.613.181}{17.166.180.584} \times 100\% = 18,35\%$

Tahun 1997/1998 = $\frac{3.408.588.205}{18.934.341.860} \times 100\% = 18,01\%$

Tahun 1998/1999 = $\frac{2.898.057.575}{17.499.535.724} \times 100\% = 16,56\%$

Tahun 1999/2000 = $\frac{3.239.387.560}{19.888.069.111} \times 100\% = 16,29\%$

Tahun 2000 = $\frac{3.617.834.297}{21.913.828.479} \times 100\% = 16,51\%$

Tahun 2001 = $\frac{6.346.069.949}{35.640.533.633} \times 100\% = 17,81\%$

Tahun 2002 = $\frac{7.227.405.058}{44.938.084.099} \times 100\% = 16,08\%$

Tahun 2003 = $\frac{8.341.932.424}{54.815.684.238} \times 100\% = 15,22\%$

4. Perhitungan Elastisitas Retribusi Pasar

$$\in RPs = \frac{\Delta RPs}{\Delta PDRB}$$

$$\text{Tahun } 1995/1996 = \frac{8,33\%}{8,65\%} \times 0,96\%$$

$$\text{Tahun } 1996/1997 = \frac{6,79\%}{17,87\%} = 0,38\%$$

$$\text{Tahun } 1997/1998 = \frac{8,19\%}{4,22\%} = 1,94\%$$

$$\text{Tahun } 1998/1999 = \frac{-14,98}{-13,93} = 1,08\%$$

$$\text{Tahun } 1999/2000 = \frac{11,78\%}{1,44\%} = 8,18\%$$

$$\text{Tahun } 2000 = \frac{11,68\%}{4,15\%} = 2,81\%$$

$$\text{Tahun } 2001 = \frac{75,41\%}{3,93\%} = 19,19\%$$

$$\text{Tahun } 2002 = \frac{13,89\%}{5,32\%} = 2,61\%$$

$$\text{Tahun } 2003 = \frac{15,42\%}{6,46\%} = 2,39\%$$

5. Tingkat Upaya Pemungutan Retribusi Pasar

$$TingkatUpaya = \frac{Penerimaan\,Retribusi\,Pasar}{PDRB} \times 100\%$$

$$\text{Tahun } 1994/1995 = \frac{2.723.391.345}{1.073.359.778.000} \times 100\% = 0,25\%$$

$$\text{Tahun } 1995/1996 = \frac{2.950.359.965}{1.166.205.398.000} \times 100\% = 0,25\%$$

$$\text{Tahun } 1996/1997 = \frac{3.150.613.181}{1.374.559.010.000} \times 100\% = 0,23\%$$

$$\text{Tahun } 1997/1998 = \frac{3.408.588.205}{1.432.562.370.000} \times 100\% = 0,24\%$$

$$\text{Tahun } 1998/1999 = \frac{2.898.057.575}{1.233.018.440.000} \times 100\% = 0,24\%$$

$$\text{Tahun } 1999/2000 = \frac{3.239.387.560}{1.250.807.410.000} \times 100\% = 0,26\%$$

$$\text{Tahun } 2000 = \frac{3.617.834.297}{1.302.715.920.000} \times 100\% = 0,28\%$$

$$\text{Tahun } 2001 = \frac{6.346.069.949}{1.353.882.640.000} \times 100\% = 0,47\%$$

$$\text{Tahun } 2002 = \frac{7.227.405.058}{1.425.961.170.000} \times 100\% = 0,51\%$$

$$\text{Tahun } 2003 = \frac{8.341.932.424}{1.518.008.050.000} \times 100\% = 0,55\%$$

6. Perhitungan Efektifitas Retribusi Pasar

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Pasar}{Target\ Penerimaan\ Retribusi\ Pasar} \times\ 100\%$$

Tahun 1994/1995 $= \frac{2.723.391.345}{2.725.000.000} \times 100\% = 99,94\%$

Tahun 1995/1996 $= \frac{2.950.359.965}{2.943.000.000} \times 100\% = 100,25\%$

Tahun 1996/1997 $= \frac{3.150.613.181}{3.143.000.000} \times 100\% = 100,24\%$

Tahun 1997/1998 $= \frac{3.408.588.205}{3.400.000.000} \times 100\% = 100,25\%$

Tahun 1998/1999 $= \frac{2.898.057.575}{2.830.000.000} \times 100\% = 102,40\%$

Tahun 1999/2000 $= \frac{3.239.387.560}{3.167.500.000} \times 100\% = 102,27\%$

Tahun 2000 $= \frac{3.617.834.297}{3.433.696.000} \times 100\% = 105,36\%$

Tahun 2001 $= \frac{6.346.069.949}{5.360.000.000} \times 100\% = 118,40\%$

Tahun 2002 $= \frac{7.227.405.058}{7.200.000.000} \times 100\% = 100,38\%$

Tahun 2003 $= \frac{8.341.932.424}{7.983.000.000} \times 100\% = 104,50\%$

7. Perhitungan Efisiensi Retribusi Pasar

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Retribusi\ Pasar}{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Pasar} \times 100\%$$

Tahun 1994/1995 = $\frac{158.540.125}{2.723.391.345} \times 100\% = 5,82\%$

Tahun 1995/1996 = $\frac{169.723.100}{2.950.359.965} \times 100\% = 5,75\%$

Tahun 1996/1997 = $\frac{175.440.145}{3.150.613.181} \times 100\% = 5,57\%$

Tahun 1997/1998 = $\frac{180.356.250}{3.408.588.205} \times 100\% = 5,29\%$

Tahun 1998/1999 = $\frac{163.790.075}{2.898.057.575} \times 100\% = 5,65\%$

Tahun 1999/2000 = $\frac{171.975.000}{3.239.387.560} \times 100\% = 5,31\%$

Tahun 2000 = $\frac{180.870.150}{3.617.834.297} \times 100\% = 4,99\%$

Tahun 2001 = $\frac{298.877.025}{6.346.069.949} \times 100\% = 4,71\%$

Tahun 2002 = $\frac{370.466.900}{7.227.405.058} \times 100\% = 5,12\%$

Tahun 2003 = $\frac{446.471.450}{8.341.932.424} \times 100\% = 5,35\%$

8. Perhitungan Potensi Retribusi Pasar

Tahun 1994

1. Pasar Legi

Los $(890 \times 6 \times 155) \times 360 = 297.972.000$

Kios $(57 \times 12 \times 220) \times 360 = 54.172.800$

2. Pasar Klewer

Los $(40 \times 5 \times 155) \times 360 = 11.160.000$

Kios $(1.472 \times 9 \times 1.463) \times 360 = 6.977.456.640$

3. Pasar Singosaren

Los $(274 \times 5 \times 155) \times 360 = 76.446.000$

Kios $(45 \times 12 \times 205) \times 360 = 39.852.000$

4. Pasar Gede

Los $(530 \times 4 \times 145) \times 360 = 110.664.000$

Kios $(99 \times 12 \times 205) \times 360 = 87.674.400$

5. Pasar Harjodaksino

Los $(756 \times 4 \times 145) \times 360 = 157.852.800$

Kios $(54 \times 9 \times 205) \times 360 = 35.866.800$

6. Pasar Nusukan

Los $(312 \times 4 \times 145) \times 360 = 65.145.600$

Kios $(43 \times 12 \times 205) \times 360 = 38.080.800$

7. Pasar Rejosari

Los $(144 \times 6 \times 145) \times 360 = 35.769.600$

Kios $(23 \times 12 \times 140) \times 360 = 13.910.400$

8. Pasar Turisari

Los $(125 \times 4 \times 115) \times 360 = 20.700.000$

Kios $(15 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.072.000$

9. Pasar Purwosari

Los $(189 \times 4 \times 115) \times 360 = 31.298.400$

Kios $(16 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.676.800$

10. Pasar Sidodadi

Los $(131 \times 4 \times 115) \times 360 = 21.693.600$

Kios $(5 \times 12 \times 140) \times 360 = 3.024.000$

11. Pasar Kadipolo

Los $(215 \times 4 \times 115) \times 360 = 35.604.000$

Kios $(6 \times 9 \times 140) \times 360 = 2.721.600$

12. Pasar Ledoksari

Los $(43 \times 4 \times 115) \times 360 = 7.120.800$

Kios $(16 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.676.800$

13. Pasar Jebres

Los $(96\times4\times110)\times360=15.206.400$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

14. Pasar Tanggul

Los $(143\times5\times110)\times360=28.314.000$

Kios $(8\times9\times132)\times360=3.421.440$

15. Pasar Depok

Los $(113\times4\times110)\times360=17.899.200$

Kios -

16. Pasar Ayam

Los $(115\times4\times110)\times360=18.216.000$

Kios -

17. Pasar Kliwon

Los $(272\times6\times110)\times360=64.627.200$

Kios $(13\times12\times132)\times360=7.413.120$

18. Pasar Kabangan

Los $(97\times4\times110)\times360=15.364.800$

Kios $(15\times9\times132)\times360=6.415.200$

19. Pasar Windujenar

Los $(76\times5\times110)\times360=14.850.000$

Kios -

20. Pasar Kembang

Los $(75\times4\times110)\times360=11.880.000$

Kios $(19\times9\times132)\times360=8.125.920$

21. Pasar Mebel

Los $(65\times4\times110)\times360=10.296.000$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

22. Pasar Penumping

Los $(112\times5\times110)\times360=22.176.000$

Kios $(3\times9\times132)\times360=1.283.040$

23. Pasar Balapan

Los $(36\times5\times110)\times360=7.128.000$

Kios $(35\times9\times132)\times360=14.968.800$

24. Pasar Ngemplak

Los $(59\times5\times60)\times360=6.372.000$

Kios $(15\times9\times88)\times360=4.276.800$

25. Pasar Mojosongo

Los $(52\times5\times60)\times360=5.616.000$

Kios -

26. Pasar Bangunharjo

Los $(54\times4\times60)\times360=4.665.600$

Kios $(4\times9\times88)\times360=1.140.480$

27. Pasar Gading

Los $(97\times4\times60)\times360=8.380.800$

Kios $(18\times12\times88)\times360=6.842.880$

28. Pasar Sidomulyo

Los $(140\times4\times60)\times360=12.096.000$

Kios -

29. Pasar Sangkrah

Los $(140\times4\times60)\times360=12.096.000$

Kios $(4\times9\times88)\times360=1.140.480$

30. Pasar Tunggulsari

Los $(151\times4\times60)\times360=13.046.400$

Kios $(19\times12\times88)\times360=7.223.040$

31. Pasar Mojosongo Perumnas

Los $(128\times4\times50)\times360=9.216.000$

Kios $(2\times9\times73)\times360=473.040$

32. Pasar Joglo

Los $(83\times5\times50)\times360=7.470.000$

Kios -

33. Pasar Ngumbul

Los $(49 \times 5 \times 50) \times 360 = 4.410.000$

Kios $(10 \times 9 \times 73) \times 360 = 2.365.200$

34. Pasar Besi Tua

Los $(85 \times 6 \times 50) \times 360 = 9.180.000$

Kios -

Tahun 1995

1. Pasar Legi

Los $(1.025 \times 6 \times 155) \times 360 = 343.170.000$

Kios $(103 \times 12 \times 220) \times 360 = 97.891.200$

2. Pasar Klewer

Los $(40 \times 5 \times 155) \times 360 = 11.160.000$

Kios $(1.472 \times 9 \times 1.463) \times 360 = 6.977.456.640$

3. Pasar Singosaren

Los $(274 \times 5 \times 155) \times 360 = 76.446.000$

Kios $(45 \times 12 \times 205) \times 360 = 39.852.000$

4. Pasar Gede

Los $(530 \times 4 \times 145) \times 360 = 110.664.000$

Kios $(99 \times 12 \times 205) \times 360 = 87.674.400$

5. Pasar Harjodaksino

Los $(756 \times 4 \times 145) \times 360 = 157.852.800$

Kios $(54 \times 9 \times 205) \times 360 = 35.866.800$

6. Pasar Nusukan

Los $(312 \times 4 \times 145) \times 360 = 65.145.600$

Kios $(43 \times 12 \times 205) \times 360 = 38.080.800$

7. Pasar Rejosari

Los $(144 \times 6 \times 145) \times 360 = 35.769.600$

Kios $(23 \times 12 \times 140) \times 360 = 13.910.400$

8. Pasar Turisari

Los $(125 \times 4 \times 115) \times 360 = 20.700.000$

Kios $(15 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.072.000$

9. Pasar Purwosari

Los $(189 \times 4 \times 115) \times 360 = 31.298.400$

Kios $(16 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.676.800$

10. Pasar Sidodadi

Los $(131 \times 4 \times 115) \times 360 = 21.693.600$

Kios $(5 \times 12 \times 140) \times 360 = 3.024.000$

11. Pasar Kadipolo

Los $(215 \times 4 \times 115) \times 360 = 35.604.000$

Kios $(6 \times 9 \times 140) \times 360 = 2.721.600$

12. Pasar Ledoksari

Los $(43 \times 4 \times 115) \times 360 = 7.120.800$

Kios $(16 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.676.800$

13. Pasar Jebres

Los $(96\times4\times110)\times360=15.206.400$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

14. Pasar Tanggul

Los $(143\times5\times110)\times360=28.314.000$

Kios $(8\times9\times132)\times360=3.421.440$

15. Pasar Depok

Los $(113\times4\times110)\times360=17.899.200$

Kios -

16. Pasar Ayam

Los $(321\times4\times110)\times360=50.846.400$

Kios -

17. Pasar Kliwon

Los $(272\times6\times110)\times360=64.627.200$

Kios $(13\times12\times132)\times360=7.413.120$

18. Pasar Kabangan

Los $(132\times4\times110)\times360=20.908.800$

Kios $(46\times9\times132)\times360=19.673.280$

19. Pasar Windujenar

Los $(76\times5\times110)\times360=14.850.000$

Kios -

20. Pasar Kembang

Los $(75\times4\times110)\times360=11.880.000$

Kios $(19\times9\times132)\times360=8.125.920$

21. Pasar Mebel

Los $(65\times4\times110)\times360=10.296.000$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

22. Pasar Penumping

Los $(112\times5\times110)\times360=22.176.000$

Kios $(3\times9\times132)\times360=1.283.040$

23. Pasar Balapan

Los $(36\times5\times110)\times360=7.128.000$

Kios $(35\times9\times132)\times360=14.968.800$

24. Pasar Ngemplak

Los $(59\times5\times60)\times360=6.372.000$

Kios $(15\times9\times88)\times360=4.276.800$

25. Pasar Mojosongo

Los $(52\times5\times60)\times360=5.616.000$

Kios -

26. Pasar Bangunharjo

Los $(54\times4\times60)\times360=4.665.600$

Kios $(4\times9\times88)\times360=1.140.480$

27. Pasar Gading

Los $(218\times4\times60)\times360=18.835.200$

Kios $(18\times12\times88)\times360=6.842.880$

28. Pasar Sidomulyo

Los $(140\times4\times60)\times360=12.096.000$

Kios -

29. Pasar Sangkrah

Los $(140\times4\times60)\times360=12.096.000$

Kios $(4\times9\times88)\times360=1.140.480$

30. Pasar Tunggulsari

Los $(151\times4\times60)\times360=13.046.400$

Kios $(19\times12\times88)\times360=7.223.040$

31. Pasar Mojosongo Perumnas

Los $(128\times4\times50)\times360=9.216.000$

Kios $(2\times9\times73)\times360=473.040$

32. Pasar Joglo

Los $(83\times5\times50)\times360=7.470.000$

Kios -

33. Pasar Ngumbul

Los $(49 \times 5 \times 50) \times 360 = 4.410.000$

Kios $(10 \times 9 \times 73) \times 360 = 2.365.200$

34. Pasar Besi Tua

Los $(85 \times 6 \times 50) \times 360 = 9.180.000$

Kios -

Tahun 1996

1. Pasar Legi

Los $(1.025 \times 6 \times 155) \times 360 = 343.170.000$

Kios $(103 \times 12 \times 220) \times 360 = 97.891.200$

2. Pasar Klewer

Los $(40 \times 5 \times 155) \times 360 = 11.160.000$

Kios $(1.806 \times 9 \times 1.463) \times 360 = 8.560.656.720$

3. Pasar Singosaren

Los $(274 \times 5 \times 155) \times 360 = 76.446.000$

Kios $(45 \times 12 \times 205) \times 360 = 39.852.000$

4. Pasar Gede

Los $(530 \times 4 \times 145) \times 360 = 110.664.000$

Kios $(99 \times 12 \times 205) \times 360 = 87.674.400$

5. Pasar Harjodaksino

Los $(756 \times 4 \times 145) \times 360 = 157.852.800$

Kios $(54 \times 9 \times 205) \times 360 = 35.866.800$

6. Pasar Jongke

Los $(809 \times 4 \times 145) \times 360 = 168.919.200$

Kios $(82 \times 12 \times 205) \times 360 = 72.619.200$

7. Pasar Nusukan

Los $(312 \times 4 \times 145) \times 360 = 65.145.600$

Kios $(43 \times 12 \times 205) \times 360 = 38.080.800$

8. Pasar Rejosari

Los $(144 \times 6 \times 145) \times 360 = 35.769.600$

Kios $(23 \times 12 \times 140) \times 360 = 13.910.400$

9. Pasar Turisari

Los $(125 \times 4 \times 115) \times 360 = 20.700.000$

Kios $(15 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.072.000$

10. Pasar Purwosari

Los $(189 \times 4 \times 115) \times 360 = 31.298.400$

Kios $(16 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.676.800$

11. Pasar Sidodadi

Los $(131 \times 4 \times 115) \times 360 = 21.693.600$

Kios $(5 \times 12 \times 140) \times 360 = 3.024.000$

12. Pasar Kadipolo

Los $(215 \times 4 \times 115) \times 360 = 35.604.000$

Kios $(6 \times 9 \times 140) \times 360 = 2.721.600$

13. Pasar Ledoksari

Los $(43\times4\times115)\times360=7.120.800$

Kios $(16\times12\times140)\times360=9.676.800$

14. Pasar Jebres

Los $(96\times4\times110)\times360=15.206.400$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

15. Pasar Tanggul

Los $(143\times5\times110)\times360=28.314.000$

Kios $(8\times9\times132)\times360=3.421.440$

16. Pasar Depok

Los $(113\times4\times110)\times360=17.899.200$

Kios -

17. Pasar Ayam

Los $(321\times4\times110)\times360=50.846.400$

Kios -

18. Pasar Kliwon

Los $(272\times6\times110)\times360=64.627.200$

Kios $(13\times12\times132)\times360=7.413.120$

19. Pasar Kabangan

Los $(132\times4\times110)\times360=20.908.800$

Kios $(46\times9\times132)\times360=19.673.280$

20. Pasar Windujenar

Los $(185\times5\times110)\times360=36.630.000$

Kios -

21. Pasar Kembang

Los $(75\times4\times110)\times360=11.880.000$

Kios $(19\times9\times132)\times360=8.125.920$

22. Pasar Mebel

Los $(65\times4\times110)\times360=10.296.000$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

23. Pasar Penumping

Los $(112\times5\times110)\times360=22.176.000$

Kios $(3\times9\times132)\times360=1.283.040$

24. Pasar Balapan

Los $(36\times5\times110)\times360=7.128.000$

Kios $(35\times9\times132)\times360=14.968.800$

25. Pasar Ngemplak

Los $(59\times5\times60)\times360=6.372.000$

Kios $(15\times9\times88)\times360=4.276.800$

26. Pasar Mojosongo

Los $(116\times5\times60)\times360=12.528.000$

Kios -

27. Pasar Bangunharjo

Los $(54 \times 4 \times 60) \times 360 = 4.665.600$

Kios $(4 \times 9 \times 88) \times 360 = 1.140.480$

28. Pasar Gading

Los $(218 \times 4 \times 60) \times 360 = 18.835.200$

Kios $(18 \times 12 \times 88) \times 360 = 6.842.880$

29. Pasar Sidomulyo

Los $(140 \times 4 \times 60) \times 360 = 12.096.000$

Kios -

30. Pasar Sangkrah

Los $(140 \times 4 \times 60) \times 360 = 12.096.000$

Kios $(4 \times 9 \times 88) \times 360 = 1.140.480$

31. Pasar Tunggulsari

Los $(151 \times 4 \times 60) \times 360 = 13.046.400$

Kios $(19 \times 12 \times 88) \times 360 = 7.223.040$

32. Pasar Mojosongo Perumnas

Los $(128 \times 4 \times 50) \times 360 = 9.216.000$

Kios $(2 \times 9 \times 73) \times 360 = 473.040$

33. Pasar Joglo

Los $(83 \times 5 \times 50) \times 360 = 7.470.000$

Kios -

34. Pasar Ngumbul

Los $(49 \times 5 \times 50) \times 360 = 4.410.000$

Kios $(10 \times 9 \times 73) \times 360 = 2.365.200$

35. Pasar Besi Tua

Los $(165 \times 6 \times 50) \times 360 = 17.820.000$

Kios -

Tahun 1997

1. Pasar Legi

Los $(1.256 \times 6 \times 155) \times 360 = 420.508.800$

Kios $(153 \times 12 \times 220) \times 360 = 145.411.200$

2. Pasar Klewer

Los $(40 \times 5 \times 155) \times 360 = 11.160.000$

Kios $(2.016 \times 9 \times 1.463) \times 360 = 9.556.081.920$

3. Pasar Singosaren

Los $(331 \times 5 \times 155) \times 360 = 92.349.000$

Kios $(93 \times 12 \times 225) \times 360 = 90.396.000$

4. Pasar Gede

Los $(530 \times 4 \times 145) \times 360 = 110.664.000$

Kios $(99 \times 12 \times 205) \times 360 = 87.674.400$

5. Pasar Harjodaksino

Los $(756 \times 4 \times 145) \times 360 = 157.852.800$

Kios $(54 \times 9 \times 205) \times 360 = 35.866.800$

6. Pasar Jongke

Los $(809 \times 4 \times 145) \times 360 = 168.919.200$

Kios $(82 \times 12 \times 205) \times 360 = 72.619.200$

7. Pasar Nusukan

Los $(312 \times 4 \times 145) \times 360 = 65.145.600$

Kios $(43 \times 12 \times 205) \times 360 = 38.080.800$

8. Pasar Rejosari

Los $(144 \times 6 \times 145) \times 360 = 35.769.600$

Kios $(23 \times 12 \times 140) \times 360 = 13.910.400$

9. Pasar Turisari

Los $(245 \times 4 \times 115) \times 360 = 40.572.000$

Kios $(35 \times 12 \times 140) \times 360 = 21.168.000$

10. Pasar Purwosari

Los $(189 \times 4 \times 115) \times 360 = 31.298.400$

Kios $(16 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.676.800$

11. Pasar Sidodadi

Los $(131 \times 4 \times 115) \times 360 = 21.693.600$

Kios $(5 \times 12 \times 140) \times 360 = 3.024.000$

12. Pasar Kadipolo

Los $(439 \times 4 \times 115) \times 360 = 72.698.400$

Kios $(6 \times 9 \times 140) \times 360 = 2.721.600$

13. Pasar Ledoksari

Los $(43\times4\times115)\times360=7.120.800$

Kios $(16\times12\times140)\times360=9.676.800$

14. Pasar Jebres

Los $(96\times4\times110)\times360=15.206.400$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

15. Pasar Tanggul

Los $(143\times5\times110)\times360=28.314.000$

Kios $(8\times9\times132)\times360=3.421.440$

16. Pasar Depok

Los $(279\times4\times110)\times360=44.193.600$

Kios -

17. Pasar Ayam

Los $(321\times4\times110)\times360=50.846.400$

Kios -

18. Pasar Kliwon

Los $(272\times6\times110)\times360=64.627.200$

Kios $(13\times12\times132)\times360=7.413.120$

19. Pasar Kabangan

Los $(132\times4\times110)\times360=20.908.800$

Kios $(46\times9\times132)\times360=19.673.280$

20. Pasar Windujenar

Los $(185\times5\times110)\times360=36.630.000$

Kios -

21. Pasar Kembang

Los $(75\times4\times110)\times360=11.880.000$

Kios $(19\times9\times132)\times360=8.125.920$

22. Pasar Mebel

Los $(65\times4\times110)\times360=10.296.000$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

23. Pasar Penumping

Los $(112\times5\times110)\times360=22.176.000$

Kios $(3\times9\times132)\times360=1.283.040$

24. Pasar Balapan

Los $(36\times5\times110)\times360=7.128.000$

Kios $(35\times9\times132)\times360=14.968.800$

25. Pasar Ngemplak

Los $(59\times5\times60)\times360=6.372.000$

Kios $(15\times9\times88)\times360=4.276.800$

26. Pasar Mojosongo

Los $(116\times5\times60)\times360=12.528.000$

Kios -

27. Pasar Bangunharjo

Los $(54\times4\times60)\times360=4.665.600$

Kios $(4\times9\times88)\times360=1.140.480$

28. Pasar Gading

Los $(218\times4\times60)\times360=18.835.200$

Kios $(18\times12\times88)\times360=6.842.880$

29. Pasar Sidomulyo

Los $(140\times4\times60)\times360=12.096.000$

Kios -

30. Pasar Sangkrah

Los $(140\times4\times60)\times360=12.096.000$

Kios $(4\times9\times88)\times360=1.140.480$

31. Pasar Tunggulsari

Los $(151\times4\times60)\times360=13.046.400$

Kios $(19\times12\times88)\times360=7.223.040$

32. Pasar Mojosongo Perumnas

Los $(128\times4\times50)\times360=9.216.000$

Kios $(2\times9\times73)\times360=473.040$

33. Pasar Joglo

Los $(83\times5\times50)\times360=7.470.000$

Kios -

34. Pasar Ngumbul

Los $(49 \times 5 \times 50) \times 360 = 4.410.000$

Kios $(10 \times 9 \times 73) \times 360 = 2.365.200$

35. Pasar Besi Tua

Los $(165 \times 6 \times 50) \times 360 = 17.820.000$

Kios -

Tahun 1998

1. Pasar Legi

Los $(1.256 \times 6 \times 155) \times 360 = 420.508.800$

Kios $(153 \times 12 \times 220) \times 360 = 145.411.200$

2. Pasar Klewer

Los $(40 \times 5 \times 155) \times 360 = 11.160.000$

Kios $(2.016 \times 9 \times 1.463) \times 360 = 9.556.081.920$

3. Pasar Singosaren

Los $(331 \times 5 \times 155) \times 360 = 92.349.000$

Kios $(93 \times 12 \times 225) \times 360 = 90.396.000$

4. Pasar Gede

Los $(530 \times 4 \times 145) \times 360 = 110.664.000$

Kios $(99 \times 12 \times 205) \times 360 = 87.674.400$

5. Pasar Harjodaksino

Los $(975 \times 4 \times 145) \times 360 = 203.580.000$

Kios $(54 \times 9 \times 205) \times 360 = 35.866.800$

6. Pasar Jongke

Los $(809 \times 4 \times 145) \times 360 = 168.919.200$

Kios $(82 \times 12 \times 205) \times 360 = 72.619.200$

7. Pasar Nusukan

Los $(408 \times 4 \times 145) \times 360 = 85.190.400$

Kios $(77 \times 12 \times 205) \times 360 = 68.191.200$

8. Pasar Rejosari

Los $(144 \times 6 \times 145) \times 360 = 35.769.600$

Kios $(23 \times 12 \times 140) \times 360 = 13.910.400$

9. Pasar Turisari

Los $(245 \times 4 \times 115) \times 360 = 40.572.000$

Kios $(35 \times 12 \times 140) \times 360 = 21.168.000$

10. Pasar Purwosari

Los $(189 \times 4 \times 115) \times 360 = 31.298.400$

Kios $(16 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.676.800$

11. Pasar Sidodadi

Los $(131 \times 4 \times 115) \times 360 = 21.693.600$

Kios $(5 \times 12 \times 140) \times 360 = 3.024.000$

12. Pasar Kadipolo

Los $(439 \times 4 \times 115) \times 360 = 72.698.400$

Kios $(6 \times 9 \times 140) \times 360 = 2.721.600$

13. Pasar Ledoksari

Los $(43 \times 4 \times 115) \times 360 = 7.120.800$

Kios $(16 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.676.800$

14. Pasar Jebres

Los $(96 \times 4 \times 110) \times 360 = 15.206.400$

Kios $(18 \times 12 \times 132) \times 360 = 10.264.320$

15. Pasar Tanggul

Los $(143 \times 5 \times 110) \times 360 = 28.314.000$

Kios $(8 \times 9 \times 132) \times 360 = 3.421.440$

16. Pasar Depok

Los $(279 \times 4 \times 110) \times 360 = 44.193.600$

Kios -

17. Pasar Ayam

Los $(321 \times 4 \times 110) \times 360 = 50.846.400$

Kios -

18. Pasar Kliwon

Los $(351 \times 6 \times 110) \times 360 = 83.397.600$

Kios $(13 \times 12 \times 132) \times 360 = 7.413.120$

19. Pasar Kabangan

Los $(132 \times 4 \times 110) \times 360 = 20.908.800$

Kios $(46 \times 9 \times 132) \times 360 = 19.673.280$

20. Pasar Windujenar

Los $(185 \times 5 \times 110) \times 360 = 36.630.000$

Kios -

21. Pasar Kembang

Los $(75 \times 4 \times 110) \times 360 = 11.880.000$

Kios $(19 \times 9 \times 132) \times 360 = 8.125.920$

22. Pasar Mebel

Los $(65 \times 4 \times 110) \times 360 = 10.296.000$

Kios $(18 \times 12 \times 132) \times 360 = 10.264.320$

23. Pasar Penumping

Los $(112 \times 5 \times 110) \times 360 = 22.176.000$

Kios $(3 \times 9 \times 132) \times 360 = 1.283.040$

24. Pasar Balapan

Los $(36 \times 5 \times 110) \times 360 = 7.128.000$

Kios $(35 \times 9 \times 132) \times 360 = 14.968.800$

25. Pasar Ngemplak

Los $(59 \times 5 \times 60) \times 360 = 6.372.000$

Kios $(15 \times 9 \times 88) \times 360 = 4.276.800$

26. Pasar Mojosongo

Los $(116 \times 5 \times 60) \times 360 = 12.528.000$

Kios -

27. Pasar Bangunharjo

Los $(54 \times 4 \times 60) \times 360 = 4.665.600$

Kios $(4 \times 9 \times 88) \times 360 = 1.140.480$

28. Pasar Gading

Los $(218 \times 4 \times 60) \times 360 = 18.835.200$

Kios $(18 \times 12 \times 88) \times 360 = 6.842.880$

29. Pasar Sidomulyo

Los $(140 \times 4 \times 60) \times 360 = 12.096.000$

Kios -

30. Pasar Sangkrah

Los $(140 \times 4 \times 60) \times 360 = 12.096.000$

Kios $(4 \times 9 \times 88) \times 360 = 1.140.480$

31. Pasar Tunggulsari

Los $(151 \times 4 \times 60) \times 360 = 13.046.400$

Kios $(19 \times 12 \times 88) \times 360 = 7.223.040$

32. Pasar Mojosongo Perumnas

Los $(128 \times 4 \times 50) \times 360 = 9.216.000$

Kios $(2 \times 9 \times 73) \times 360 = 473.040$

33. Pasar Joglo

Los $(83 \times 5 \times 50) \times 360 = 7.470.000$

Kios -

34. Pasar Ngumbul

Los $(49 \times 5 \times 50) \times 360 = 4.410.000$

Kios $(10 \times 9 \times 73) \times 360 = 2.365.200$

35. Pasar Besi Tua

Los $(165 \times 6 \times 50) \times 360 = 17.820.000$

Kios -

Tahun 1999

1. Pasar Legi

Los $(1.360 \times 6 \times 155) \times 360 = 455.328.000$

Kios $(184 \times 12 \times 220) \times 360 = 174.873.600$

2. Pasar Klewer

Los $(40 \times 5 \times 155) \times 360 = 11.160.000$

Kios $(2.066 \times 9 \times 1463) \times 360 = 9.793.087.920$

3. Pasar Singosaren

Los $(331 \times 5 \times 155) \times 360 = 92.349.000$

Kios $(93 \times 12 \times 225) \times 360 = 90.396.000$

4. Pasar Gede

Los $(530 \times 4 \times 145) \times 360 = 110.664.000$

Kios $(99 \times 12 \times 205) \times 360 = 87.674.400$

5. Pasar Harjodaksino

Los $(975 \times 4 \times 145) \times 360 = 203.580.000$

Kios $(54 \times 9 \times 205) \times 360 = 35.866.800$

6. Pasar Jongke

Los $(809 \times 4 \times 145) \times 360 = 168.919.200$

Kios $(82 \times 12 \times 205) \times 360 = 72.619.200$

7. Pasar Nusukan

Los $(408 \times 4 \times 145) \times 360 = 85.190.400$

Kios $(77 \times 12 \times 205) \times 360 = 68.191.200$

8. Pasar Rejosari

Los $(144 \times 6 \times 145) \times 360 = 35.769.600$

Kios $(23 \times 12 \times 140) \times 360 = 13.910.400$

9. Pasar Turisari

Los $(245 \times 4 \times 115) \times 360 = 40.572.000$

Kios $(35 \times 12 \times 140) \times 360 = 21.168.000$

10. Pasar Purwosari

Los $(189 \times 4 \times 115) \times 360 = 31.298.400$

Kios $(16 \times 12 \times 140) \times 360 = 9.676.800$

11. Pasar Sidodadi

Los $(131 \times 4 \times 115) \times 360 = 21.693.600$

Kios $(5 \times 12 \times 140) \times 360 = 3.024.000$

12. Pasar Kadipolo

Los $(439 \times 4 \times 115) \times 360 = 72.698.400$

Kios $(6 \times 9 \times 140) \times 360 = 2.721.600$

13. Pasar Ledoksari

Los $(43\times4\times115)\times360=7.120.800$

Kios $(16\times12\times140)\times360=9.676.800$

14. Pasar Jebres

Los $(96\times4\times110)\times360=15.206.400$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

15. Pasar Tanggul

Los $(143\times5\times110)\times360=28.314.000$

Kios $(8\times9\times132)\times360=3.421.440$

16. Pasar Depok

Los $(279\times4\times110)\times360=44.193.600$

Kios -

17. Pasar Ayam

Los $(321\times4\times110)\times360=50.846.400$

Kios -

18. Pasar Kliwon

Los $(351\times6\times110)\times360=83.397.600$

Kios $(13\times12\times132)\times360=7.413.120$

19. Pasar Kabangan

Los $(132\times4\times110)\times360=20.908.800$

Kios $(46\times9\times132)\times360=19.673.280$

20. Pasar Windujenar

Los $(185\times5\times110)\times360=36.630.000$

Kios -

21. Pasar Kembang

Los $(75\times4\times110)\times360=11.880.000$

Kios $(19\times9\times132)\times360=8.125.920$

22. Pasar Mebel

Los $(65\times4\times110)\times360=10.296.000$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

23. Pasar Penumping

Los $(112\times5\times110)\times360=22.176.000$

Kios $(3\times9\times132)\times360=1.283.040$

24. Pasar Balapan

Los $(36\times5\times110)\times360=7.128.000$

Kios $(35\times9\times132)\times360=14.968.800$

25. Pasar Ngemplak

Los $(59\times5\times60)\times360=6.372.000$

Kios $(15\times9\times88)\times360=4.276.800$

26. Pasar Mojosongo

Los $(116\times5\times60)\times360=12.528.000$

Kios -

27. Pasar Bangunharjo

Los $(54\times4\times60)\times360=4.665.600$

Kios $(4\times9\times88)\times360=1.140.480$

28. Pasar Gading

Los $(218\times4\times60)\times360=18.835.200$

Kios $(18\times12\times88)\times360=6.842.880$

29. Pasar Sidomulyo

Los $(140\times4\times60)\times360=12.096.000$

Kios -

30. Pasar Sangkrah

Los $(140\times4\times60)\times360=12.096.000$

Kios $(4\times9\times88)\times360=1.140.480$

31. Pasar Tunggulsari

Los $(151\times4\times60)\times360=13.046.400$

Kios $(19\times12\times88)\times360=7.223.040$

32. Pasar Mojosongo Perumnas

Los $(128\times4\times50)\times360=9.216.000$

Kios $(2\times9\times73)\times360=473.040$

33. Pasar Joglo

Los $(83\times5\times50)\times360=7.470.000$

Kios -

34. Pasar Ngumbul

Los $(49 \times 5 \times 50) \times 360 = 4.410.000$

Kios $(10 \times 9 \times 73) \times 360 = 2.365.200$

35. Pasar Besi Tua

Los $(165 \times 6 \times 50) \times 360 = 17.820.000$

Kios -

Tahun 2000

1. ***Pasar Legi***

   Los $(1.360 \times 6 \times 155) \times 360 = 455.328.000$

   Kios $(205 \times 12 \times 220) \times 360 = 194.832.000$

2. ***Pasar Klewer***

   Los $(40 \times 5 \times 155) \times 360 = 11.160.000$

   Kios $(2.275 \times 9 \times 1463) \times 360 = 10.783.773.000$

3. ***Pasar Singosaren***

   Los -

   Kios $(243 \times 12 \times 225) \times 360 = 236.196.000$

4. ***Pasar Harjodaksino***

   Los $(975 \times 4 \times 145) \times 360 = 203.580.000$

   Kios $(56 \times 9 \times 205) \times 360 = 37.195.200$

5. ***Pasar Jongke***

   Los $(237 \times 4 \times 145) \times 360 = 49.485.600$

   Kios $(9 \times 12 \times 205) \times 360 = 7.970.400$

6. ***Pasar Nusukan***

   Los $(459 \times 4 \times 145) \times 360 = 95.839.200$

   Kios $(79 \times 12 \times 205) \times 360 = 69.962.400$

7. ***Pasar Rejosari***

Los $(153\times6\times115)\times360=38.005.200$

Kios $(24\times12\times140)\times360=14.515.200$

8. ***Pasar Turisari***

Los $(252\times4\times115)\times360=41.731.200$

Kios $(36\times12\times140)\times360=21.772.800$

9. ***Pasar Purwasari***

Los $(736\times4\times115)\times360=121.881.600$

Kios $(104\times12\times140)\times360=62.899.200$

10. ***Pasar Sidodadi***

Los $(321\times4\times115)\times360=53.157.600$

Kios -

11. ***Pasar Kadipolo***

Los $(449\times4\times115)\times360=74.354.400$

Kios $(6\times9\times140)\times360=2.721.600$

12. ***Pasar Ledoksari***

Los $(43\times4\times115)\times360=7.120.800$

Kios $(16\times12\times140)\times360=9.676.800$

13. Pasar Jebres

Los $(59\times4\times110)\times360=9.345.600$

Kios $(15\times12\times132)\times360=8.553.600$

14. Pasar Tanggul

Los $(146\times5\times110)\times360=28.908.000$

Kios $(8\times9\times132)\times360=3.421.440$

15. Pasar Depok

Los $(279\times4\times110)\times360=44.193.600$

Kios -

16. Pasar Ayam

Los $(351\times4\times110)\times360=55.598.400$

Kios $(13\times12\times132)\times360=7.413.120$

17. Pasar Kliwon

Los $(140\times6\times110)\times360=33.264.000$

Kios $(4\times12\times132)\times360=2.280.960$

18. Pasar Kabangan

Los $(112\times4\times110)\times360=17.740.800$

Kios $(4\times9\times132)\times360=1.710.720$

19. Pasar Windujenar

Los $(174\times5\times110)\times360=34.452.000$

Kios -

20. Pasar Kembang

Los $(75\times4\times110)\times360=11.880.000$

Kios $(19\times9\times132)\times360=8.125.920$

21. Pasar Mebel

Los $(66\times4\times110)\times360=10.454.400$

Kios $(18\times12\times132)\times360=10.264.320$

22. Pasar Penumping

Los $(204\times5\times110)\times360=40.392.000$

Kios $(16\times9\times132)\times360=6.842.880$

23. Pasar Balapan

Los $(151\times5\times110)\times360=29.898.000$

Kios $(19\times9\times132)\times360=8.125.920$

24. Pasar Ngemplak

Los $(150\times5\times60)\times360=16.200.000$

Kios -

25. Pasar Mojosongo

Los $(128\times5\times60)\times360=13.824.000$

Kios $(2\times9\times88)\times360=570.240$

26. Pasar Bangunharjo

Los $(218\times4\times60)\times360=18.835.200$

Kios $(24\times9\times88)\times360=6.842.880$

27. Pasar Gading

Los $(253\times4\times60)\times360=21.859.200$

Kios -

28. Pasar Sidomulyo

Los $(65\times6\times60)\times360=8.424.000$

Kios $(23\times9\times88)\times360=6.557.760$

29. Pasar Sangkrah

Los $(106\times4\times60)\times360=9.158.400$

Kios $(18\times9\times88)\times360=5.132.160$

30. Pasar Tunggulsari

Los $(46\times12\times88)\times360=12.096.000$

Kios $(46\times12\times88)\times360=17.487.360$

31. Pasar Mojosongo Perumnas

Los $(57\times4\times50)\times360=4.104.000$

Kios -

32. Pasar Bambu

Los $(49\times5\times50)\times360=4.410.000$

Kios $(11\times9\times73)\times360=2.601.720$

33. Pasar Ngumbul

Los $(54 \times 5 \times 50) \times 360 = 4.860.000$

Kios $(4 \times 9 \times 73) \times 360 = 946.080$

34. Pasar Besi Tua

Los -

Kios $(35 \times 12 \times 73) \times 360 = 11.037.600$

Tahun 2001

1. ***Pasar Legi***

   Los $(1.380 \times 6 \times 207) \times 360 = 617.025.600$

   Kios $(188 \times 12 \times 330) \times 360 = 268.012.800$

2. ***Pasar Klewer***

   Los $(40 \times 5 \times 207) \times 360 = 14.904.000$

   Kios $(2.206 \times 9 \times 1910) \times 360 = 13.651.610.400$

3. ***Pasar Singosaren***

   Los -

   Kios $(243 \times 12 \times 720) \times 360 = 755.827.200$

4. ***Pasar Gede***

   Los $(583 \times 4 \times 192) \times 360 = 161.187.840$

   Kios $(112 \times 12 \times 307,5) \times 360 = 148.780.800$

5. ***Pasar Harjodaksino***

   Los $(976 \times 4 \times 192) \times 360 = 269.844.480$

   Kios $(53 \times 9 \times 307,5) \times 360 = 52.803.900$

6. ***Pasar Jongke***

   Los $(809 \times 4 \times 192) \times 360 = 223.672.320$

   Kios $(97 \times 12 \times 307,5) \times 360 = 128.854.800$

7. ***Pasar Nusukan***

Los $(448\times4\times192)\times360=123.863.040$

Kios $(78\times12\times307,5)\times360=103.615.200$

8. ***Pasar Rejosari***

Los $(152\times6\times155)\times360=50.889.600$

Kios $(24\times12\times212,5)\times360=22.032.000$

9. ***Pasar Turisari***

Los $(252\times4\times155)\times360=56.246.400$

Kios $(36\times12\times212,5)\times360=33.048.000$

10. ***Pasar Purwosari***

Los $(195\times4\times155)\times360=43.524.000$

Kios $(16\times12\times212,5)\times360=14.688.000$

11. ***Pasar Sidodadi***

Los $(237\times4\times155)\times360=52.898.400$

Kios $(14\times12\times212,5)\times360=12.852.000$

12. ***Pasar Kadipolo***

Los $(439\times4\times155)\times360=97.984.800$

Kios $(5\times9\times212,5)\times360=3.442.500$

13. Pasar Ledoksari

Los $(38\times4\times155)\times360=8.481.600$

Kios $(16\times12\times212,5)\times360=14.688.000$

14. Pasar Jebres

Los $(85\times4\times147)\times360=17.992.800$

Kios $(18\times12\times197,5)\times360=15.357.600$

15. Pasar Tanggul

Los $(146\times5\times147)\times360=38.631.600$

Kios $(8\times9\times197,5)\times360=5.119.200$

16. Pasar Depok

Los $(279\times4\times147)\times360=59.058.720$

Kios -

17. Pasar Ayam

Los $(321\times4\times147)\times360=67.949.280$

Kios -

18. Pasar Kliwon

Los $(378\times6\times147)\times360=120.022.560$

Kios $(13\times12\times197,5)\times360=11.091.600$

19. Pasar Kabangan

Los $(140\times4\times147)\times360=29.635.200$

Kios $(40\times9\times197,5)\times360=25.596.000$

20. Pasar Windujenar

Los $(181\times5\times147)\times360=47.892.600$

Kios -

21. Pasar Kembang

Los $(70\times4\times147)\times360=14.817.600$

Kios $(17\times9\times197,5)\times360=10.878.300$

22. Pasar Mebel

Los $(65\times4\times147)\times360=13.759.200$

Kios $(18\times9\times197,5)\times360=11.518.200$

23. Pasar Penumping

Los $(112\times5\times147)\times360=29.635.200$

Kios -

24. Pasar Balapan

Los -

Kios $(35\times9\times197,5)\times360=22.396.500$

25. Pasar Ngemplak

Los $(59\times5\times100)\times360=10.620.000$

Kios $(14\times9\times135)\times360=6.123.600$

26. Pasar Mojosongo

Los $(96\times5\times100)\times360=17.280.000$

Kios -

27. Pasar Bangunharjo

Los $(45\times4\times100)\times360=6.480.000$

Kios $(4\times12\times135)\times360=2.332.800$

28. Pasar Gading

Los $(166\times6\times100)\times360=35.856.000$

Kios $(20\times9\times135)\times360=8.748.000$

29. Pasar Sidomulyo

Los $(157\times6\times100)\times360=12.312.000$

Kios -

30. Pasar Sangkrah

Los $(140\times4\times100)\times360=20.160.000$

Kios -

31. Pasar Buah Jurug

Los -

Kios $(36\times9\times135)\times360=15.746.400$

32. Pasar Dawung

Los -

Kios $(6\times9\times135)\times360=2.624.400$

33. Pasar Tunggulsari

Los $(145\times4\times100)\times360=20.880.000$

Kios $(20\times12\times135)\times360=11.664.000$

34. Pasar Mojosongo Perumnas

Los $(133\times4\times85)\times360=16.279.200$

Kios $(2\times9\times115)\times360=745.200$

35. Pasar Joglo

Los $(52\times5\times85)\times360=7.956.000$

Kios $(38\times9\times115)\times360=4.098.600$

36. Pasar Ngumbul

Los $(48\times5\times85)\times360=7.344.000$

Kios $(11\times9\times115)\times360=4.098.600$

37. Pasar Besi Tua

Los $(255\times6\times85)\times360=46.818.000$

Kios -

Tahun 2002

1. ***Pasar Legi***

   Los $(1.380 \times 6 \times 207) \times 360 = 617.025.600$

   Kios $(205 \times 12 \times 330) \times 360 = 292.248.000$

2. ***Pasar klewer***

   Los $(48 \times 5 \times 207) \times 360 = 17.884.800$

   Kios $(2.223 \times 9 \times 1.910) \times 360 = 13.756.813.200$

3. ***Pasar Singosaren***

   Los -

   Kios $(255 \times 12 \times 720) \times 360 = 793.152.000$

4. ***Pasar Gede***

   Los $(619 \times 4 \times 192) \times 360 = 171.141.120$

   Kios $(106 \times 12 \times 307,5) \times 360 = 140.810.400$

5. ***Pasar Harjodaksino***

   Los $(832 \times 4 \times 192) \times 360 = 230.031.360$

   Kios $(63 \times 9 \times 307,5) \times 360 = 62.766.900$

6. ***Pasar Jongke***

   Los $(863 \times 4 \times 192) \times 360 = 238.602.240$

   Kios $(99 \times 12 \times 307,5) \times 360 = 131.511.600$

7. Pasar Nusukan

Los $(499\times4\times192)\times360=137.963.520$

Kios $(80\times12\times307,5)\times360=106.272.000$

8. Pasar Rejosari

Los $(163\times6\times155)\times360=54.572.400$

Kios $(24\times12\times212,5)\times360=22.032.000$

9. Pasar Turisari

Los $(253\times4\times155)\times360=56.469.600$

Kios $(36\times12\times212,5)\times360=33.048.000$

10. Pasar Purwosari

Los $(190\times4\times155)\times360=42.408.000$

Kios $(14\times12\times212,5)\times360=12.852.000$

11. Pasar Sidodadi

Los $(274\times4\times155)\times360=61.156.800$

Kios $(14\times12\times212,5)\times360=12.852.000$

12. Pasar Kadipolo

Los $(429\times4\times155)\times360=95.752.800$

Kios $(7\times9\times212,5)\times360=4.819.500$

13. Pasar Ledoksari

Los $(34\times4\times155)\times360=7.588.800$

Kios $(20\times12\times212,5)\times360=18.360.000$

14. Pasar Jebres

Los $(79\times4\times147)\times360=16.722.720$

Kios $(19\times12\times197,5)\times360=16.210.800$

15. Pasar Tanggul

Los $(128\times5\times147)\times360=33.868.800$

Kios $(9\times9\times197,5)\times360=5.759.100$

16. Pasar Depok

Los $(275\times4\times147)\times360=58.212.000$

Kios -

17. Pasar Ayam

Los $(321\times4\times147)\times360=67.949.280$

Kios -

18. Pasar Kliwon

Los $(354\times6\times147)\times360=112.402.080$

Kios $(13\times12\times197,5)\times360=11.091.600$

19. Pasar Kabangan

Los $(148\times4\times147)\times360=31.328.640$

Kios $(44\times9\times197,5)\times360=28.155.600$

20. Pasar Windujenar

Los $(190\times5\times147)\times360=50.274.000$

Kios -

21. Pasar Kembang

Los $(80\times4\times147)\times360=16.934.400$

Kios $(20\times9\times197,5)\times360=12.798.000$

22. Pasar Mebel

Los $(67\times4\times147)\times360=14.182.560$

Kios $(18\times12\times197,5)\times360=15.357.600$

23. Pasar Penumping

Los $(114\times5\times147)\times360=30.164.400$

Kios $(2\times9\times197,5)\times360=1.279.800$

24. Pasar Balapan

Los $(162\times5\times147)\times360=42.865.200$

Kios $(35\times9\times197,5)\times360=22.396.500$

25. Pasar Ngemplak

Los $(58\times5\times100)\times360=10.440.000$

Kios $(14\times9\times135)\times360=6.123.600$

26. Pasar Mojosongo

Los $(128\times5\times100)\times360=23.040.000$

Kios -

27. Pasar Bangunharjo

Los $(46\times4\times100)\times360=6.624.000$

Kios $(5\times9\times135)\times360=2.187.000$

28. Pasar Gading

Los $(196\times4\times100)\times360=28.224.000$

Kios $(33\times12\times135)\times360=19.245.600$

29. Pasar Sidomulyo

Los $(58\times6\times100)\times360=12.528.000$

Kios -

30. Pasar Sangkrah

Los $(140\times4\times100)\times360=20.160.000$

Kios -

31. Pasar Buah Jurug

Los -

Kios $(36\times9\times135)\times360=15.746.400$

32. Pasar Dawung

Los -

Kios $(6\times9\times135)\times360=2.624.400$

33. Pasar Tunggulsari

Los $(145\times4\times100)\times360=20.880.000$

Kios $(20\times12\times135)\times360=11.664.000$

34. Pasar Mojosongo Perumnas

Los $(133 \times 4 \times 85) \times 360 = 16.279.200$

Kios $(3 \times 9 \times 115) \times 360 = 1.117.800$

35. Pasar Joglo

Los $(62 \times 5 \times 85) \times 360 = 9.486.000$

Kios $(38 \times 9 \times 115) \times 360 = 14.158.800$

36. Pasar Ngumbul

Los $(48 \times 5 \times 85) \times 360 = 7.344.000$

Kios $(11 \times 9 \times 115) \times 360 = 4.098.600$

37. Pasar Besi Tua

Los $(255 \times 6 \times 85) \times 360 = 46.818.000$

Kios -

Tahun 2003

1. ***Pasar Legi***

   Los $(1.380 \times 6 \times 207) \times 360 = 617.025.600$

   Kios $(205 \times 12 \times 330) \times 360 = 292.248.000$

2. ***Pasar Klewer***

   Los $(48 \times 5 \times 207) \times 360 = 17.884.800$

   Kios $(2.223 \times 9 \times 1910) \times 360 = 13.756.813.200$

3. ***Pasar Singosaren***

   Los -

   Kios $(255 \times 12 \times 720) \times 360 = 793.152.000$

4. ***Pasar Gede***

   Los $(619 \times 4 \times 192) \times 360 = 171.141.120$

   Kios $(106 \times 12 \times 307,5) \times 360 = 140.810.400$

5. ***Pasar Harjodaksino***

   Los $(832 \times 4 \times 192) \times 360 = 230.031.360$

   Kios $(63 \times 9 \times 307,5) \times 360 = 62.766.900$

6. ***Pasar Jongke***

   Los $(863 \times 4 \times 192) \times 360 = 238.602.240$

   Kios $(99 \times 12 \times 307,5) \times 360 = 131.511.600$

7. ***Pasar Nusukan***

Los $(499 \times 4 \times 192) \times 360 = 137.963.520$

Kios $(80 \times 12 \times 307,5) \times 360 = 106.272.000$

8. ***Pasar Rejosari***

Los $(163 \times 6 \times 155) \times 360 = 54.572.400$

Kios $(24 \times 12 \times 212,5) \times 360 = 22.032.000$

9. ***Pasar Turisari***

Los $(253 \times 4 \times 155) \times 360 = 56.469.600$

Kios $(36 \times 12 \times 212,5) \times 360 = 33.048.000$

10. ***Pasar Purwosari***

Los $(190 \times 4 \times 155) \times 360 = 42.408.000$

Kios $(15 \times 12 \times 212,5) \times 360 = 13.770.000$

11. ***Pasar Sidodadi***

Los $(274 \times 4 \times 155) \times 360 = 61.156.800$

Kios $(15 \times 12 \times 212,5) \times 360 = 13.770.000$

12. ***Pasar Kadipolo***

Los $(429 \times 4 \times 155) \times 360 = 95.752.800$

Kios $(7 \times 9 \times 212,5) \times 360 = 4.819.500$

13. Pasar Ledoksari

Los $(34 \times 4 \times 155) \times 360 = 7.588.800$

Kios $(20 \times 12 \times 212,5) \times 360 = 18.360.000$

14. Pasar Jebres

Los $(79 \times 4 \times 147) \times 360 = 16.722.720$

Kios $(19 \times 12 \times 197,5) \times 360 = 16.210.800$

15. Pasar Tanggul

Los $(128 \times 5 \times 147) \times 360 = 33.868.800$

Kios $(9 \times 9 \times 197,5) \times 360 = 5.759.100$

16. Pasar Depok

Los $(275 \times 4 \times 147) \times 360 = 58.212.000$

Kios -

17. Pasar Ayam

Los $(321 \times 4 \times 147) \times 360 = 67.949.280$

Kios -

18. Pasar Kliwon

Los $(354 \times 6 \times 147) \times 360 = 112.402.080$

Kios $(14 \times 12 \times 197,5) \times 360 = 11.944.800$

19. Pasar Kabangan

Los $(148 \times 4 \times 147) \times 360 = 31.328.640$

Kios $(44 \times 9 \times 197,5) \times 360 = 28.155.600$

20. Pasar Windujenar

Los $(190 \times 5 \times 147) \times 360 = 50.274.000$

Kios -

21. Pasar Kembang

Los $(80 \times 4 \times 147) \times 360 = 16.934.400$

Kios $(20 \times 9 \times 197,5) \times 360 = 12.798.000$

22. Pasar Mebel

Los $(67 \times 4 \times 147) \times 360 = 14.182.560$

Kios $(18 \times 12 \times 197,5) \times 360 = 15.357.600$

23. Pasar Penumping

Los $(114 \times 5 \times 147) \times 360 = 30.164.400$

Kios $(3 \times 9 \times 197,5) \times 360 = 1.919.700$

24. Pasar Balapan

Los $(162 \times 5 \times 147) \times 360 = 42.865.200$

Kios $(35 \times 9 \times 197,5) \times 360 = 22.396.500$

25. Pasar Ngemplak

Los $(58 \times 5 \times 100) \times 360 = 10.440.000$

Kios $(14 \times 9 \times 135) \times 360 = 6.123.600$

26. Pasar Mojosongo

Los $(139 \times 5 \times 100) \times 360 = 25.020.000$

Kios -

27. Pasar Bangunharjo

Los $(46\times4\times100)\times360=6.624.000$

Kios $(5\times9\times135)\times360=2.187.000$

28. Pasar Gading

Los $(196\times4\times100)\times360=28.224.000$

Kios $(33\times12\times135)\times360=19.245.600$

29. Pasar Sidomulyo

Los $(58\times6\times100)\times360=12.528.000$

Kios -

30. Pasar Sangkrah

Los $(140\times4\times100)\times360=20.160.000$

Kios -

31. Pasar Buah Jurug

Los -

Kios $(36\times9\times135)\times360=15.746.400$

32. Pasar Dawung

Los -

Kios $(6\times9\times135)\times360=2.624.400$

33. Pasar Tunggulsari

Los $(145\times4\times100)\times360=20.880.000$

Kios $(20\times12\times135)\times360=11.664.000$

Kode Angg.	Uraian Penerimaan	Tahun Anggaran 1994/1995			Tahun Anggaran 1995/1996			Tahun Anggaran 1996/1997			Tahun Anggaran 1997/1998		
		Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.2.1.	**POS PAJAK DAERAH**												
.003	Pajak Potong Hewan	48.500.000	50.076.750	103,25	53.655.000	54.480.000,00	101,54	45.162.000	45.358.000	100,43	44.713.000	47.538.000	106,32
.004	Pajak Pembangunan I	1.175.000.000	1.178.441.073	100,29	1.615.000.000	1.617.094.351,00	100,13	1.960.000.000	1.969.411.402	100,48	2.520.000.000	2.535.272.198	100,61
.005	Pajak Radio	11.000.000	6.217.800	56,53	6.250.000	6.325.250,00	101,20	6.500.000	4.284.000	65,91	6.500.000	1.569.000	24,14
.006	Pajak Bangsa Asing	16.000.000	17.235.050	107,72	16.000.000	16.073.950,00	100,46	5.286.000	5.376.695	101,72	2.240.000	2.335.000	104,24
.008	Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum	570.000.000	703.835.995	123,48	700.000.000	863.220.263,00	123,32	657.500.000	748.765.975	113,88	700.000.000	707.644.105	101,09
.009	Pajak Reklame	230.000.000	230.123.944	100,05	265.000.000	265.362.595	100,14	260.000.000	272.548.975	104,83	360.000.000	369.936.988	102,76
.010	Pajak Anjing	4.500.000	4.565.500	101,46	7.000.000	7.000.500,00	100,01	7.500.000	5.228.000	69,71	7.500.000	3.100.000	41,33
.012	Pajak Penjualan Minuman yang mengandung alkohol	49.000	49.500	101,02	49.000	49.500,00	101,02	49.000	49.500	101,02	49.000	49.500	101,02
.013	Pajak Kend. Tdk Bermotor	29.500.000	29.570.850	100,24	29.500.000	29.504.150,00	100,01	29.500.000	29.552.000	100,18	29.500.000	19.023.000	64,48
.016	Pajak Penerangan Jalan	2.340.000.000	2.382.671.627	101,82	2.800.000.000	2.988.885.002,00	106,75	3.270.000.000	3.361.841.855	102,81	3.615.000.000	3.811.543.569	105,44
.017	Pajak Rumah Bola	20.000.000	20.655.000	103,28	22.000.000	22.110.000,00	100,50	22.500.000	22.600.000	100,44	39.600.000	34.140.000	86,21
.019	Pajak Pendaftaran Persh.	11.000.000	11.295.000	102,68	11.500.000	11.550.000,00	100,43	11.500.000	8.570.000	74,52	11.500.000	3.175.000	27,61
	Jumlah 1.2.1.	**4.455.549.000**	**4.634.738.089**	**104,02**	**5.525.954.000**	**5.881.655.561**	**106,44**	**6.275.497.000**	**6.473.586.402**	**103,16**	**7.336.602.000**	**7.535.326.360**	**102,71**
1.2.2.	**POS RETRIBUSI DAERAH.**												
.076	Uang Leges	344.450.000	382.221.045	110,97	270.850.000	343.687.096,00	126,89	321.372.000	338.702.416	105,39	334.566.000	329.806.186	98,58
.077	Uang Dispensasi Jl/Jembt.	125.000.000	129.199.750	103,36	130.000.000	136.330.000,00	104,87	142.000.000	154.996.250	109,15	150.000.000	148.909.500	99,27
.078	Uang Pangkalan/Parkir	671.875.000	706.122.400	105,10	748.475.000	783.415.200,00	104,67	815.475.000	846.231.350	103,77	1.020.000.000	1.021.640.050	100,16
.079	Uang Penambangan	2.500.000	3.284.167	131,37	4.000.000	4.700.250,00	117,51	4.500.000	4.731.795	105,15	3.000.000	3.145.250	104,84
.080	Uang Pemeriksaan/ Pembantaian	190.000.000	198.550.625	104,50	210.000.000	201.016.200,00	95,72	200.000.000	190.091.350	95,05	207.000.000	201.962.950	97,57
.081	Uang Sewa Tanah/Bang.	21.000.000	22.255.651	105,98	29.000.000	42.722.995,00	147,32	35.000.000	45.375.492	129,64	52.500.000	53.201.775	101,34
.082	Uang Sempadan/Ijin Bang.	750.000.000	753.064.700	100,41	890.000.000	806.224.550,00	90,59	800.000.000	814.326.250	101,79	880.000.000	988.549.150	112,34
.084	Uang Penguburan	32.000.000	38.272.400	119,60	32.000.000	50.146.900,00	156,71	33.000.000	43.535.000	131,92	34.000.000	47.452.800	139,57
.090	Sta. Bis dan Taxi/Terminal	1.310.000.000	1.403.642.080	107,15	1.808.000.000	1.900.633.885,00	105,12	2.228.000.000	2.229.034.775	100,05	2.233.000.000	2.226.104.033	99,69
.092	Tempat Rekreasi	91.830.000	102.510.914	111,63	108.468.000	141.870.925,00	130,80	129.844.000	136.952.863	105,47	139.650.000	202.627.555	145,10
.094	Pasar	2.725.000.000	2.723.391.345	99,94	2.943.000.000	2.950.359.965,00	100,25	3.143.000.000	3.150.613.181	100,24	3.400.000.000	3.408.588.205	100,25
.097	Pemeriksaan Susu	8.500.000	9.231.375	108,60	9.250.000	9.276.450,00	100,29	9.500.000	10.382.300	109,29	9.500.000	7.279.700	76,63
.098	Penerimaan Puskesmas	340.000.000	388.204.630	114,18	425.000.000	426.581.840,00	100,37	450.000.000	451.216.231	100,27	450.000.000	460.119.915	102,25
.100	Persewaan Gd/Kios/Toko	29.500.000	32.180.775	109,09	40.000.000	40.756.470,00	101,89	40.000.000	40.675.785	101,69	45.000.000	45.220.381	100,49

Kode Angg.	Uraian Penerimaan	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
											Tahun Anggaran 1997/1998		
.101	Persewaan Lapangan OR, rupa-rupa gedung/reklame	11.000.000,00	15.059.033,00	136,90	15.000.000	32.676.105	217,84	28.000.000	42.786.517	152,81	47.000.000	48.061.410	102,26
.109	Retribusi Kebersihan Kota (Sampah)	772.750.000	824.076.276	106,64	1.093.011.000	1.112.361.907,00	101,77	1.160.000.000	1.172.660.165	101,09	1.192.000.000	1.158.543.130	97,19
	Jumlah 1.2.2.	**7.425.405.000**	**7.731.267.166**		**8.756.054.000**	**8.982.760.738**	**102,59**	**9.539.691.000**	**9.672.311.720**		**10.197.216.000**	**10.351.211.990**	
1.2.3.	**POS BAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**												
.121	Bank Pemb. Daerah	54.225.000	54.225.259	100,00	54.225.000	63.487.880	117,08	63.487.000	93.864.609	147,85	116.380.000	116.380.798	100,00
.122	Persh. Daerah Air Minum	181.673.000	181.673.000	100,00	211.438.000	211.438.000,00	100,00	303.274.000	303.274.000	100,00	389.400.000	389.400.000	100,00
.123	PD. Bank Pasar	12.986.000	0	0,00	15.671.000	28.657.000,00	182,87	15.671.000	21.614.450	137,93	16.015.000	8.420.200	52,58
	Jumlah 1.2.3.	**248.884.000**	**235.898.259**		**281.334.000**	**303.582.880**	**107,91**	**382.432.000**	**418.753.059**		**521.795.000**	**514.200.998**	
1.2.4.	**POS PENERIMAAN DARI DINAS-DINAS.**												
.141	Penrmn. dr. Sekr. Daerah	105.000.000	105.457.500	100,44	110.000.000	92.828.500,00	84,39	107.500.000	110.816.500	103,09	115.000.000	116.630.500	101,42
.142	Penrmn. dr. DPU	35.000.000	53.780.770	153,66	39.750.000	44.767.050,00	112,62	39.750.000	39.584.300	99,58	39.750.000	34.376.875	86,48
.143	Penrmn. dr. Din. Perikanan	2.000.000	2.114.500	105,73	2.400.000	2.416.000,00	100,67	2.500.000	2.515.000	100,60	2.750.000	537.500	19,55
.144	Penrmn. dr. Din. Pariwisata	5.500.000	3.375.000	61,36	2.000.000	2.036.000,00	101,80	2.297.000	2.344.000	102,05	2.600.000	2.640.800	101,57
	Jumlah 1.2.4.	**147.500.000**	**164.727.770**		**154.150.000**	**142.047.550**	**92,15**	**152.047.000**	**155.259.800**		**160.100.000**	**154.185.675**	
1.2.5.	**POS PENERIMAAN LAIN-LAIN.**												
.181	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	-	-		-	-		-	-		32.438.000	32.438.000	100,00
.182	Penerimaan Persewaan Rumah Pemerintah	18.750.000	17.763.400	94,74	20.000.000	16.040.400,00	80,20	20.000.000	13.556.800	67,78	20.000.000	13.450.800	67,25
.183	Penerimaan Setoran Kembali Gaji/Upah	750.000	3.015.933	402,12	750.000	285.400,00	38,05	750.000	240.700	32,09	-	-	
.184	Penerimaan Dari Pengembalian Biaya Pemeliharaan Jln/Saluran akibat Penggunaan Asset PDAM	-	-		125.000.000	0.00	0,00	250.000.000	124.650.770	49,86	250.000.000	120.055.115	48,02
.185	Penerimaan Jasa Giro atas Simpanan Para Bendaharawan Daerah dan Kas Daerah.	-	-		35.000.000	96.696.023,00	276,27	80.000.000	136.244.873	170,31	80.000.000	85.579.063	106,97

Kode Angg.	Uraian Penerimaan	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
.186	Penerimaan Dari Cargo Terminal untuk Meng-angsur Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat.	125.000.000	125.000.000	100,00	125.000.000	125.000.000	100,00	125.000.000	125.000.000	100,00	75.000.000	50.000.000	66,67
.187	Hasil Penjualan Dokumen Lelang / Direksi keet	4.000.000	15.116.000	377,90	4.000.000	19.514.000,00	487,85	7.000.000	25.563.415	365,19	20.000.000	27.945.038	139,73
.188	Pengembalian Kredit - Koperasi	-	-								-	-	
.190	Penerimaan Lain-lain Yang Tidak Termasuk Bagian Lain.	26.000.000	49.313.052	189,67	6.000.000	29.123.458,00	485,39	10.000.000	21.013.045	210,13	34.500.000	49.948.821	144,78
	Jumlah 1.2.5.	**174.500.000**	**210.208.385**	**120,46**	**315.750.000**	**286.659.281**	**90,79**	**492.750.000**	**446.269.603**	**90,57**	**511.938.000**	**379.416.837**	**74,11**
	Jumlah PADS	**12.451.838.000**	**12.976.839.669**	**104,22**	**15.033.242.000**	**15.596.706.010**	**103,75**	**16.842.417.000**	**17.166.180.584**	**101,92**	**18.727.651.000**	**18.934.341.860**	**101,10**
1.3.1.	**POS BAGI HASIL PAJAK.**												
.191	Pajak Bumi dan Bangunan	3.057.520.000	3.160.091.401	103,35	3.291.000.000	3.787.128.223,00	115,08	3.939.253.000	4.745.213.185	120,46	4.976.170.000	5.066.460.666	101,81
.192	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Tingkat I (PKB-BBNKN).	972.945.000	1.456.519.000	149,70	1.340.638.000	1.392.168.327,00	103,84	1.914.058.000	1.914.058.000	100,00	1.675.063.000	2.062.420.750	123,12
	Jumlah 1.3.1.	**4.030.465.000**	**4.616.610.401**	**114,54**	**4.631.638.000**	**5.179.296.550**	**111,82**	**5.853.311.000**	**6.659.271.185**	**113,77**	**6.651.233.000**	**7.128.881.416**	**107,18**
1.3.2.	**POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK.**												
.201	Iuran Hasil Hutan (IHH)	14.300.000	13.401.626	93,72	15.730.000	14.842.054,00	94,36	16.500.000	18.550.834	112,43	18.000.000	14.807.563	82,26
.205	Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah	60.000.000	99.515.250	165,86	70.000.000	122.475.712,00	174,97	80.000.000	304.710.732	380,89	80.000.000	143.634.171	179,54
.208	Penerimaan Bagi Hasil dari Tingkat I	182.982.000	241.385.009	131,92	251.686.000	307.683.124,00	122,25	263.460.000	435.442.717	165,28	406.379.000	269.383.758	66,29
	Jumlah 1.3.2.	**257.282.000**	**354.301.885**	**137,71**	**337.416.000**	**445.000.890**	**131,88**	**359.960.000**	**758.704.283**	**210,77**	**504.379.000**	**427.825.492**	**84,82**
	Jumlah Total	**16.739.585.000**	**17.947.751.955**	**107,22**	**20.002.296.000**	**21.221.003.450**	**106,09**	**23.055.688.000**	**24.584.156.052**	**106,63**	**25.883.263.000**	**26.491.048.768**	**102,35**

Surakarta,

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

SUMARSONO, SE, MM
Pembina
NIP. 500 036 720

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDAPATAN

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN : 1998/1999 s/d 2000

Kode Anggaran	Uraian Penerimaan	Tahun Anggaran 1998/1999			Tahun Anggaran 1999/2000			Tahun Anggaran 2000		
		Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.2.1.	**POS PAJAK DAERAH**									
.004	Pajak Hotel dan Restoran	2.250.000.000	2.380.958.187	105,82	3.114.987.000	3.181.367.915,00	102,13	2.750.000.000	3.513.205.296	127,75
.005	Pajak Hiburan	561.000.000	593.745.214	105,84	565.000.000	612.507.097,50	108,41	620.000.000	620.733.616	100,12
.006	Pajak Reklame	290.000.000	323.120.978	111,42	365.000.000	412.153.974,50	112,92	569.000.000	569.423.035	100,07
.007	Pajak Penerangan Jalan	4.478.000.000	4.563.806.355	101,92	4.655.000.000	4.713.062.472,00	101,25	4.675.000.000	4.658.800.215	99,65
.009	Pajak Pemanfaatan A B T	40.000.000	41.781.365	104,45	220.000.000	235.543.395,00	107,07	250.078.000	250.374.500	100,12
	Jumlah 1.2.1.	7.619.000.000	7.903.412.099	104	8.919.987.000	9.154.634.854,00	102,63	8.864.078.000	9.612.536.662	108,44
1.2.2.	**POS RETRIBUSI DAERAH**									
.001	Ret. Pelayanan Kesehatan	520.000.000	500.930.600	96,33	900.000.000	1.035.916.360,00	115,10	1.000.000.000	871.371.750	87,14
.002	Ret. Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.122.000.000	1.127.483.380	100,49	1.122.000.000	1.128.098.060,00	100,54	847.000.000	847.524.170	100,06
.003	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil	201.155.000	234.756.685	116,70	197.681.000	243.914.025,00	123,39	242.193.000	300.467.000	124,06
.004	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	37.000.000	50.153.200	135,55	50.000.000	62.132.500,00	124,27	52.000.000	52.497.500	100,96
.005	Ret. Parkir Tepi Jalan Umum	696.230.000	705.427.850	101,32	846.325.000	858.049.200,00	101,39	685.000.000	692.928.450	101,16
.006	Retribusi Pasar	2.830.000.000	2.898.057.575	102,40	3.167.500.000	3.239.387.560,00	102,27	3.433.696.000	3.617.834.297	105,36
.010	Penggantian Bea Cetak Peta	0	0	0,00	0	0,00	0,00	150.000.000	130.487.750	86,99
.012	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	143.268.000	149.857.381	104,60	297.500.000	434.743.625,00	146,13	358.800.000	380.293.226	105,99
.014	Ret. Terminal	1.535.000.000	1.530.151.254	99,68	1.559.000.000	1.597.948.345,00	102,50	1.625.000.000	1.626.078.077	100,07
.015	Ret. Tempat Khusus Parkir	60.570.000	57.390.000	94,75	35.000.000	35.987.150,00	102,82	30.000.000	30.571.600	101,91
.017	Ret. Tempat Penginapan / Pesang-grahan/Villa	7.500.000	7.715.400	102,87	10.100.000	10.329.950,00	102,28	10.000.000	9.773.900	97,74
.018	Ret. Rumah Potong Hewan	140.518.000	134.309.725	95,58	155.000.000	151.826.200,00	97,95	145.000.000	150.092.000	103,51
.021	Ret. Tempat Rekreasi dan O.R.	142.875.000	159.805.579	111,85	160.006.000	184.361.951,00	115,22	117.034.000	177.547.261	151,71
.022	Ret. Penyebrng Diatas Air	3.400.000	3.411.250	100,33	3.000.000	4.005.000,00	133,50	2.000.000	3.157.500	157,88
.024	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.500.000	1.507.500	100,50	2.000.000	2.112.500,00	105,63	7.125.000	7.383.000	103,62
.026	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	435.000.000	436.653.400	100,38	350.000.000	357.931.750,00	102,27	600.000.000	627.691.100	104,62
.028	Ret. Ijin Gangguan	80.000.000	80.993.500	101,24	192.000.000	205.864.547,00	107,22	350.000.000	398.366.251	113,82
.029	Ret. Ijin Trayek	0			5.000.000	5.647.000,00	112,94	4.000.000	5.897.000	147,43
	Jumlah 1.2.2.	7.956.016.000	8.078.604.279	101,54	9.052.112.000	9.558.255.723,00	105,59	9.658.848.000	9.929.961.832	102,81

Kode Anggaran	Uraian Penerimaan	Tahun Anggaran 1998/1999			Tahun Anggaran 1999/2000			Tahun Anggaran /2000		
		Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.2.3.	**POS LABA USAHA DAERAH**									
.001	Bank Pembangunan Daerah	130.522.000	130.522.576	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
.002	P D A M	220.031.000	220.031.000	100,00	250.000.000	250.000.000,00	100,00	282.000.000	282.000.000	100,00
.004	Badan Kredit Kecamatan	750.000	2.897.485	386,33	800.000	2.772.913,00	346,61	3.000.000	3.426.000	114,20
	Jumlah 1.2.3.	351.303.000	353.451.061	100,61	250.800.000	252.772.913,00	100,79	285.000.000	285.426.000	100,15
1.2.4.	**POS PENERIMAAN LAIN-LAIN**									
.001	Hasil Penj. Brg milik Daerah	0	0	0,00	0	0,00	0,00	140.000.000	154.000.000	110,00
.002	Jasa Giro	130.000.000	171.860.947	132,20	110.000.000	166.217.831,00	151,11	110.000.000	252.978.881	229,98
.003	Sumbangan Pihak ke III	0	0	0,00	0	0,00	0,00	932.300.000	306.000.000	32,82
.004	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan (TP/TGR)	0	0	0,00	0	3.361.281,00	0,00	0	1.000.000	
.005	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	0	234.973.176	0,00	0	52.983.782,00	0,00	0	9.205.555	
.006	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	64.213.000	4.344.412	6,77	0	20.736.911,00	0,00	0	0	0,00
.013	Uang Titipan	387.704.000	436.828.663	112,67	393.865.000	490.841.537,00	124,62	386.146.000	713.633.469	184,81
.014	Penerimaan Dari Pengembalian Biaya Pemeliharaan Jalan / Saluran Akibat Penggunaan Asset PDAM	250.000.000	155.507.356	62,20	125.000.000	96.386.000,00	77,11	0	0	0,00
.015	Hasil Penjualan Dokumen Lelang / Direksi keet	44.000.000	44.858.675	101,95	40.000.000	29.752.485,00	74,38	100.000.000	78.873.600	78,87
.016	Pen. Dari Cargo Terminal Untuk Mengangsur Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	40.000.000	40.000.000	100,00	50.000.000	50.000.000,00	100,00	100.000.000	50.000.000	50,00
.017	Pemasukan Angs Kios Ps. Jongke.	0	0	0,00	0	0,00	0,00	37.152.000	28.784.000	77,48
.018	Pemasukan Angs.Kios Ps. Sidoda-di.	0	0	0,00	0	0,00	0,00	30.000.000	24.156.500	80,52
.019	Pemasukan Penyelesaian Perum. Pucangsawit	0	0	0,00	0	0,00	0,00	62.160.000	62.160.000	100,00
.020	Pendapatan Dari Penataan Tanah	0	0	0,00	0	0,00	0,00	103.000.000	103.700.000	100,68
.021	Klaim Asuransi	0	0	0,00	0	0,00	0,00	234.700.000	234.700.000	100,00
.030	Penerimaan Lain-lain	68.614.000	75.695.056	110,32	73.022.000	12.125.794,00	16,61	54.766.000	66.711.980	121,81
	Jumlah 1.2.4.	984.531.000	1.164.068.285	118,24	791.887.000	922.405.621,00	116,48	2.290.224.000	2.085.903.985	91,08
	Jumlah PADS	16.910.850.000	17.499.535.724	103,48	19.014.786.000	19.888.069.111,00	104,59	21.098.150.000	21.913.828.479	103,87

Kode Anggaran	Uraian Penerimaan	Tahun Anggaran 1998/1999			Tahun Anggaran 1999/2000			Tahun Anggaran /2000		
		Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.3.1.	POS BAGI HASIL PAJAK.									
.001	Pajak Bumi dan Bangunan	4.992.124.000	5.682.006.847	113,82	5.125.000.000	5.659.198.826,00	110,42	5.500.000.000	6.250.320.124	113,64
.002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	608.400.000	1.009.865.403	165,99	760.000.000	1.943.132.567,00	255,68	1.500.000.000	3.505.334.470	233,69
.003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	428.255.397	0,00	0	0,00	0,00	902.000.000	1.184.778.090	131,35
.004	PKB - BBNKB	162.484.000	162.484.000	100,00	1.284.765.000	1.146.107.169,00	89,21	0	0	0,00
	Jumlah 1.3.1.	5.763.008.000	7.282.611.647	126,37	7.169.765.000	8.748.438.562,00	122,02	7.902.000.000	10.940.432.684	138,45
1.3.2.	POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK									
.001	Iuran Hasil Hutan (IHH)	19.000.000	13.419.021	70,63	0	15.410.830,00	0,00	0	17.636.716	
.002	Pemberian Hak Atas Tanah Negara Landrent	120.000.000	186.292.533	155,24	300.000.000	373.324.024,00	124,44	250.000.000	250.944.300	100,38
.003	Pendapatan Dari Tingkat I	61.000.000	169.152.299	277,30	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	Jumlah 1.3.2.	200.000.000	368.863 853	184,43	300.000.000	388.734.854,00	129,58	250.000.000	268.581.016	107,43
	Jumlah Total	22.873.858.000	25.151.011.224	109,96	26.484.551.000	29.025.242.527,00	109,59	29.250.150.000	33.122.842.179	113,24

Surakarta,

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

SUMARSONO, SE, MM
Pembina
NIP. 500 036 720

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000 S/D 2002

Kode Angg.	Uraian Penerimaan	Tahun 1999/2000			Tahun 2000			Tahun 2001			Tahun 2002		
		Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH												
1	POS PAJAK.												
1.2.1.004	Pajak Hotel dan Restoran	3,114,987,000	3,181,367,915.00	102.13	2,750,000,000	3,513,205,296	127.75	5,750,000,000	5,579,260,003	97.03	6,500,000,000	6,313,586,283	97.13
1.2.1.005	Pajak Hiburan	565,000,000	612,507,097.50	108.41	620,000,000	620,733,5[illegible]	100.12	1,290,000,000	1,308,555,252	101.44	1,850,000,000	1,853,325,607	100.18
1.2.1.006	Pajak Reklame	365,000,000	412,153,974.50	112.92	569,000,000	569,423,03[illegible]	100.07	956,667,000	967,325,153	100.90	1,400,000,000	1,402,712,288	100.19
1.2.1.007	Pajak Penerangan Jalan	4,655,000,000	4,713,062,472.00	101.25	4,675,000,000	4,658,800,2[illegible]	99.65	7,480,000,000	7,734,822,404	103.41	11,011,500,000	11,082,793,568	100.65
1.2.1.009	Pajak Pemanfaatan ABT dan AP	220,000,000	235,543,395.00	107.07	250,078,000	250,374,50[illegible]	100.12	340,000,000	290,339,900	85.39	200,000,000	291,033,250	145.52
	Jumlah 1 (Pos Pajak) :	8,919,987,000	9,154,634,854.00	102.63	8,864,078,000	9,612,536,65[illegible]	108.44	15,816,667,000	15,880,303,712	100.39	20,961,500,000	20,943,450,996	99.91
2	POS RETRIBUSI.												
1.2.2.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	900,000,000	1,035,916,360	115.10	1,000,000,000	871,371,75[illegible]	87.14	1,383,000,000	1,318,395,525	95.33	1,500,000,000	1,534,342,100	102.29
1.2.2.002	Ret. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,122,000,000	1,128,098,060	100.54	847,000,000	847,524,17[illegible]	100.06	1,308,000,000	1,311,805,758	100.91	1,470,000,000	1,492,350,891	101.52
1.2.2.003	Ret. Penggantian biaya cetak KTP dan akte Catatan Sipil	197,681,000	243,914,025	123.39	242,193,000	300,467,00[illegible]	124.06	597,800,000	622,556,000	104.14	933,169,000	682,616,000	73.15
1.2.2.004	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.	50,000,000	62,132,500	124.27	52,000,000	52,497,50[illegible]	100.96	76,540,000	78,080,000	102.01	76,540,000	82,170,000	107.36
1.2.2.005	Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	846,325,000	858,049,200	101.39	685,000,000	692,928,45[illegible]	101.16	1,025,000,000	1,045,116,000	101.96	1,215,000,000	1,232,998,500	101.48
1.2.2.006	Ret. Pasar	3,167,500,000	3,239,387,560	102.27	3,433,696,000	3,617,834,29[illegible]	105.36	5,360,000,000	6,346,069,949	118.40	7,200,000,000	7,227,405,058	100.38
1.2.2.007	Ret. Air Bersih	0	0	0.00	0	[illegible]	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1.2.2.008	Ret. Pengujian Kend. Bermotor	0	0	0.00	0	[illegible]	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1.2.2.009	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0	0	0.00	0	[illegible]	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1.2.2.010	Ret. Penggantian Bea Cetak Peta	0	0	0.00	150,000,000	130,487,75[illegible]	86.99	200,000,000	234,327,300	117.16	250,000,000	279,409,450	111.76
1.2.2.011	Ret. Pengujian Kapal Perikanan	0	0	0.00	0	[illegible]	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1.2.2.012	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	297,500,000	434,743,625	146.13	358,800,000	380,293,22[illegible]	105.99	620,382,000	668,472,668	107.75	1,301,675,000	1,335,039,020	102.56
1.2.2.013	Ret. Pasar Grosir dan / pertokoan	0	0	0.00							0	0	0.00

Kode Angg.	Uraian Penerimaan	Tahun 1999/2000			Tahun 2000			Tahun 2001			Tahun 2002		
		Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi s/d Sept. 2002 (Rp)	%
1.2.2.014	Ret. Terminal	1,559,000,000	1,597,948,345	102.50	1,625,000,000	1,626,078,077	100.07	2,200,000,000	2,205,545,150	100.25	3,189,201,197	3,049,124,500	95.607.3
1.2.2.015	Ret. Tempat Khusus Parkir	35,000,000	35,987,150	102.82	30,000,000	30,571,600	101.91	50,000,000	51,890,000	103.78	60,000,000	58,035,400	96.73
1.2.2.017	Ret. Temp Peng./Pesanggrahan/Villa	10,100,000	10,329,950	102.28	10,000,000	9,773,900	97.74	15,078,000	15,253,500	101.16	25,078,000	20,776,500	82.85
1.2.2.019	Ret. Rumah Potong Hewan	155,000,000	151,826,200	97.95	145,000,000	150,092,000	103.51	215,000,000	222,235,950	103.37	236,646,500	239,832,000	101.35
1.2.2.021	Ret. Temp Rekreasi & Olah Raga	160,006,000	184,361,951	115.22	117,034,000	177,547,261	151.71	326,000,000	321,536,360	98.63	352,152,000	377,371,372	107.16
1.2.2.022	Ret. Penyeberangan di Atas Air	3,000,000	4,005,000	133.50	2,000,000	3,157,500	157.88	5,000,000	5,012,304	100.25	5,000,000	5,007,995	100.16
1.2.2.024	Ret. Penjual Prod. Usaha Daerah	2,000,000	2,112,500	105.63	7,125,000	7,383,000	103.62	13,300,000	13,300,000	100.00	7,525,000	9,595,000	127.51
1.2.2.026	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	350,000,000	357,931,750	102.27	600,000,000	627,691,100	104.62	1,800,000,000	1,775,473,350	98.64	2,250,000,000	1,861,697,550	82.74
1.2.2.028	Ret. Ijin Gangguan	192,000,000	205,864,547	107.22	350,000,000	398,366,251	113.82	540,000,000	478,211,757	88.56	400,000,000	415,496,029	103.87
1.2.2.029	Ret. Ijin Trayek	5,000,000	5,647,000	112.94	4,000,000	5,897,000	147.43	7,000,000	9,884,000	141.20	12,000,000	16,208,600	135.07
1.2.2.031	Ret. Pedagang Kaki Lima	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	108,000,000	120,120,900	111.22
	Jumlah 2 (Pos Retribusi)	9,052,112,000	9,558,255,723	105.59	9,658,848,000	9,929,961,832	102.81	15,734,100,000	16,723,167,571	106.29	20,591,986,697	20,039,596,865	97.32
3	LABA PERUSDA												
1.2.3.001	Bank Pembangunan Daerah	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
1.2.3.002	Perusahaan Daerah Air Minum	250,000,000	250,000,000	100.00	282,000,000	282,000,000	100.00	384,282,000	384,282,000	100.00	450,000,000	450,000,000	100.00
1.2.3.003	PD. Bank Pasar	0	0	0.00							0	0	0.00
1.2.3.005	Badan Kredit Kecamatan	800,000	2,772,913	346.61	3,000,000	3,426,000	114.20	7,200,000	4,710,000	65.42	25,210,000	16,364,400	64.91
	Jumlah 3 (Laba Perusda)	250,800,000	252,772,913	100.79	285,000,000	285,426,000	100.15	391,482,000	388,992,000	99.364	475,210,000	466,364,400	98.14
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH												
1.2.4.001	Hasil Penjualan Brg Milik Daerah	0	0	0.00	140,000,000	154,000,000	110.00	0	0	0.00	0	0	0
1.2.4.002	Jasa Giro	110,000,000	166,217,831	151.11	110,000,000	252,978,881	229.98	189,000,000	202,320,400	107.05	1,000,000,000	1,693,215,234	169.32
1.2.4.003	Sumbangan Pihak ke III	0	0	0.00	932,300,000	306,000,000	32.82	63,524,200	63,524,200	100.00	0	0	0
1.2.4.004	Pen. Ganti Rugi Atas Kekayaan	0	3,361,281	0.00	0	1,000,000	0.00	4,771,000	7,633,081	159.99	50,000,000	50,888,295	101.78

		Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.2.4.005	Kelebihan Bayar Pihak ke III	0	52,983,732	0.00	0.0	9,205,555.0	0.00	0	0	0.00	0		0
1.2.4.006	Denda Keterlbtan Pel. Pek. Daerah	0	20,736,611	0.00	0.0	0.0	0.00	5,907,000	11,405,272	193.08	0	2,710,000	
1.2.4.009	Penerimaan dari DLLAJR	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	725,000,000	620,763,500	85.62	971,948,500	867,776,500	89.28
1.2.4.013	Uang Titipan	393,865,000	490,841,537	124.62	386,146,000.0	713,633,469.0	184.81	370,471,000	587,702,565	158.64	36,971,505	36,971,995	100.00
1.2.4.014	Penerimaan dari pengembalian biaya pemeliharaan jalan/saluran akibat penggunaan asset PDAM	125,000,000	96,386,000	77.11	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0		0
1.2.4.015	Hasil Penjual. Dok. Lelang Direksi keet	40,000,000	29,752,435	74.38	100,000,000.0	78,873,600.0	78.87	50,000,000	58,095,000	116.19	50,000,000	32,175,000	64.35
1.2.4.016	Penerimaan Dari Cargo Terminal	50,000,000	50,000,000	100.00	100,000,000.0	50,000,000.0	50.00	185,000,000	185,000,000	100.00	275,000,000	275,000,000	100.00
1.2.4.017	Pem. Angsuran Kios Ps Jongke	0	0	0.00	37,152,000.0	28,784,000.0	77.48	49,000,000	64,144,390	130.91	49,000,000	54,738,430	111.71
1.2.4.018	Pém. Angsuran Los Ps. Sidodadi	0	0	0.00	30,000,000.0	24,156,500.0	80.52	45,000,000	29,130,505	64.73	24,000,000	23,739,475	98.91
1.2.4.019	Pemasukan dari penyelesaian perum.	0	0	0.00	62,160,000.0	62,160,000.0	100.00	0	0	0.00	0	0	0
1.2.4.020	Penerimaan dari penataan tanah	0	0	0.00	103,000,000.0	103,700,000.0	100.68	0	0	0.00	0	0	0
1.2.4.021	Klaim asuransi	0	0	0.00	234,700,000.0	234,700,000.0	100.00	0	0	0.00	0	0	0
1.2.4.030	Penerimaan Lain-lain - Dinas Perindag dan PLI	73,022,000	12,125,734	16.61	54,766,000.0	66,711,980.0	121.81	777,500,000	818,351,437	105.25	394,524,000	422,431,995	107.07
	Jumlah 4 :	791,887,000	922,405,821	116.48	2,290,224,000	2,085,903,985	91.08	2,455,173,200	2,648,070,350	107.42	30,000,000	29,025,000	96.75
	Jumlah I (BAGIAN PAD) :	19,014,786,000	19,888,069,111	104.59	21,098,150,000	21,913,828,479	103.87	34,409,422,200	35,640,533,633	103.58	2,881,444,505	3,488,671,830	121.07
II	BAGIAN DANA PERIMBANGAN										44,910,141,302	44,938,084,095	100.06
1	Pos Bagi Hasil Pajak												
1.3.1.001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5,125,000,000	5,659,198,826	110.42	5,500,000,000	6,250,320,124	113.64	7,850,319,000	8,665,349,332	110.38	10,365,157,000	9,758,161,827	94.14
1.3.1.002	Bea Per Hak Atas Tanah & Bang.	760,000,000	1,943,132,557	255.68	1,500,000,000	3,535,334,470	233.69	4,754,836,000	4,853,955,049	102.08	4,800,000,000	4,144,878,435	85.35
1.3.1.003	Bagi Hasil Pjk Penghasilan Ps 21	0	0	0.00	902,000,000	1,184,778,090	131.35	2,257,477,000	3,222,155,138	142.73	4,002,211,000	3,001,658,405	75.00
	Jumlah 1 :	5,885,000,000	7,602,331,383	129.18	7,902,000,000	10,940,432,684	138.45	14,862,634,000	16,741,459,519	112.64	19,167,368,000	16,904,698,671	88.20
2	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak												
1.3.2.001	Iuran Hasil Hutan (IHH).	0	15,410,630	0.00	0.0	17,636,716.0	0.00	20,000,000	1,422,179	7.11	20,000,000	0	0
1.3.2.003	Iuran tetap / Landrent	300,000,000	373,324,024	124.44	250,000,000.0	250,944,300.0	100.38	500,000,000	444,989,225	89.00	450,000,000	318,610,200	70.80
1.3.2.008	Minyak Bumi dan Gas	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
1.3.2.010	Penerimaan Dari Sumber Daya Alam	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	948,116,000	26,127,766	2.76	400,000,000	471,904,980	117.98
	Jumlah 2 :	300,000,000	388,734,654	129.58	250,000,000	268,581,016	107.43	1,468,116,000	472,539,170	32.187	870,000,000	790,515,180	90.865
	Jumlah II (1 +2) :	6,185,000,000	7,991,066,247	129.20	8,152,000,000	11,209,013,700	137.50	16,330,750,000	17,213,998,689	105.41	20,037,368,225	17,695,213,851	88.31

Kode Angg.	Uraian Penerimaan	Tahun 1999/2000			Tahun 2000			Tahun 2001			Tahun 2002		
		Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
III	Bagian Lain-lain Penerimaan Yang Sah												
1	Penerimaan Dari Propinsi												
1.5.2.001	PKB-BBN.KB	1,284,765,000	1,146,107,169	89.2075	0	0	0.00	4,100,000,000	5,784,624,000	141.09	11,000,000,000	11,899,676,000	108.18
1.5.2.003	PBB - KB	0	0	0	0	0	0.00	1,500,000,000	1,367,288,491	91.15	4,731,118,000	5,192,283,668	109.75
1.5.2.004	Tentara Masuk Desa	0	0	0	0	0	0.00	50,576,600	50,577,600	100.00	0	0	0.00
1.5.2.005	Bantuan Pemb. Daerah Bawahan	0	0	0	0	0	0.00	1,600,000,000	1,600,000,000	100.00	1,258,868,000	1,258,868,000	100.00
1.5.2.006	Pen. Sebagian PAD dari Propinsi	0	0	0	0	0	0.00	1,542,995,000	1,542,995,000	100.00	0	86,135,000	0.00
	Jumlah III :	1,284,765,000	1,146,107,169		0	0	0.00	8,793,571,600	10,345,485,091	117.65	16,989,986,000	18,438,962,668	108.53
	JUMLAH TOTAL (I S/D III) :	26,484,551,000	29,025,242,527		29,250,150,000	33,122,842,179	113.24	59,533,743,800	63,200,017,413	106.16	81,937,495,511	81,072,260,618	98.94

REKAPITULASI :

Kode Angg.	Uraian Penerimaan	Tahun 1999/2000			Tahun 2000			Tahun 2001			Tahun 2002		
		Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	19,014,786,000	19,686,059,111	104.593	21,098,150,000	21,913,828,479	103.87	34,409,422,200	35,640,533,633	103.58	44,910,141,302	44,938,084,099	100.06
II	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	6,185,000,000	7,991,056,247	129.201	8,152,000,000	11,209,013,700	137.50	16,330,750,000	17,213,936,689	105.41	20,037,359,209	17,695,213,851	88.31
III	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH.	1,284,765,000	1,146,107,169	89.2075	0	0	0.00	8,793,571,600	10,345,485,091	117.65	16,989,986,000	18,438,962,668	108.53
	JUMLAH :	26,484,551,000	29,025,242,527	109.593	29,250,150,000	33,122,842,179	113.24	59,533,743,800	63,200,017,413	106.16	81,937,495,511	81,072,260,618	98.94

Surakarta, 27 Januari 2003

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku Koordinator Pendapatan Daerah

SUMARSONO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 500 036 720

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003
DAN RENCANA PENERIAMAAN TAHUN 2004

Kode Angg.	Uraian Penerimaan	Target Tahun 2003	Realisasi Penerimaan Tahun 2003	%	Rencana Penerimaan Tahun2004
I	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU				
1	POS SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU				
1.1.1.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahu Yang Lalu	4,315,707,715	4,315,707,715	100.00	0
	Jumlah I.1. :	4,315,707,715	4,315,707,715	100.00	0
	Jumlah I. :	4,315,707,715	4,315,707,715	100.00	0
II	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	POS PAJAK.				
1.2.1.006	Pajak Hotel	3,334,000,000	3,458,368,963	103 73	3,500,000,000
1.2.1.007	Pajak Restoran	4,000,000,000	4,104,044,593	104.10	4,200,000,000
1.2.1.008	Pajak Hiburan	2,000,000,000	2,007,544,227	100.38	2,000,000,000
1.2.1.009	Pajak Reklame	1,800,000,000	1,804,690,293	100.26	1,800,000,000
1.2.1.010	Pajak Penerangan Jalan	13,000,000,000	13,162,299,593	101.25	13,000,000,000
1.2.1.014	Pajak Parkir	60,000,000	60,050,000	100.08	75,000,000
	Jumlah II.1 (Pos Pajak) :	24,194,000,000	24,656,997,669	101.91	24,575,000,000
2	POS RETRIBUSI.				
1.2.2.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,850,000,000	1,799,047,410	97.25	1,900,000,000
1.2.2.002	Ret. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,760,000,000	1,816,343,814	103.20	1,978,000,000
1.2.2.003	Ret. Penggantian biaya cetak KTP dan akte Catatan Sipil	1,063,000,000	1,083,203,000	101.90	928,118,000
1.2.2.004	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	83,720,000	84,330,000	100.73	83,720,000
1.2.2.005	Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum, Taman Parkir dan Parkir Khusus.	1,198,168,000	1,193,765,450	99.63	1,324,553,900
1.2.2.006	Ret. Pasar	7,983,000,000	8,341,932,424	104.50	8,394,600,000
1.2.2.007	Ret. Pengujian Kend. Bermotor	1,155,000,000	991,066,500	85.81	957,252,950
1.2.2.008	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	51,185,000	24,190,000	47.85	38,060,000
1.2.2.009	Ret. Penggantian Bea Cetak Peta	300,000,000	465,458,400	155.15	300,000,000
1.2.2.011	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	2,737,471,000	2,766,828,370	101.07	2,815,357,000
1.2.2.014	Ret. Terminal	3,350,000,000	3,319,436,410	99.09	3,601,900,000
1.2.2.015	Ret. Tempat Khusus Parkir	0	0	0.00	0
1.2.2.016	Ret. Temp Peng./Pesanggrahan/Villa	25,500,000	25,073,500	98.33	30,500,000
1.2.2.018	Ret. Rumah Potong Hewan	271,000,000	273,301,900	100.85	
1.2.2.020	Ret. Temp Rekreasi & Olah Raga	390,800,000	421,381,348	107.83	455,799,996

Kode Angg.	Uraian Penerimaan	Target Tahun 2003	Realisasi Penerimaan Tahun 2003	%	Rencana Penerimaan Tahun2004
1.2.2.021	Ret. Penyeberangan di Atas Air	5,000,000	5,075,875	101.52	5,000,000
1.2.2.023	Ret. Penjual Prod. Usaha Daerah	10,000,000	15,100,000	151.00	378,828,000
1.2.2.024	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2,857,250,000	2,858,304,650	100.04	2,857,250,000
1.2.2.026	Ret. Ijin Gangguan	540,000,000	521,626,662	96.60	550,000,000
1.2.2.027	Ret. Ijin Trayek	15,000,000	19,568,600	130.46	0
1.2.2.031	Ret. Pedagang Kaki Lima	150,000,000	150,306,400	100.20	150,015,000
1.2.2.032	Ret. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU)	46,000,000	44,925,000	97.66	15,010,000
1.2.2.033	Ret. Dispensasi melalui jalan kota	252,168,000	268,662,500	106.54	195,144,800
1.2.2.034	Ret. Kendaraan Umum (sub terminal)	185,852,000	188,891,350	101.64	0
	Ret. Pemeriksaan Kes. Hewan dan Ikan	0	0	0.00	20,000,000
	Jumlah II.2. (Pos Retribusi) :	26,280,114,000	26,678,119,563	101.51	26,979,109,646
3	LABA PERUSDA.				
1.2.3.002	Perusahaan Daerah Air Minum	650,000,000	650,000,000	100.00	685,000,000
1.2.3.003	PD. Bank Pasar	0	0	0.00	
1.2.3.004	Badan Kredit Kecamatan	14,397,000	14,397,000	100.00	25,000,000
	Jumlah II.3. (Laba Perusda) :	664,397,000	664,397,000	100.00	710,000,000
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH.				
1.2.4.002	Jasa Giro	1,650,000,000	2,082,271,581	126.20	600,000,000
1.2.4.004	Pen. Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	0	151,303,426		0
1.2.4.006	Pen. Denda keterlbt atas pek. Daerah	0	336,700		0
1.2.4.009	Penerimaan dari DLLAJR	0	0		0
1.2.4.013	Uang Titipan	36,971,905	7,300,000	19.74	0
1.2.4.015	Hasil Penjualan Direksi Keet	25,000,000	54,047,500	216.19	3,000,000
1.2.4.016	Penerimaan Dari Cargo Terminal untuk mengangsur pinjaman kpd Pem. Pusat	290,000,000	290,000,000	100.00	
1.2.4.017	Pem. Angsuran Kios Ps Jongke	27,000,000	32,082,170	118.82	3,900,000
1.2.4.018	Pem. Angsuran Los Ps. Sidodadi	24,000,000	22,985,910	95.77	23,500,000
1.2.4.030	Penerimaan Lain-lain				
	- DPU	2,000,000	29,321,020	1,466.05	16,962,000
	- Dinas Perindag dan PM	30,000,000	31,725,000	105.75	300,000,000
	- DLLAJ - Ret. STNK dan uji becak, SIM becak	10,000,000	4,805,000	48.05	10,000,000
	- Kantor Keuangan Daerah	23,000,000	109,991,699	478.22	310,000,000
	Jumlah II.4. :	2,117,971,905	2,816,170,006	132.97	1,267,362,000
	Jumlah II (BAGIAN PAD) :	53,256,482,905	54,815,684,238	102.93	53,531,471,646
III	BAGIAN DANA PERIMBANGAN.				
1	Pos Bagi Hasil Pajak				
1.3.1.001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13,100,000,000	12,499,810,238	95.42	15,400,000,000
1.3.1.002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bang	6,616,898,000	5,467,012,683	82.62	7,500,000,000
1.3.1.003	Bagi Hasil Pjk Penghasilan Ps 21	3,967,729,000	4,603,965,540	116.04	5,702,000,000
	Jumlah III.1. :	23,684,627,000	22,570,788,461	95.30	28,602,000,000

Kode Angg.	Uraian Penerimaan	Target Tahun 2003	Realisasi Penerimaan Tahun 2003	%	Rencana Penerimaan Tahun2004
2	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak				
1.3.2.001	Iuran Hasil Hutan (IHH).	0	0	0.00	0
1.3.2.003	Iuran tetap / Landrent	0	0	0.00	0
1.3.2.010	Penerimaan Dari Sumber Daya Alam	500,000,000	701,204,124	140.24	214,000,000
	Jumlah III.2. :	**500,000,000**	**701,204,124**	**140.24**	**214,000,000**
3	Pos Dana Alokasi Umum				
1.3.3.001	Dana Alokasi Umum	215,280,000,000	215,280,000,000	100.00	218,045,000,000
1.3.3.002	Dana Penyeimbang	26,942,708,000	17,061,997,000	63.33	13,979,000,000
	Jumlah III.3. :	**242,222,708,000**	**232,341,997,000**	**95.92**	**232,024,000,000**
4	Pos Dana Alokasi Khusus				
1.3.4.002	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	4,700,000,000	4,700,000,000	100.00	5,500,000,000
	Jumlah III.4. :	4,700,000,000	4,700,000,000	100.00	5,500,000,000
5	Pos Dana Darurat				
1.3.5.001	Dana Darurat	0	0	0.00	0
	Jumlah III.5. :	0	0	0.00	0
	Jumlah III (1 s/d 5) :	**271,107,335,000**	**260,313,989,585**	**96.02**	**266,340,000,000**
IV	BAGIAN PINJAMAN DAERAH				
1.4.1	Pos Pinjaman Dalam Negeri	0	7,000,000,000		0
1.4.2	Pos Pinjaman Luar Daerah	0	0	0.00	0
	Jumlah IV. :	0	7,000,000,000		0
V	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH.				
1	Penerimaan Dari Propinsi				
1.5.2.001	Pajak Kendaraan Bermotor	15,889,827,734	14,722,899,000	92.66	16,500,000,000
1.5.2.003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermoto	5,500,000,000	6,581,976,136	119.67	6,300,000,000
1.5.2.004	Ret. Ijin Kelebihan Muatan	73,612,000	78,390,200	106.49	100,000,000
1.5.2.005	Bantuan Pemb. Daerah Bawahan	4,013,225,000	4,013,225,000	100.00	0
1.5.2.006	Pajak Pemanfaatan ABT dan AP	200,000,000	268,886,160	134.44	270,000,000
1.5.2.007	Sumbangan Pihak III kepada Kab/Kota	4,500,000	27,877,600	619.50	0
1.5.2.008	Bantuan Pemb. Kembali Ps. Kabangan	250,000,000	250,000,000	100.00	0
	Bantuan Keuangan untuk program pem	0	0	0.00	1,422,851,000
	Jumlah V.1. :	**25,931,164,734**	**25,943,254,096**	**100.05**	**24,592,851,000**
2	Penerimaan Lain-Lainnya				
1.5.4.002	Restitusi PPh. 21 / bagi Pegawai	4,800,000,000	4,094,949,260	85.31	4,601,686,712
	Jumlah V.2. :	4,800,000,000	4,094,949,260	85.31	4,601,686,712
	Jumlah V (1 + 2) :	**30,731,164,734**	**30,038,203,356**	**97.75**	**29,194,537,712**
	JUMLAH TOTAL (I S/D V) :	**359,410,690,354**	**356,483,584,894**	**99.19**	**349,066,009,358**

REKAPITULASI :

Kodo Angg.	Uraian Penerimaan	Target Tahun 2003	Realisasi Penerimaan Tahun 2003	%	Rencana Penerimaan Tahun2004
I	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	4,315,707,715	4,315,707,715	100.00	0
II	Bagian Pendapatan Asli Daerah	53,256,482,905	54,815,684,238	102.93	53,531,471,646
III	Bagian Dana Perimbangan	271,107,335,000	260,313,989,585	96.02	266,340,000,000
IV	Bagian Pinjaman Daerah	0	7,000,000,000		0
V	Bagian Lain-2 Penerimaan Yang Sah	30,731,164,734	30,038,203,356	97.75	29,194,537,712
	JUMLAH :	359,410,690,354	356,483,584,894	99.19	349,066,009,358

Surakarta, Maret 2004

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SUMARSONO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 036 720

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Nomor : 3 Tahun 1993.
Tanggal : 17 Mei 1993.

T A R I P R E T R I B U S I P A S A R

NO.	U R A I A N	TARIP RETRIBUSI PER M2 / HARI										KETERANGAN
		KLAS I						KLAS II				KLAS III			
		A		B		C		A		B		C		A		B	
1	K I O S																
	a. Lantai dasar	Rp	140	Rp	125	Rp	100	Rp	85	Rp	75	Rp	60	Rp	50	Rp	35
	b. Lantai 1 (satu)	Rp	100	Rp	85	Rp	75	Rp	60	Rp	50	Rp	45	Rp	35	Rp	20
	c. Lantai 2 (dua) dan seterusnya	Rp	90	Rp	75	Rp	60	Rp	50	Rp	45	Rp	40	Rp	30	Rp	15
2	L O S	Rp	85	Rp	75	Rp	65	Rp	60	Rp	55	Rp	50	Rp	30	Rp	20
3	PLATARAN/WILAYAH																
	a. kecil	Rp 100 s/d Rp 125,-															
	b. sedang	Rp 150 s/d Rp 175,-															
	c. besar	Rp 200 s/d Rp 500,-															

- Untuk menentukan besar, sedang dan kecil, didasarkan atas luas pemakaian.
- Untuk menentukan besar kecilnya tarip berdasarkan jenis dagangannya/usahanya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A

Ketua,

ttd.

Drs. M A R N O D.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd.

H A R T O M O

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surakarta.

Nomor : 3 Tahun 1993.
Tanggal : 17 Mei 1993.

TARIP RETRIBUSI PEMASANGAN REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN PENGHITUNG RETRIBUSI	TARIP RETRIBUSI				
			1 MINGGU	1 BULAN	TIGA WULAN	1/2 TAHUN	1 TAHUN
1	Billboard	1 M2	Rp 150,-	Rp 450,-	Rp 750,-	Rp 1.250,-	Rp 1.800,-
2	Neon Sign	1 M2	Rp 200,-	Rp 500,-	Rp 1.250,-	Rp 1.600,-	Rp 2.400,-
3	Spanduk	1 M2	Rp 100,-	-	-	-	-
4	Tempel	1 lembar kurang dari 50 cm2	Rp 50,-	Rp 200,-	-	-	-
5		1 lembar lebih dari 50 cm2	Rp 75,-	Rp 350,-			

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A
Ketua,

ttd.

Drs. M A R N O D.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd.

H A R T O M O

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR
Jl. Jendral Sudirman No 2 Telp. 642020 Psw. 265 Surakarta 57111

SURAT EDARAN

Nomor : 511.2 / 178 /2001

Dengan ini kami beritahukan kepada Pedagang Pasar se Kota Surakarta bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor : 06/DPRD/II/2001 Tanggal 6 Maret 2001 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Pasar dan Taksiran Nilai Tempat Dasaran Pasar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Surakarta No. 511.2/085-A/I/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Penetapan Kelas Pasar dan Taksiran Nilai Tempat Dasaran Pasar, maka Kelas Pasar dan Taksiran Nilai Tempat Dasaran Pasar yang berlaku mulai 1 APRIL 2001 untuk masing-masing pasar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasar	Kelas Pasar	NILAI TAKSIR	
			LOS Per M2 (Rp.)	KIOS Per M2 (Rp.)
01	Legi	I A	1.270.000,00	2.100.000,00
02	Klewer	I A	1.270.000,00	3.600.000,00
03	Singosaren	I A	2.500.000,00	5.000.000,00
04	Gede	I B	1.120.000,00	1.875.000,00
05	Harjodaksino	I B	1.120.000,00	1.875.000,00
06	Jongke	I B	1.120.000,00	1.875.000,00
07	Nusukan	I B	1.120.000,00	1.875.000,00
08	Rejosari	II A	900.000,00	1.275.000,00
09	Turisari	II A	900.000,00	1.275.000,00
10	Purwosari	II A	900.000,00	1.275.000,00
11	Sidodadi	II A	900.000,00	1.275.000,00
12	Kadipolo	II A	900.000,00	1.275.000,00
13	Ledoksari	II A	900.000,00	1.275.000,00
14	Jebres	II B	820.000,00	1.125.000,00
15	Tanggul	II B	820.000,00	1.125.000,00
16	Depok	II B	820.000,00	1.125.000,00
17	Ayam	II B	820.000,00	1.125.000,00
18	Kliwon	II B	820.000,00	1.125.000,00
19	Kabangan	II B	820.000,00	1.125.000,00
20	Windujenar	II B	820.000,00	1.125.000,00
21	Kembang	II B	820.000,00	1.125.000,00
22	Mebel	II B	820.000,00	1.125.000,00
23	Penumping	II B	820.000,00	1.125.000,00
24	Balapan/Ayu	II B	820.000,00	1.125.000,00
25	Ngemplak	III A	600.000,00	750.000,00
26	Mojosongo	III A	600.000,00	750.000,00
27	Bangunharjo	III A	600.000,00	750.000,00
28	Gading	III A	600.000,00	750.000,00
29	Sidomulyo	III A	600.000,00	750.000,00
30	Sangkrah	III A	600.000,00	750.000,00
31	Buah Jurug	III A	600.000,00	750.000,00
32	Dawung	III A	600.000,00	750.000,00
33	Tunggulsari	III A	600.000,00	750.000,00
34	Mojosongo Perumnas	III B	450.000,00	550.000,00
35	Joglo	III B	450.000,00	550.000,00
36	Bambu	III B	450.000,00	550.000,00
37	Ngumbul	III B	450.000,00	550.000,00
38	Besi Tua	III B	450.000,00	550.000,00

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Surakarta, 29 Maret 2001

KEPALA DINAS PENGELOLAAN PASAR
KOTA SURAKARTA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR SURAKARTA

Drs. TRIYANTO, MM
Penata Tk. I

TARIP RETRIBUSI, LISTRIK DAN RKK MULAI 1 JAN 2003

No	Nama Pasar	PERDA 8 / 99 Kep Wk 511.2/085-A/1/2001			Perda 4/01 Ins Wk 974/003/2/2002 Tgl 21 Nop 2002	Kep Wk 12/2002 Tgl 28 Okt 2002	
		Kelas Pasar	Ret Los m2/hr	Ret Kios m2/hr	(Rp)	Listrik L (Rp)	Listrik K (Rp)
1	LEGI	I A	127	210	20	60	100
2	KLEWER	I A	127	360	20	60	-
3	SINGOSAREN	I A	250	500	20	-	-
4	GEDE	I B	112	187,5	20	60	100
5	HARJODAKSINO	I B	112	187,5	20	60	100
6	JONGKE	I B	112	187,5	20	60	100
7	NUSUKAN	I B	112	187,5	20	60	100
8	REJOSARI	II A	90	127,5	15	50	70
9	TURISARI	II A	90	127,5	15	50	70
10	PURWOSARI	II A	90	127,5	15	50	70
11	SIDODADI	II A	90	127,5	15	50	70
12	KADIPOLO	II A	90	127,5	15	50	70
13	LEDOKSARI	II A	90	127,5	15	50	70
14	JEBRES	II B	82	112,5	15	50	70
15	TANGGUL	II B	82	112,5	15	50	70
16	DEPOK	II B	82	112,5	15	50	70
17	AYAM	II B	82	112,5	15	50	70
18	KLIWON	II B	82	112,5	15	50	70
19	KABANGAN	II B	82	112,5	15	50	70
20	WINDUJENAR	II B	82	112,5	15	50	70
21	KEMBANG	II B	82	112,5	15	50	70
22	MEBEL	II B	82	112,5	15	50	70
23	PENUMPING	II B	82	112,5	15	50	70
24	BALAPAN/AYU	II B	82	112,5	15	50	70
25	NGEMPLAK	III A	60	75	10	30	50
26	MOJOSONGO	III A	60	75	10	30	50
27	BANGUNHARJO	III A	60	75	10	30	50
28	GADING	III A	60	75	10	30	50
29	SIDOMULYO	III A	60	75	10	30	50
30	SANGKRAH	III A	60	75	10	30	50
31	BUAH JURUG	III A	60	75	10	30	50
32	TUNGGULSARI	III A	60	75	10	30	50
33	MOJOSONGO P.	III B	45	55	10	30	50
34	JOGLO	III B	45	55	10	30	50
35	BAMBU	III.B	45	55	10	30	50
36	NGUMBUL	III B	45	55	10	30	50
37	BESI TUA	III B	45	55	10	30	50

Keterangan:

Pasar Klewer dan lainnya	s/d 100 watt	20.000	per bl
	s/d 150 watt	29.000	per bl
	s/d 200 watt	38.500	per bl
	s/d 300 watt	56.000	per bl
	s/d 450 watt	86.000	per bl
Pasar Singosaren	AC	100	per m2/hr
	L. Lingk	100	per m2/hr

POTENSI LOS/KIOS PASAR KOTA SURAKARTA TH.2001

NO	PASAR	KLAS	KIOS			LOS		
			ISI	KOSONG	JUMLAH	ISI	KOSONG	JUMLAH
1	LEGI	I A	166	22	188	1.325	55	1.380
2	KLEWER	I A	2.206	0	2.206	40	0	40
3	SINGOSAREN	I A	243	0	243	0	0	0
4	GEDE	I B	112	0	112	583	0	583
5	NUSUKAN	I B	76	2	78	416	32	448
6	HARJODAKSINO	I B	45	7	52	832	144	976
7	JONGKE	I B	97	0	97	698	111	809
8	REJOSARI	II A	24	0	24	122	30	152
9	TUPISARI	II A	36	0	36	288	64	352
10	PURWOSARI	II A	11	2	13	162	33	195
11	SIDOSARI	II A	14	0	14	217	20	237
12	LEDOKSARI	II A	16	0	16	25	0	25
13	KABEGOLO	II A	5	0	5	311	128	439
14	TANGGUL	II B	8	0	8	86	60	146
15	DEPOK	II B	0	0	0	220	0	220
16	KABANGAN	II B	40	0	40	34	106	140
17	PEDUMPING	II B	0	0	0	99	13	112
18	AYAM	II B	0	0	0	82	239	321
19	LEMON	II B	12	1	13	277	101	378
20	JEBRES	II B	16	2	18	45	40	85
21	KEMBANG	II B	17	0	17	70	0	70
22	GALAPAN	II B	55	0	55	5	0	5
23	MOJO	II B	18	0	18	60	3	63
24	PRINGGITAN	II B	0	0	0	151	0	151
25	PERMATAK	III A	14	0	14	59	0	59
26	MANGGIS	III A	0	0	0	96	0	96
27	PASIRKEMBANG	III A	1	0	1	15	27	42
28	SIDOMULYO	III A	0	0	0	57	0	57
29	JADUNG	III A	20	0	20	166	0	166
30	SANGKRAH	III A	0	0	0	140	0	140
31	TINGGILIKI	III A	19	1	20	132	13	145
32	JURUG	III A	36	0	36	0	0	0
33	PAWING*	III A	6	0	6	0	0	0
34	MOJOSONGO PERUM	III B	2	0	2	129	4	133
35	PEDAMEL	III B	11	0	11	23	22	45
36	PAMPU*	III B	0	0	0	0	0	0
37	PEGI	III B	0	0	0	255	0	255
38	BOGLO	III B	38	0	38	52	0	52
			3.351	37	3.388	7.303	1.219	8.522

POTENSI LOSMEN DI KOTA SURAKARTA TH.2002

NO	DESA	KLAS	LUAS	LUAS TERBANGUN		PETAK TERPAKAI		PETAK KOSONG	
				KOS	LAIN	KOS	LAIN	KOS	LAIN
1	LEGI	I A	16.610	3.150	6.120	166	1.325	22	55
2	KEPATIHAN	I A	12.950	12.373	90	2.206	40	0	0
3	SEWU SAMPIT	I A	1.900	2.184	0	342	0	0	0
4	GELE	I B	2.607	1.865	2.589	112	582	0	0
5	DUSUN KAJI	II A	4.473	878	1.630	76	316	2	9
6	KAMPUNG BARU	II A	7.000	1.001	1.478	167	522	2	111
7	JOYOKE	II B	5.000	1.176	2.578	97	685	0	111
8	BROSARI	II A	2.580	276	548	24	122	0	30
9	TURIJARI	II A	2.750	428	792	66	232	0	19
10	PURWOSARI	II A	1.112	161	393	11	162	2	55
11	SEWOJADI	II A	1.148	121	466	14	217	0	29
12	PURWOSARI	II A	2.117	340	57	16	29	0	9
13	KAMPUNG	II A	1.456	40	376	5	311	0	128
14	TANGGUL	II B	2.400	95	296	8	86	0	60
15	DEPOK	II B	1.480	0	104	0	279	0	0
16	KABANGAN	II B	1.882	480	211	40	34	0	106
17	PENUMPING	II B	1.200	0	396	0	99	0	13
18	AYAM	II B	11.220	0	640	0	57	0	240
19	KEMUNI	II B	2.301	117	260	12	277	1	100
20	BEDES	II B	2.484	275	178	16	45	2	40
21	KEMBANG	II B	1.102	208	305	17	79	0	9
22	BALAPAN	II B	1.215	342	0	35	0	0	0
23	MEBEL	II B	6.820	504	674	18	61	0	9
24	WIROBRAJAN	II B	2.384	0	1.566	0	181	0	1
25	NGEMPLAK	III A	974	120	158	11	59	0	0
26	MOJOSONGO	III A	1.500	0	288	0	96	0	0
27	BANJARSARI	III A	1.115	95	42	4	18	0	37
28	SEWAKADIYO	III A	840	0	337	0	57	0	0
29	GADING	III A	2.282	250	449	20	166	0	0
30	BANJARSARI	III A	1.122	36	350	0	149	0	0
31	TUNGGULSARI	III A	710	150	242	17	132	1	1
32	JURUG	III A	540	252	0	36	0	0	0
33	PASIRIN	III A	580	0	0	0	0	0	0
34	MOJOSONGO PERUM	III B	1.458	0	230	2	129	0	4
35	NGUMBUL	III B	484	68	69	11	26	0	22
36	GONDRU	III B	180	0	0	0	0	0	0
37	DENI	III B	15.120	0	12.662	0	255	0	0
38	[illegible]	III B	1.005	0	337	38	57	0	0
			135.051	32.177	39.575	3.315	7.303	87	1.219

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2001

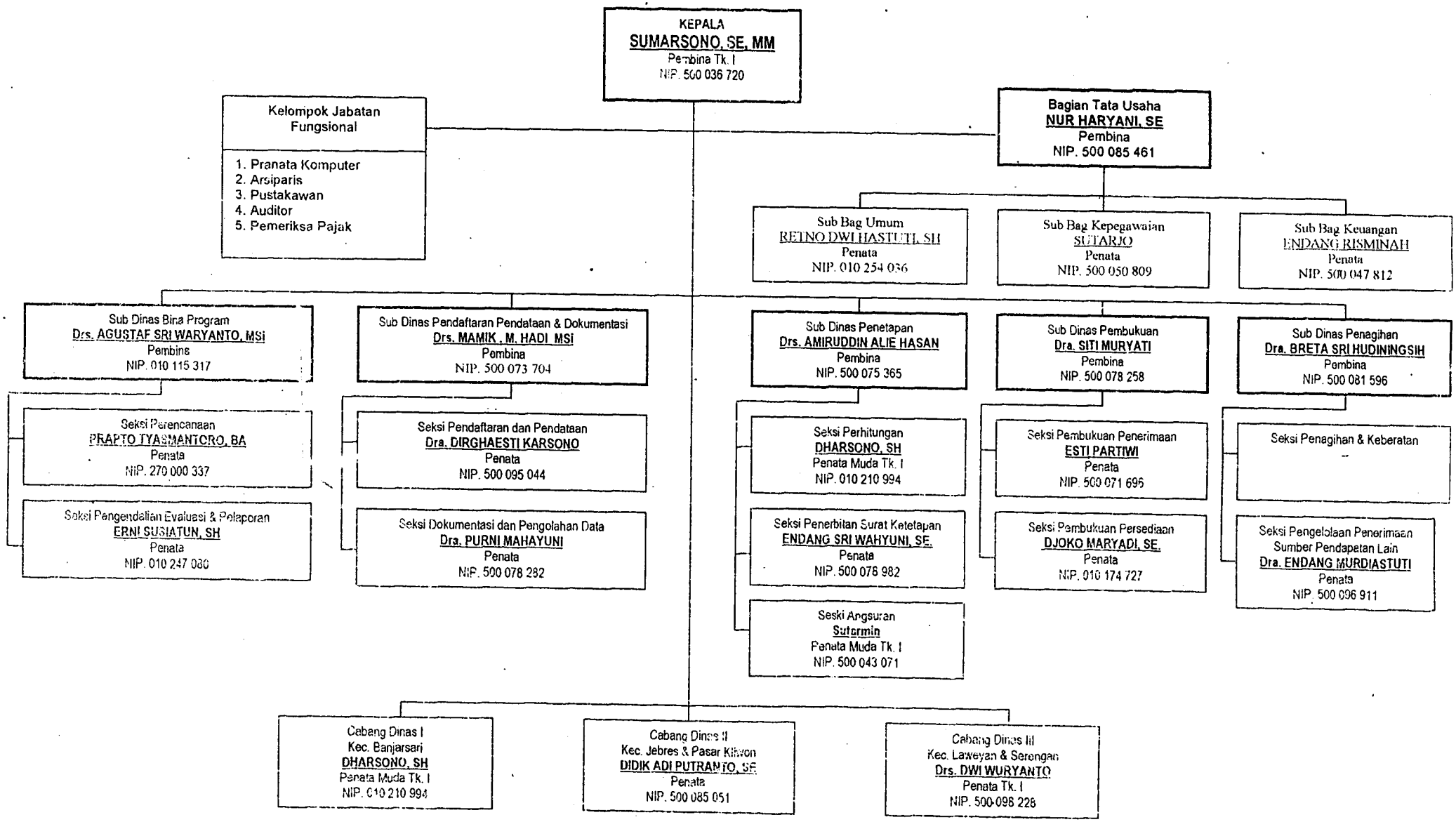

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 18 Maret 2005.

Kepada

Yth. WALIKOTA SURAKARTA
UP. KA. KESBANG & LINMAS
DI
SURAKARTA.

Nomor : 070/ 317 /III/2005.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : AN. GUBERNUR DIY
Tanggal : 10 Maret 2005
Nomor : 070/1220

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : KUNNIA SULISTYORINI
Alamat : d/a FE-UII
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 200-2004 "

Penanggung Jawab : DRA. INDAH SUSANTUN, MSi
Peserta : -
Lokasi : Kota Surakarta
Waktu : 21 Maret - 10 Juni 2005

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1220
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 10 Maret 2005
Kepada Yth.
Gub. Jawa Tengah c.q. Bakesbanglinmas

di
SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan FE - UII Yogyakarta
Nomor : 081/DEK/10/Bag.Um/III/2005
Tanggal : 09 Maret 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **KURNIA SULISTYORINI**
No. Mhs. : 01313175
Alamat Instansi : Condong Catur, Depok, Sleman, Yk.
Judul Penelitian : RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA TAHUN 2000 - 2004

Waktu : 10 Maret 2005 s/d 10 Juni 2005
Lokasi : Kotamadya Surakarta Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAPEDA

Ir. H. NANANG SUWANDI,MMA
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan FE - UII Yogyakarta
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.